

BANGKIT DAN OPTIMIS: SINERGI DAN INOVASI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

PERTEMUAN TAHUNAN
BANK INDONESIA 2021



BANGKIT DAN OPTIMIS: SINERGI DAN INOVASI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

PERTEMUAN TAHUNAN
BANK INDONESIA 2021



DAFTAR ISI

● Kinerja dan Prospek Ekonomi Global: Pemulihan Belum Berimbang, Ketidakpastian Pasar Keuangan Berlanjut	5
● Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional: Proses Pemulihan Terus Berlangsung, Stabilitas Terjaga	15
● Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2021: Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Menjaga Stabilitas	25
● Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah	27
● Stimulus Kebijakan Moneter	28
● Pelonggaran Kebijakan Makroprudensial	29
● Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran	31
● Akselerasi Pendalaman Pasar Uang	35
● Pemberdayaan Ekonomi-Kuangan Syariah dan UMKM	37
● Penguatan Kebijakan Internasional	40
● Transformasi Bank Indonesia	42
● Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi	43
● Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2022: Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Menjaga Stabilitas	50
● Arah Kebijakan Moneter	51
● Arah Kebijakan Makroprudensial	53
● Arah Kebijakan Sistem Pembayaran	55
● Akselerasi Pendalaman Pasar Uang	57
● Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau	58
● Kebijakan Internasional	59
● Bangkit dan Optimis untuk Indonesia Maju	60

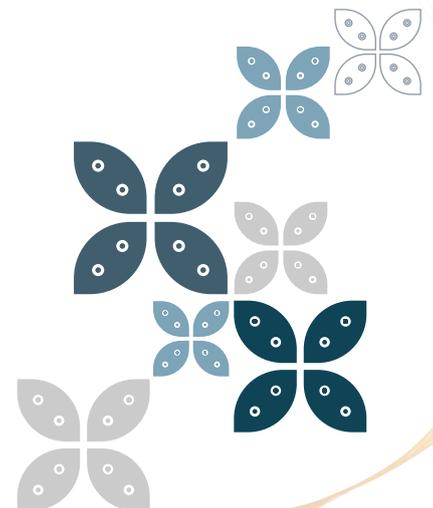
BANGKIT DAN OPTIMIS: SINERGI DAN INOVASI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

Pidato Gubernur Bank Indonesia
PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA
Jakarta, 24 November 2021

Yang kami muliakan dan kami banggakan,
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo,

Yang kami hormati,

- Pimpinan dan Anggota DPR dan DPD RI,
- Para Pimpinan Lembaga Negara,
- Para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
- Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK dan LPS,
- Para Pendahulu kami sebagai Gubernur dan rekan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia,
- Para Gubernur, Walikota, dan Bupati Kepala Daerah dari seluruh Indonesia,
- Para Pimpinan Perbankan, Korporasi, dan Media Nasional,
- Para penerima Bank Indonesia Awards 2021,
- Undangan yang berbahagia.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, Syalom,
Om Swastyastu, Namu Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* (Swt), Tuhan Yang Mahakuasa, atas rahmat dan ridho-Nya dapat bersilaturahmi dalam acara **Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021** pada hari ini. Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan **terima kasih kepada Bapak Presiden** yang berkenan hadir beserta seluruh para undangan sekalian.

Kami sampaikan selamat kepada perbankan, korporasi, dan perorangan yang menerima **Bank Indonesia Awards 2021** sejumlah 57 penghargaan dari 4 area dan 17 kategori di bidang pengelolaan stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, serta pendukung kebijakan Bank Indonesia. Penghargaan ini dilakukan secara tahunan, disatukan dengan acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, sebagai apresiasi dan sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia.

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi tahun 2021 serta prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2022 yang kami rangkum dalam satu tema "**Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi**". Tema yang menurut kami tepat guna menunjukkan semangat kita bersama untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19, dengan perekonomian nasional yang terus membaik pada tahun 2021. Optimis, perekonomian nasional insya Allah akan lebih baik lagi pada tahun 2022. Sinergi, karena kuatnya koordinasi kebijakan antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), industri perbankan dan sistem pembayaran, dunia usaha, dan semua pihak, untuk terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Inovasi, baik dalam koordinasi kebijakan ekonomi nasional termasuk koordinasi fiskal-moneter untuk pembiayaan APBN dalam masa pandemi, maupun dalam akselerasi digitalisasi dan inklusi ekonomi-keuangan nasional melalui digitalisasi sistem pembayaran, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BWI). Sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional inilah yang perlu terus kita perkuat ke depan, untuk semakin bangkit dan optimis dalam pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya, menuju Indonesia Maju.

Pemaparan kami sampaikan dalam 5 (lima) bagian, yaitu: (i) Kinerja dan prospek ekonomi global yang menunjukkan pemulihan, meski belum berimbang, dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut; (ii) Kinerja dan prospek ekonomi nasional yang terus membaik menuju pemulihan dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga; (iii) Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2021 untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan; (iv) Sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi ke depan; dan (v) Arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2022 untuk mendorong akselerasi dan inovasi pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas moneter dari dampak normalisasi kebijakan global. **Penjelasan ini sekaligus sebagai pemenuhan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.**

Kinerja dan Prospek Ekonomi Global: Pemulihan Belum Berimbang, Ketidakpastian Pasar Keuangan Berlanjut

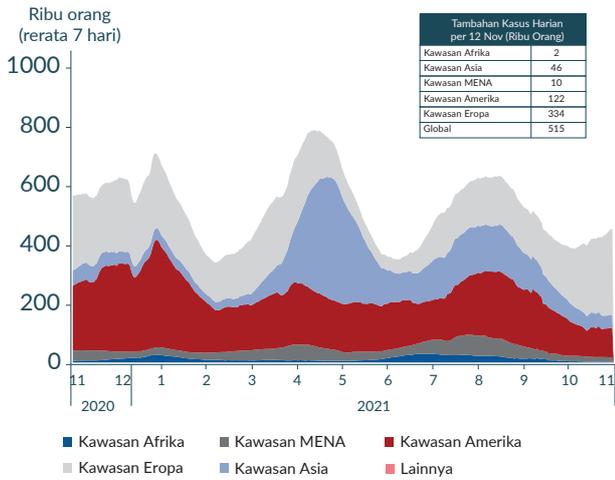
Perekonomian global terus menuju ke pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Telah dua puluh satu bulan dunia hidup bersama pandemi Covid-19. Dari hidup dalam ketakutan dan kepanikan, kemudian dapat bertahan, hingga kini bangkit dan optimis untuk hidup lebih baik, dengan kebiasaan, budaya, dan peradaban baru. Begitu pula dengan perkembangan ekonomi, setelah selamat dari resesi tahun lalu, kini terus membaik dan menuju ke pemulihan. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang sempat terancam krisis pada awal pandemi Covid-19, kemudian telah membaik dan tetap terjaga. Tetapi, kita tidak boleh lengah. Pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan bisa menjadi endemi, dengan munculnya sejumlah varian baru Covid-19. Distribusi dan kemampuan vaksinasi untuk mencapai imunitas massal (*herd immunity*) belum merata ke berbagai penjuru dunia, sangat cepat di negara maju (*advanced economies*, AEs) tetapi masih lambat di banyak negara berkembang dan sedang tumbuh (*emerging markets and developing economies*, EMDEs). Ketidakpastian masih berlanjut, bahkan banyak di antaranya belum diketahui, *the unknowns*. Karenanya, kita harus tetap waspada, agar lebih baik dalam mengantisipasi sejumlah risiko yang mungkin dapat muncul dan menempuh langkah-langkah lanjutan untuk penanganannya, dengan senantiasa mendekat dan berdoa kepada Tuhan Yang Mahakuasa.

Pandemi memunculkan sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi secara baik. Kini dan ke depan. Setidaknya 7 (tujuh) hal penting perlu kita cermati. *Pertama*, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal dan risiko endemi Covid-19 yang mungkin saja terjadi. *Kedua*, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs dan masih berjalan lambat di EMDEs. *Ketiga*, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. *Keempat*, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan

fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy*) antara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. *Kelima*, dampak luka memar (*scarring effect*) dari pandemi terhadap kondisi korporasi dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. *Keenam*, demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antar negara. *Ketujuh*, semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari AEs yang perlu dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs. Berikut ini penjelasan dari ketujuh tantangan tersebut dan antisipasinya dengan langkah kebijakan yang diperlukan di Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang mereda di penghujung 2020 merebak kembali dengan munculnya varian delta di India pada Februari 2021 dan dengan cepat menyebar ke Asia dan berbagai belahan dunia, mengancam kesehatan dan kemanusiaan. Varian delta sangat cepat menular dan lebih ganas dampaknya terhadap kesehatan dan kematian manusia dibandingkan dengan varian alfa maupun varian lainnya. Lebih dari 95% kasus penularan Covid-19 pada tahun 2021 di banyak negara, termasuk Indonesia, karena varian delta dengan tingkat penularan (*viral load*) 1.260 kali lebih tinggi dari varian asli. Masa inkubasi varian delta juga lebih pendek, yaitu sekitar 4 (empat) hari setelah terpapar, dibandingkan dengan rata-rata 6-14 hari pada varian asli. Kombinasi dari tingginya *viral load* dan singkatnya masa inkubasi inilah yang menyebabkan tingkat penularan yang sangat cepat dan tingkat kematian yang lebih tinggi. Penyebaran di Asia mencapai puncaknya pada awal Mei, sedikit menurun pada Juni tetapi meningkat kembali pada Agustus 2021 (Grafik 1). Di Amerika Serikat (AS) dan di Eropa, penyebaran varian delta mencapai puncaknya pada Agustus 2021 tetapi masih terus tinggi hingga kini. Dampaknya terhadap kesehatan juga lebih ganas, menyebabkan kenaikan tingkat kematian (*fatality rate*) di Asia yang cepat hingga mencapai 1,54% pada akhir Agustus dan melandai setelahnya, setelah

Grafik 1. Tambahannya Kasus Covid-19 Global

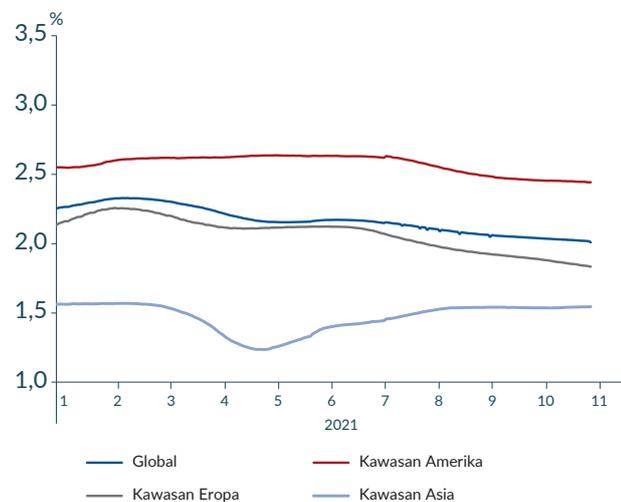


Data s.d. 12 November 2021
Sumber: WHO, diolah

mencapai titik terendah pada awal Mei 2021 (Grafik 2). Dampak terhadap tingkat kematian di kawasan Amerika dan Eropa tidak terlihat signifikan, antara lain karena tingkat vaksinasi dan imunitas massal yang telah relatif tinggi di kedua belahan dunia itu.

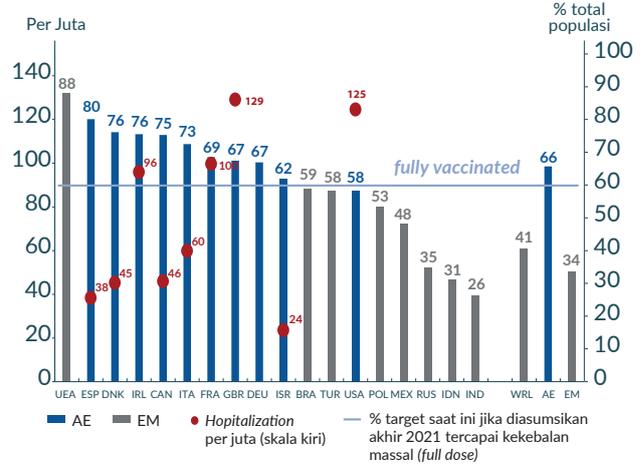
Tingkat vaksinasi dan keketatan pembatasan mobilitas masyarakat menentukan tingkat penyebaran varian delta Covid-19, serta dampaknya terhadap permasalahan kesehatan dan kemanusiaan maupun aktivitas perekonomian. Di sinilah salah satu letak permasalahan mendasar dari dampak pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia, yaitu

Grafik 2. Fatality Rate Covid-19 Global



Data s.d. 12 November 2021
Sumber: WHO, diolah

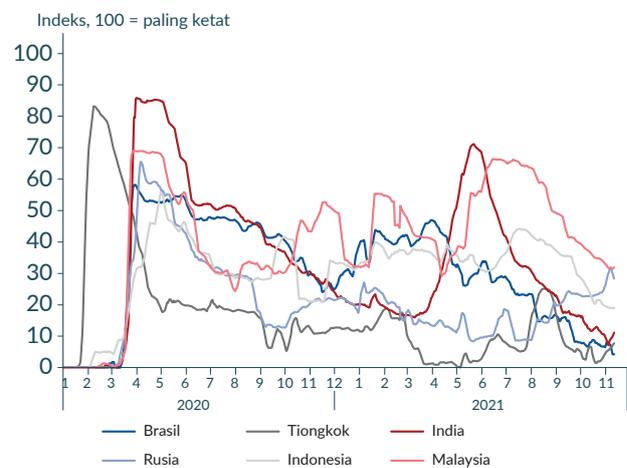
Grafik 3. Tingkat Vaksinasi dan Perawatan Rumah Sakit Global



Data s.d. 8 November 2021
Sumber: Our World in Data, diolah

ketimpangan tingkat vaksinasi antara AEs dengan EMDEs. Di negara-negara maju, dengan ketersediaan pasokan vaksin dan besarnya kemampuan belanja fiskal pemerintahnya, tingkat vaksinasi telah mencapai rerata 66% dari total populasi, dan karenanya tingkat penyebaran varian delta dan pembatasan mobilitas yang lebih rendah (Grafik 3). Secara keseluruhan, telah mulai terbentuk imunitas massal masyarakat terhadap pandemi Covid-19 dengan tingkat vaksinasi di atas 61% penduduk, tertinggi di United Emirate Arabs (UAE) sebesar 88% penduduk hingga di AS sebesar 58% penduduk. Sementara di EMs, dengan keterbatasan pasokan

Grafik 4. Tingkat Pembatasan Mobilitas Emerging Markets

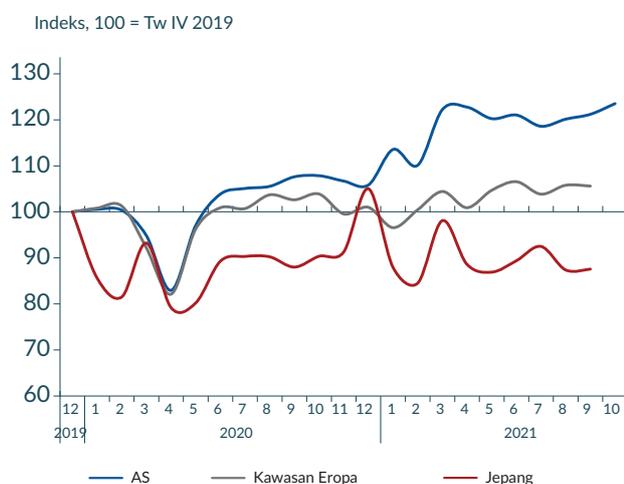


Data s.d. 15 November 2021
Sumber: Goldman Sachs Research
Goldman Sachs ELI : Oxford Stringency Index + Google Mobility Report

vaksin dan kemampuan belanja fiskal pemerintahnya, tingkat vaksinasi baru mencapai rerata 34%, dan karenanya tingkat penyebaran varian delta lebih besar. Lebih dari itu, tingkat pembatasan mobilitas yang harus dilakukan untuk pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 lebih ketat di EMs, meskipun berbeda mengenai waktu dan durasi lamanya (Grafik 4). Ketimpangan tingkat vaksinasi di AEs dan EMs tersebut menjelaskan pula perbedaan pengaruh negatif dari penyebaran varian delta Covid-19 terhadap tingkat perbaikan ekonomi yang sedang berlangsung.

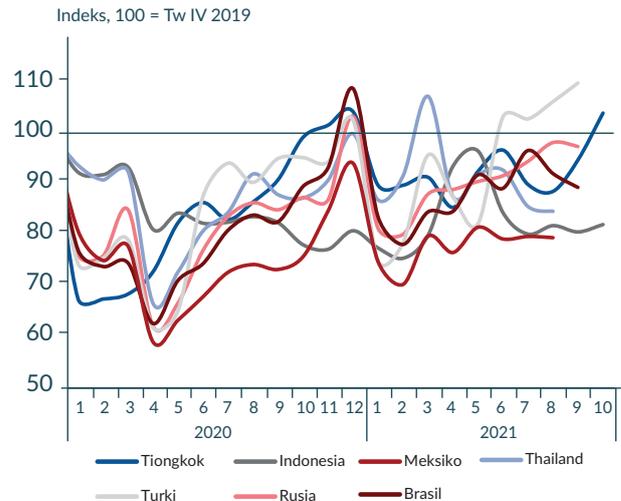
Sejumlah indikator menunjukkan kenaikan aktivitas perekonomian yang relatif cepat pada awal tahun 2021 kemudian melandai dengan penyebaran varian delta Covid-19. Tingkat pembatasan mobilitas manusia atas terjadinya gelombang kedua penyebaran varian delta dan kekhawatiran kemungkinan terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 berpengaruh pada indeks keyakinan konsumen dan penjualan ritel di berbagai negara. Sekali lagi, pengaruhnya berbeda dari satu negara ke negara lain, tergantung pada tingkat vaksinasi serta persepsi konsumen atas kekhawatiran gelombang ketiga Covid-19. Di negara maju, misalnya, indeks penjualan ritel yang meningkat cepat sejak penghujung 2020 kemudian melandai sejak Maret 2021 di AS dan Juli 2021 di Eropa

Grafik 5a. Penjualan Ritel Negara Maju



Sumber: CEIC, diolah

Grafik 5b. Penjualan Ritel Negara Berkembang



Sumber: CEIC, diolah

(Grafik 5a). Bahkan indeks keyakinan konsumen menurun lebih tajam di AS dibandingkan di Eropa. Di Tiongkok, indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen melandai sejak Juni 2021 (Grafik 5b), sementara indeks keyakinan konsumen di India yang menurun sejak munculnya varian delta pada Februari kembali membaik sejak Juli 2021. Pola peningkatan penjualan ritel ini selanjutnya juga berpengaruh terhadap melandainya tingkat kenaikan konsumsi. Penyebaran varian delta dan pembatasan mobilitas juga berpengaruh pada indeks keyakinan bisnis, *Purchasing Managers' Index* (PMI), yang selanjutnya berpengaruh pada tingkat produksi dan investasi. Aktivitas ekonomi kemudian berangsur-angsur membaik sejak triwulan III 2021, seiring dengan menurunnya kasus varian delta dan meningkatnya kembali mobilitas manusia. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya varian baru Covid-19 dan risiko pandemi akan berlangsung lama dan bahkan menjadi endemi perlu diwaspadai dampaknya terhadap pemulihan ekonomi dunia.

Perbaikan ekonomi global terus berlanjut sepanjang tahun 2021, meski belum berjalan seimbang, dan diperkirakan akan pulih pada tahun 2022. Kecepatan tingkat perbaikan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat vaksinasi untuk mencapai imunitas massal, besarnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter, serta daya tahan dalam menghadapi penyebaran varian delta Covid-19. Di negara maju,

khususnya AS, pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat, di dukung oleh stimulus fiskal dan moneter yang sangat besar. Stimulus pemerintah dan bank sentral dimaksud melalui program vaksinasi, bantuan sosial dan dunia usaha, serta penambahan likuiditas (*quantitative easing*) yang sangat besar ke sistem keuangan. Sementara di sisi lain, kebanyakan negara EMDEs, kecuali Tiongkok, masih harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negerinya, menuju pemulihan ekonomi. Disamping pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter juga menyebabkan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi. Kebanyakan negara EMDEs mengalami keterbatasan untuk meningkatkan anggaran lebih besar, terutama karena penurunan penerimaan pajak oleh merosotnya aktivitas dunia usaha, serta keterbatasan kemampuan berhutang untuk membiayai defisit fiskal yang lebih besar. Sementara, efektivitas kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian banyak terkendala karena kondisi perbankan dan sektor keuangan yang juga terdampak pandemi.

Secara keseluruhan, setelah kontraksi 3,1% pada 2020, ekonomi dunia diprakirakan tumbuh sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022 (Tabel 1). Pemulihan ekonomi telah terjadi di dua negara ekonomi terbesar dunia, yaitu Tiongkok dengan pertumbuhan 8,0% dan 5,4% pada 2021 dan 2022 setelah tumbuh 2,3% pada 2020, dan AS dengan pertumbuhan 5,9% dan 3,9% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 3,4% pada 2020. Sementara itu, pemulihan ekonomi negara-negara lain diprakirakan akan terjadi pada tahun 2022 dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut sejak tahun 2021. Di antara negara maju, kawasan Eropa diperkirakan akan tumbuh 4,8% dan 4,4% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 6,3% pada 2020, demikian pula Jepang akan tumbuh 2,4% dan 2,5% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 4,6% pada 2020. Di antara negara Asia, India diperkirakan akan tumbuh tinggi sekitar 8,8% dan 8,1% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 7,1% pada 2020. Demikian pula ASEAN-5 akan tumbuh 3,9% dan 5,4% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 3,4% pada 2020. Kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas terus berlanjut, sehingga menopang prospek ekspor dan pemulihan ekonomi di berbagai negara EMDEs. Pemulihan ekonomi

Tabel 1. Ekonomi Global: Pertumbuhan, Volume Perdagangan, Harga Komoditas (%)

	2019	2020	2021*	2022*
Pertumbuhan Ekonomi Dunia	2,8	-3,1	5,7	4,4
Negara Maju	1,6	-4,5	5,1	3,9
Amerika Serikat	2,2	-3,4	5,9	3,9
Eropa	1,3	-6,3	4,8	4,4
Jepang	0,0	-4,6	2,4	2,5
Negara Berkembang	3,7	-2,1	6,1	4,9
Tiongkok	6,0	2,3	8,0	5,4
India	4,8	-7,1	8,8	8,1
ASEAN 5	4,9	-3,4	3,9	5,4
Amerika Latin	0,1	-7,0	5,1	2,8
Emerging Eropa	2,5	-2,0	4,7	3,7
Timur Tengah dan Asia Tengah	1,4	-2,8	3,9	3,8
Volume Perdagangan Dunia	-0,4	-5,3	8,3	3,8
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	-3,0	-0,8	60,3	2,5

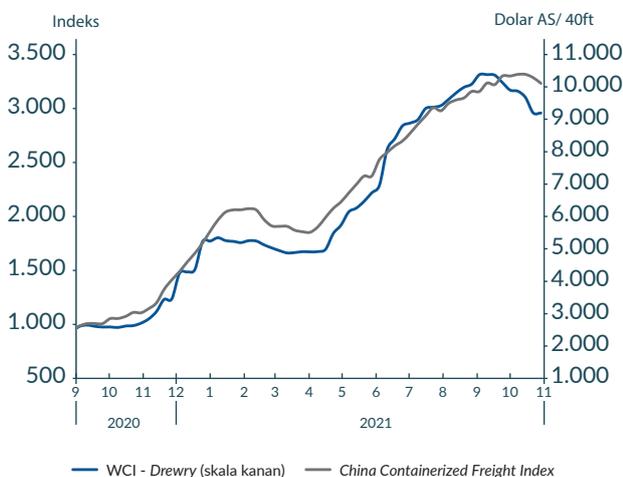
Sumber: IMF WEO Database Oktober 2021, Proyeksi Bank Indonesia

Keterangan: * proyeksi

dunia diperkirakan akan lebih kuat pada paruh kedua tahun 2022 serta tahun 2023 dan selanjutnya.

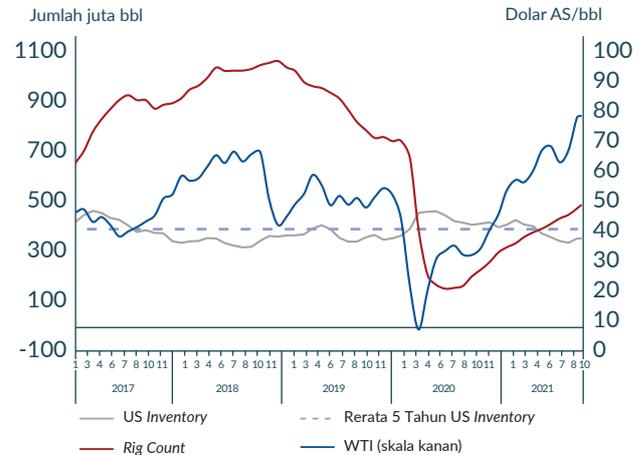
Kenaikan permintaan karena pemulihan ekonomi yang melebihi kemampuan pasokan karena keterbatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan global dan kelangkaan energi. Merebaknya varian delta Covid-19 telah menyebabkan permasalahan distribusi dan pasokan barang input produksi dan energi secara global dan di banyak negara, seperti tercermin pada kelangkaan kontainer, tumpukan barang (*backlog*) di banyak pelabuhan, semakin lamanya waktu pengiriman, dan bahkan kenaikan biaya pengapalan barang antarnegara, khususnya sejak April 2021 (Grafik 6). Di AS, kesenjangan antara lain juga terjadi di pasar tenaga kerja seperti terlihat pada tingkat pengangguran sukarela (*voluntary unemployment*) yang masih meningkat dan juga kenaikan upah pada sektor-sektor jasa perhotelan dan restoran, pendidikan dan kesehatan, penjualan eceran, manufaktur, dan juga perdagangan. Sementara itu, di negara produsen, khususnya di Tiongkok dan negara Asia lainnya, pemberlakuan pembatasan mobilitas untuk penanganan penyebaran varian delta Covid-19 menimbulkan penurunan produksi dan inventori, dan bahkan kemampuan dalam pengapalan, baik untuk barang input produksi maupun energi seperti minyak,

Grafik 6. Indeks Tarif Pengapalan: Dunia dan Tiongkok



*Data s.d. 11 November 2021
Sumber: Bloomberg

Grafik 7. Inventory Minyak di AS dan Harga Minyak Dunia



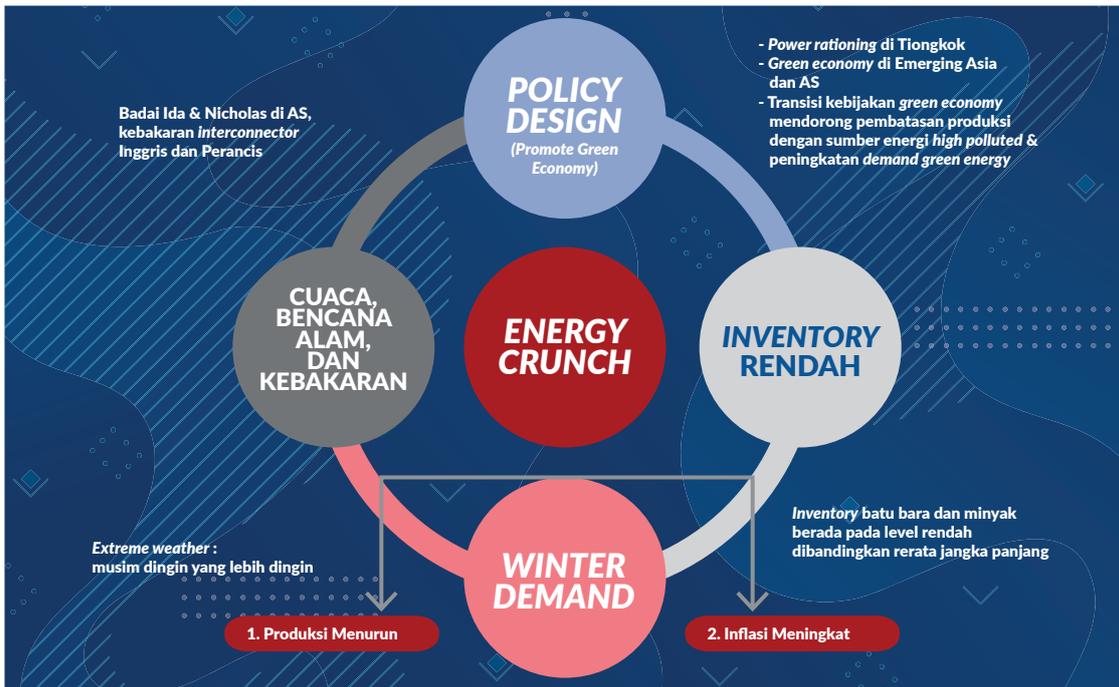
Data s.d. 12 November 2021
Sumber: Bloomberg, diolah

batu bara, dan lainnya. Bahkan untuk minyak, inventori di AS pun telah turun di bawah rerata 5 (lima) tahun meskipun terjadi indikasi kenaikan produksi eksplorasi (Grafik 7).

Gangguan distribusi dan pasokan barang yang diperparah dengan kelangkaan energi berdampak pada inflasi global.

Selain ketidakseimbangan pemulihan ekonomi dan pembatasan mobilitas untuk penanganan Covid-19 di atas, permasalahan ini juga didorong oleh faktor kebijakan, yaitu semakin kuatnya tuntutan akan ekonomi hijau dari Eropa dan juga AS, di tengah pembatasan produksi di Tiongkok dan sejumlah negara produsen lain yang memerlukan masa transisi menuju ke produksi yang lebih ramah lingkungan (Skema 1). Pada waktu yang sama, permintaan energi meningkat tinggi di negara-negara maju untuk antisipasi pasokan menghadapi musim dingin. Berbagai faktor ini mengakibatkan kesenjangan produksi-permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas dunia, seperti harga minyak, batu bara, dan juga pangan (Grafik 8). Dampak selanjutnya terjadi kenaikan inflasi secara aktual maupun perkiraan tekanan inflasi ke depan di negara-negara AEs, khususnya di AS, Eropa, Inggris, Kanada, dan Jepang (Grafik 9). Pertanyaannya, apakah tekanan inflasi ini bersifat temporer atau permanen? Grafik 9 menunjukkan prakiraan inflasi di sejumlah negara maju tersebut secara keseluruhan akan cenderung bersifat temporer, yaitu akan meningkat tinggi pada sisa tahun 2021 hingga setidaknya pertengahan tahun 2022, dan

Skema 1. Keterbatasan Energi dan Tekanan Inflasi



Sumber: Bank Indonesia

selanjutnya akan bergerak menurun. Namun demikian, perkembangan ini perlu terus kita waspadai dari waktu ke waktu untuk dapat mengantisipasi dampak positif dan negatifnya bagi perekonomian Indonesia.

Ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global serta gangguan pasokan dan kelangkaan energi mendorong

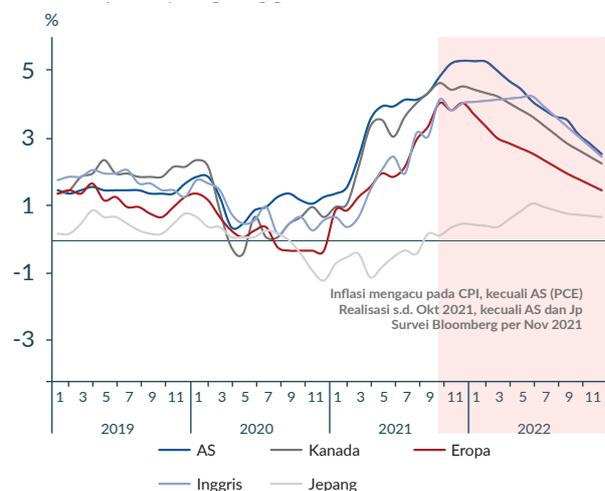
ketidaksinkronan rencana normalisasi kebijakan (exit policy) baik fiskal maupun moneter antara AEs dan EMs. Secara keseluruhan, semua negara akan melakukan normalisasi kebijakan fiskalnya dengan defisit yang mulai menurun sejak tahun 2021, meskipun tahapannya jauh lebih cepat di AEs menjadi sekitar 3,6% pada tahun 2023 sementara di EMs akan

Grafik 8. Harga Komoditas Dunia: Minyak, Batu Bara, dan Pangan



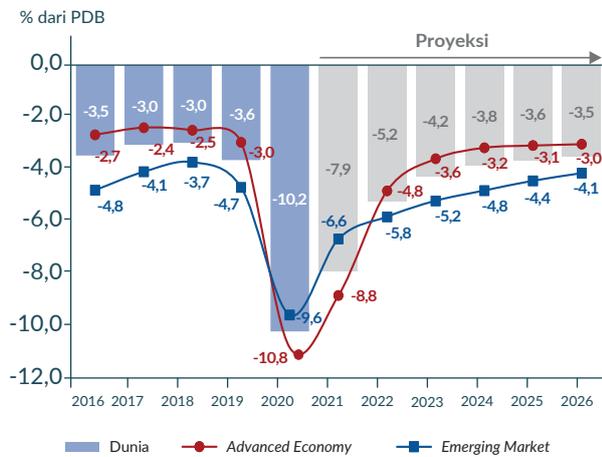
Data s.d. 12 November 2021
 Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 9. Inflasi Aktual dan Perkiraan: AS, Eropa, Jepang, Inggris, dan Kanada



Sumber: Survei Bloomberg, Proyeksi Bank Indonesia, diolah

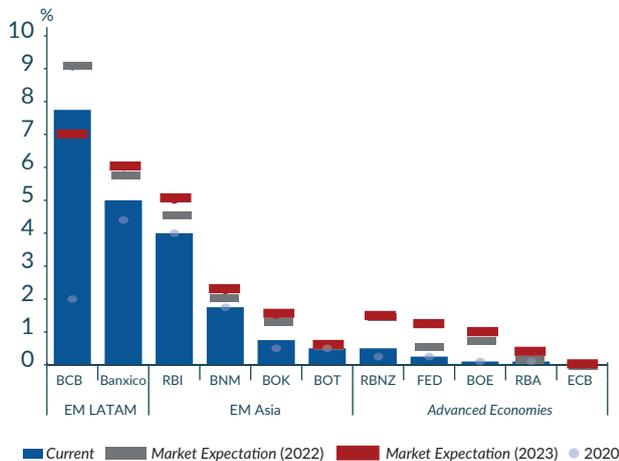
Grafik 10. Rencana Normalisasi Kebijakan Fiskal: AEs dan EMs



Sumber: IMF Fiscal Monitoring Oktober 2021

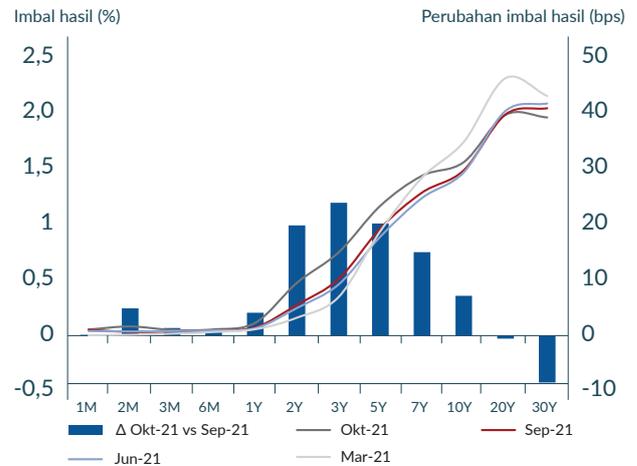
lebih bertahap yaitu menjadi sekitar 4,8% pada tahun 2024 (Grafik 10). Demikian pula kebijakan moneter, kemungkinan normalisasi akan lebih cepat di AEs dan lebih lambat di EMs sesuai dengan pola pertumbuhan ekonomi dan besarnya tekanan inflasi di masing-masing negara. Hal ini terlihat dari ekspektasi pasar terkait suku bunga kebijakan yang pada umumnya lebih tinggi dari aktualnya pada kondisi saat ini (Grafik 11). Bahkan di AS, dengan pemulihan ekonomi yang berjalan lebih cepat seperti tercermin pada kenaikan inflasi dan menurunnya tingkat pengangguran, the Fed secara berkala menyatakan akan mulai mengurangi likuiditas moneter (*tapering*)

Grafik 11. Rencana Normalisasi Kebijakan Moneter: AEs dan EMs



Data per 16 November 2021
Sumber: Bloomberg

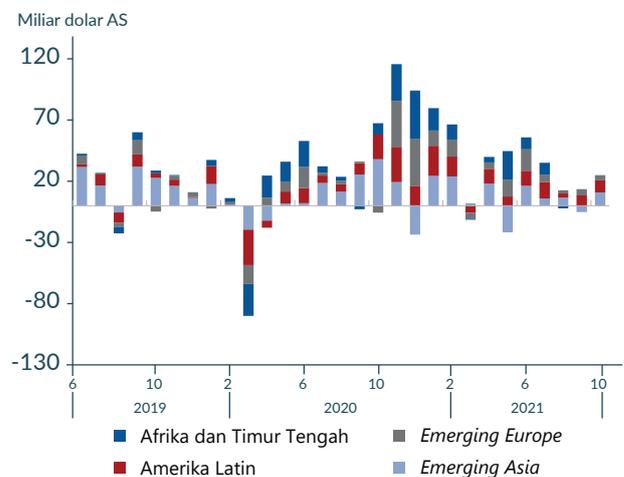
Grafik 12. Imbal Hasil US Treasury per Tenor Jangka Waktu



Sumber: Bloomberg, diolah

pada awal tahun 2022 dan kemungkinan akan diikuti dengan kenaikan suku bunga kebijakan Fed Funds Rate (FFR) paling cepat pada triwulan III 2022. Rencana normalisasi kebijakan moneter oleh the Fed ini telah mendorong kenaikan imbal hasil *US Treasury* (Grafik 12), meskipun pengaruhnya cenderung lebih rendah pada bulan September 2021 dibandingkan dengan Maret 2021 sejalan dengan kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh the Fed. Meskipun demikian, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut dan bahkan cenderung meningkat, dipengaruhi oleh menyebarnya delta varian Covid-19 serta dampak gangguan mata rantai

Grafik 13. Aliran Investasi Portofolio ke Emerging Economies (EMs)

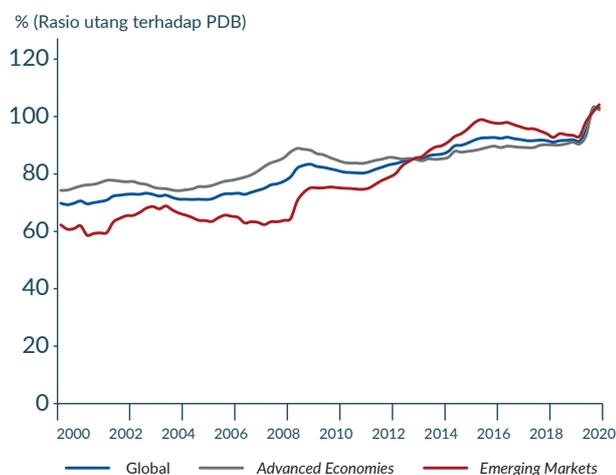


Sumber: IIF

pasokan global dan kelangkaan energi terhadap kenaikan inflasi di AS dan sejumlah negara maju lainnya. Akibatnya, aliran investasi portofolio yang masuk ke negara EMs yang relatif tinggi pada awal tahun 2021 menurun secara cepat khususnya sejak Maret 2021 (Grafik 13) dan berdampak pada tekanan dan volatilitas nilai tukar negara-negara EMs yang juga mengalami peningkatan. Ketidaksinkronan normalisasi kebijakan fiskal dan moneter serta meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global inilah yang semakin mempersulit upaya perbaikan menuju ke pemulihan ekonomi di negara-negara EMs, termasuk Indonesia.

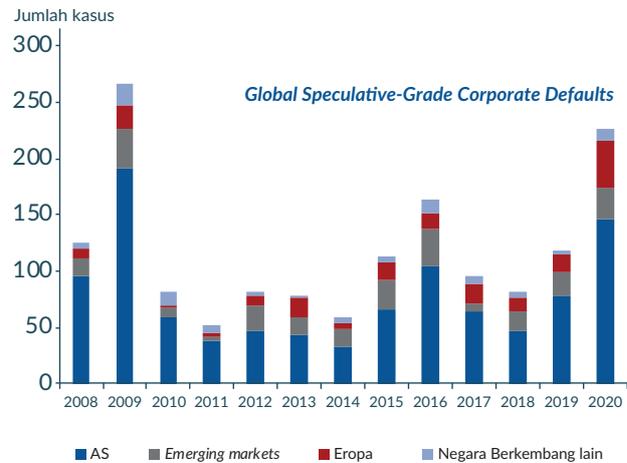
Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan juga berdampak pada luka memar terhadap kondisi korporasi dan menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan mobilitas manusia, yang harus dilakukan sebagai bagian dalam penanganan pandemi Covid-19, telah menyebabkan menurunnya aktivitas dunia usaha, sehingga berdampak pada merosotnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (*leverage*) meningkat sejak pandemi Covid-19, baik di AEs maupun EMDEs (Grafik 14). Bahkan, jumlah kegagalan korporasi melonjak hampir menyamai tingkat kegagalan pada krisis keuangan global, terbesar di AS kemudian Eropa dan EMs (Grafik 15). Beberapa

Grafik 14. Leverage Korporasi Non-Finansial: Global, AEs, dan EMs



Sumber: IMF GFSR April 2021

Grafik 15. Jumlah Kegagalan Korporasi: Global, AS, Eropa, dan EMs



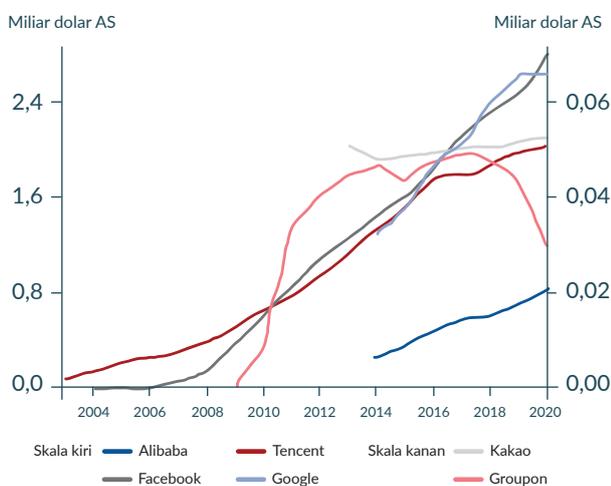
Sumber: IMF GFSR April 2021

kasus kegagalan korporasi yang terjadi baik di AS maupun di Tiongkok sebagai contohnya. Tentu saja, tidak semua perusahaan mengalami luka memar yang sama, tergantung pada dampak pembatasan mobilitas terhadap sektor ekonomi masing-masing. Namun demikian, kondisi luka memar korporasi tersebut perlu terus dimonitor dan dicermati risikonya yang dapat merembet dan berdampak negatif pada kondisi perbankan secara individual maupun stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Itulah kenapa normalisasi pengaturan terkait relaksasi ketentuan restrukturisasi kredit di banyak negara cenderung dilakukan sangat berhati-hati. Bahkan, otoritas pengawasan sektor keuangan di banyak negara cenderung memperpanjang relaksasi ketentuan untuk penundaan pembayaran pokok dan angsuran, sehingga memberikan kelonggaran atas pengakuan kredit bermasalah (NPL) pada perbankan. Permasalahan luka memar korporasi dan dampaknya pada lembaga dan stabilitas sistem keuangan ini tetap saja perlu diwaspadai dengan masih berlanjutnya pandemi Covid-19. Bahkan, meski secara keseluruhan ekonomi telah sepenuhnya pulih, luka memar korporasi dari pandemi Covid-19 tersebut masih perlu waktu untuk sembuh.

Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi-keuangan berkembang sangat cepat, dengan semakin dominannya peran *BigTech* dan

semakin meningkatnya *e-commerce*. Digitalisasi memang telah terjadi sebelum pandemi Covid-19, didorong oleh kemajuan teknologi digital termasuk intelegensia artifisial oleh perusahaan teknologi besar (*BigTech*) yang mampu menghadirkan jasa layanan pribadi dan ekonomi-keuangan melalui *handphone* maupun *gadget* lain, kapanpun dan dimanapun (Grafik 16). Teknologi intelegensia artifisial yang mampu mengolah data perilaku pribadi semakin begitu canggihnya menawarkan pengalaman konsumen untuk memenuhi berbagai kebutuhannya untuk bertransaksi ekonomi-keuangan yang semakin cepat dan sering, melalui platform *e-commerce* dengan volume dan frekuensi yang sangat besar meski nilai per transaksi yang kecil (ritel) (Grafik 17). Sejak pandemi Covid-19, dengan pembatasan mobilitas aktivitas manusia, digitalisasi ekonomi-keuangan dan sistem pembayaran berkembang sangat cepat. Transaksi ekonomi-keuangan digital yang semula lebih banyak di kalangan muda dan generasi milenial, sekarang telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat serta menjadi preferensi dan kebiasaan baru karena kemudahan, kecepatan, serta murahannya harga dan biaya transaksi. Tidak hanya di kota-kota, tetapi meluas ke desa-desa, bahkan semakin menembus batas-batas negara. Ekonomi-keuangan digital menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi serta mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan. Namun di sisi lain,

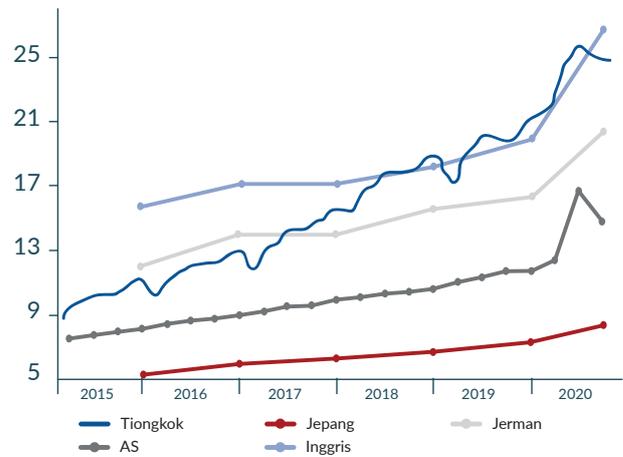
Grafik 16. Pengguna Aktif BigTech



Sumber: BIS

Grafik 17. Pangsa E-Commerce

% dari total penjualan ritel

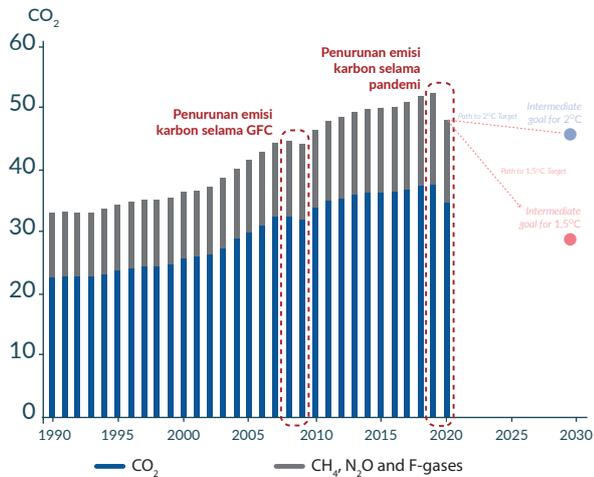


Data s.d. Nov 2020 (AS), Okt 2020 (Tiongkok), Sep 2020 (Jerman, Jepang, dan Inggris)
Sumber: BIS

muncul pula sejumlah permasalahan baru, termasuk kepemilikan dan perlindungan data pribadi, pajak transaksi ekonomi-keuangan digital, layanan jasa keuangan oleh entitas bukan lembaga keuangan (*shadow banking*), meluasnya mata uang yang diciptakan swasta (*cryptocurrency*), dan tingginya serangan siber. Berbagai peluang dan tantangan dari meluasnya ekonomi-keuangan digital ini perlu direspons dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk mendudukan kembali peran negara, termasuk otoritas-otoritas kementerian keuangan, bank sentral, pengawasan lembaga keuangan, teknologi dan informasi, serta keamanan dan pertahanan, dalam peradaban baru, yaitu peradaban digital.

Selain begitu cepatnya digitalisasi, pandemi Covid-19 juga meningkatkan tuntutan akan perlunya mempercepat ekonomi-keuangan hijau (*green economy and finance*). Sesungguhnya komitmen berbagai negara terhadap permasalahan perubahan iklim dan perlunya segera mengadopsi ekonomi-keuangan hijau telah ada sebelum pandemi Covid-19, sebagaimana dituangkan dalam *Paris Agreement* tahun 2015. Berbagai negosiasi dan perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi, baik antarnegara maupun kawasan, juga telah memasukkan perlunya adopsi ekonomi-keuangan hijau tersebut. Bahkan dalam hubungan investor keuangan, termasuk investasi portofolio, preferensi

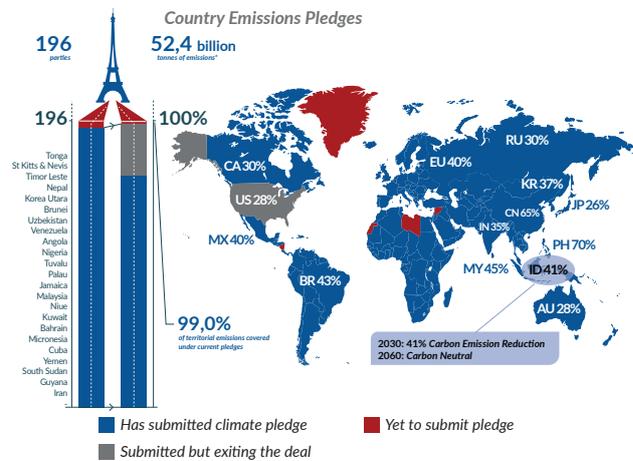
Grafik 18. Emisi Karbon dan Target Penurunan: Menuju Zero Emission



Sumber: UNCTAD (April 2020)

dan tuntutan oleh para pemilik dana (besar maupun kecil) mewarnai pembentukan portofolio investasi oleh para manajer investasi global, termasuk pilihan yang cenderung mengutamakan negara EMDEs yang lebih pro-ekonomi dan keuangan hijau. Sejak pandemi Covid-19, tuntutan ekonomi-keuangan hijau semakin kuat dari negara-negara maju, antara lain untuk melanjutkan penurunan emisi karbon yang jauh lebih besar yaitu 8-9% dibandingkan sekitar 2-3% selama krisis keuangan global 2007/2009 (Grafik 18). Karenanya, berbagai negara, khususnya EMDEs termasuk Indonesia, harus semakin serius untuk menyusun program penurunan emisi karbon (*carbon emission reduction program*) dalam rangka memenuhi komitmen Paris di atas (Grafik 19). Termasuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah dan bank sentral untuk suatu proyek dan produk keuangan yang lebih ramah lingkungan, baik melalui insentif pajak dan pajak karbon (*carbon tax*) maupun kebijakan makroprudensial yang memberikan insentif kepada pembiayaan hijau. Sejumlah manajer investasi dan lembaga keuangan dunia juga semakin mampu menawarkan pilihan-pilihan produk investasi di EMDEs yang lebih ramah lingkungan, dengan mendasarkan pada komitmen penurunan emisi karbon suatu negara dan juga proyek investasi yang dibiayai, yang sering disebut *Sustainable Finance*. Bahkan, program penurunan emisi karbon tersebut mulai juga diperdagangkan, atau yang disebut dengan *Carbon Trading*.

Grafik 19. Paris Agreement: Target Penurunan Emisi per Negara



* of greenhouse gases in 2012 excluding international aviation and shipping
 Sumber: UNCTAD (April 2020)

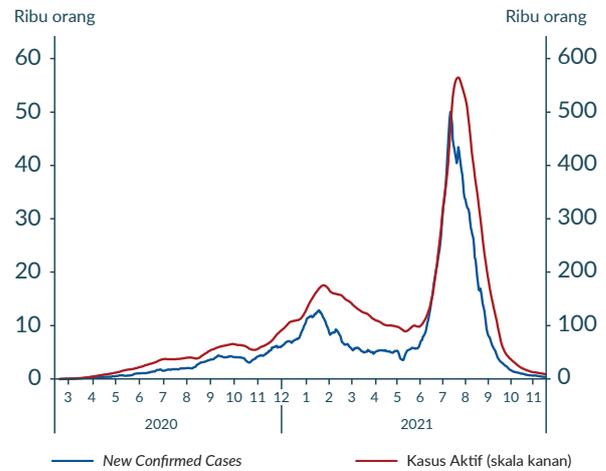
Sejumlah langkah koordinasi kebijakan internasional ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Sejumlah agenda penting mengemuka di forum-forum G20, IMF, FSB, BIS, maupun lainnya. *Pertama*, perlunya semakin memperluas pasokan dan distribusi vaksin dari AEs ke EMDEs, termasuk pemberian pinjaman lunak dan pengurangan utang (*debt relief*) bagi *Less Developed Countries* (LDCs) serta tambahan alokasi *Special Drawing Rights* (SDR) khusus dengan permintaan agar negara AEs dan EMDEs untuk berpartisipasi dalam membantu LDCs. *Kedua*, perlunya penahanan dan kejelasan komunikasi dalam normalisasi kebijakan fiskal dan moneter (*exit policy*) untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global serta dampak yang ditimbulkannya bagi stabilitas pasar keuangan global. *Ketiga*, perlunya langkah-langkah bersama untuk mengatasi gangguan dalam mata rantai pasokan global serta kelangkaan energi agar tetap mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi lonjakan inflasi global. *Keempat*, perlunya kebijakan baik dari sisi fiskal, moneter, makroprudensial, pengaturan lembaga keuangan, maupun di sektor riil (seperti reformasi struktural dan tenaga kerja) untuk mengatasi dampak luka memar dari pandemi terhadap kondisi korporasi agar tidak mengganggu keberlanjutan pemulihan ekonomi dan mencegah risiko rambatan terhadap stabilitas sistem keuangan. *Kelima*, perlunya mempercepat

kerja sama internasional dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi-keuangan, termasuk kerja sama sistem pembayaran antar negara (*cross-border payments system*), pengembangan *Central Bank Digital Currency (CBDC)*, pengaturan dan pengawasan untuk *BigTech*, data, serangan siber, serta perluasan digitalisasi untuk inklusi ekonomi-keuangan seperti remitansi, perdagangan ritel, dan UMKM. *Keenam*, perlunya masa transisi menuju ekonomi-keuangan hijau, termasuk dalam pemenuhan dan transparansi data emisi karbon, penyusunan program transisi emisi karbon, pajak karbon, hingga pengembangan produk keuangan hijau (*sustainable finance*). *Ketujuh*, perlunya terus mencermati dan mengantisipasi dalam merumuskan langkah kebijakan yang diperlukan di Indonesia terhadap berbagai agenda internasional yang mewarnai berbagai pembahasan dalam forum-forum kerja sama internasional, termasuk G20, IMF, FSB, dan BIS tersebut. Hal ini semakin penting dengan Ketetuaan Indonesia pada G20 pada tahun 2022 mendatang.

Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional: Proses Pemulihan Terus Berlangsung, Stabilitas Terjaga

Penyebaran varian delta Covid-19 yang mencapai puncaknya pada Juli 2021 menurun dengan gerak cepat Pemerintah dan dukungan masyarakat. Kita bersyukur Indonesia kembali selamat dari serangan varian delta Covid-19 yang mencapai puncaknya sekitar Juli-Agustus 2021, dengan langkah-langkah cepat dari Pemerintah untuk penanganan dan pencegahannya, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat di Jawa-Bali, percepatan program vaksinasi, serta penyiapan lebih banyak fasilitas perawatan baik di rumah-rumah sakit maupun prasarana lain. Alhamdulillah, dengan cepat kasus positif pandemi Covid-19 menurun menjadi rerata di bawah 500 per hari, dibandingkan dengan rerata 50.000 kasus per hari pada minggu ketiga Juli 2021 (Grafik 20). Tingkat penggunaan kamar perawatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain (*bed occupancy rate*) juga menurun drastis, dari sekitar 74% pada Juni 2021

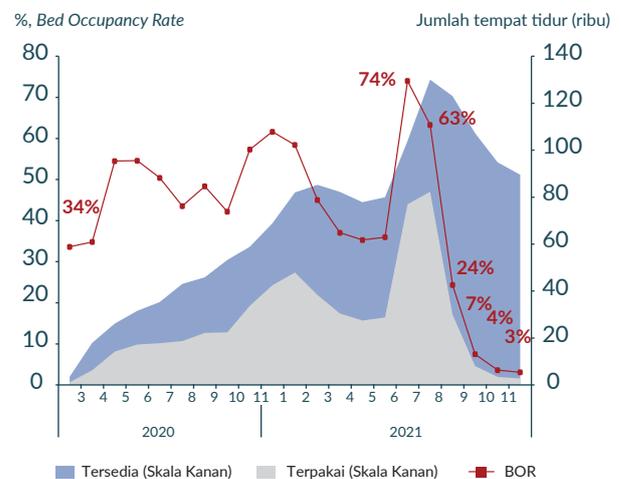
Grafik 20. Kasus Covid-19 di Indonesia



Data s.d. 16 November 2021
Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diolah

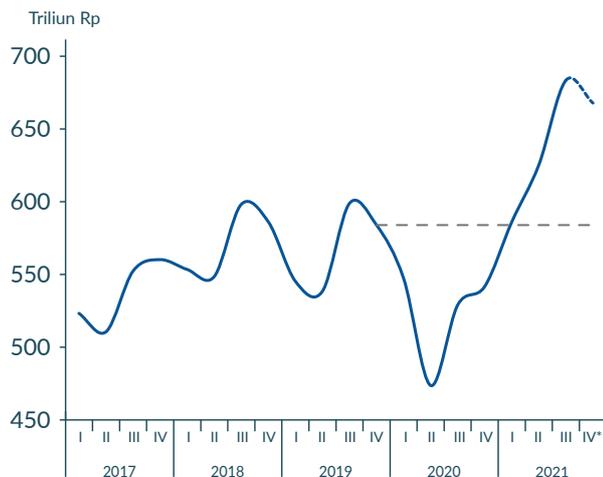
menjadi hanya 3% dewasa ini (Grafik 21). Program vaksinasi juga semakin cepat, dengan capaian sekitar 38% penduduk Jawa-Bali telah divaksin dan 22% di wilayah lain, dengan keseluruhan Indonesia secara rerata 31% penduduk telah divaksin. Sejalan dengan itu, Pemerintah merencanakan untuk secara bertahap akan mulai membuka sektor-sektor dan/ atau wilayah-wilayah dengan kasus berat rendah, angka pemanfaatan rumah sakit yang juga rendah, dan tingkat kematian yang rendah.

Grafik 21. Bed Occupancy Rate (BOR) Nasional



Data s.d. 16 November 2021
Sumber: Kementerian Kesehatan

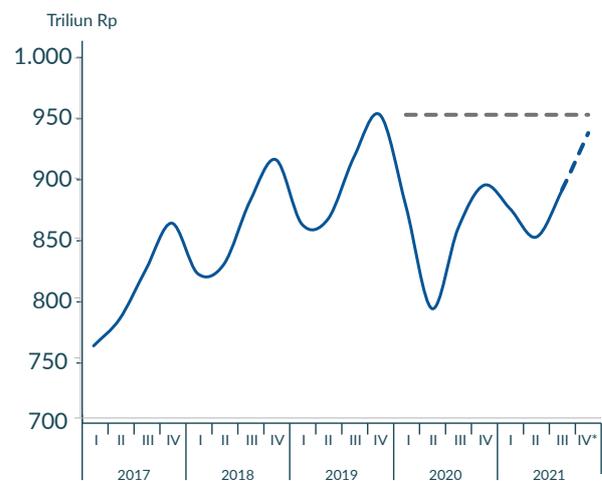
Grafik 22. Nilai Ekspor Indonesia



Sumber: BPS, *Proyeksi Bank Indonesia

Sejumlah indikator menunjukkan perbaikan ekonomi nasional kembali berlanjut setelah mengalami perlambatan sebagai dampak dari merebaknya varian delta pandemi Covid-19 pada bulan Juli dan Agustus 2021. Hal ini tercermin dari kenaikan indikator hingga awal November 2021 seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran, ekspektasi konsumen, PMI Manufaktur, serta realisasi ekspor dan impor. Kenaikan permintaan dan harga komoditas yang tinggi mendorong pemulihan ekspor yang berlangsung cepat (Grafik 22), tidak hanya terbatas pada komoditas sumber daya alam tetapi juga produk-produk hilirisasi yang

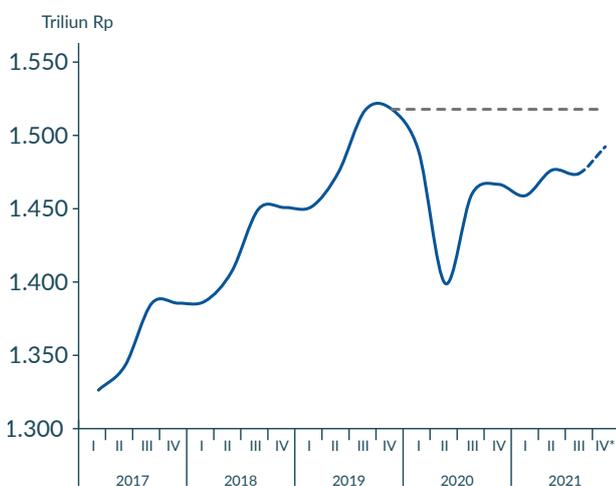
Grafik 24. Nilai Investasi Indonesia



Sumber: BPS, *Proyeksi Bank Indonesia

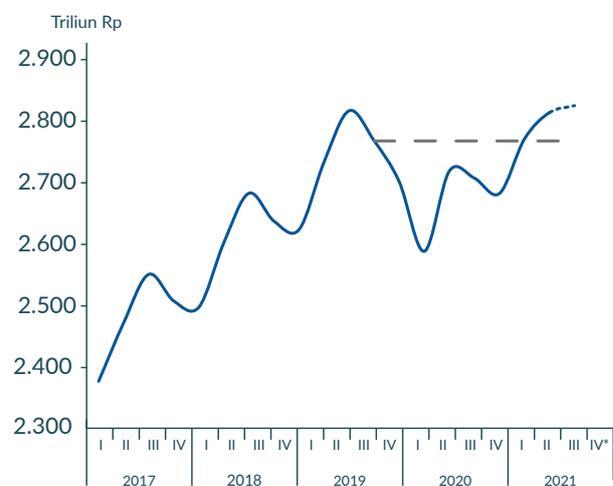
terus didorong Pemerintah. Akselerasi permintaan domestik juga didukung konsumsi rumah tangga terutama makanan (Grafik 23), sejalan dengan mulai pembukaan PPKM dan juga hasil ekspor khususnya di wilayah Timur Indonesia dan Sumatera, meskipun kenaikan konsumsi swasta sempat tertekan khususnya di wilayah Jawa dan Bali karena dampak PPKM sebagai langkah penanganan penyebaran varian delta Covid-19. Demikian pula, investasi, terutama nonbangunan, meningkat sejalan dengan perbaikan ekspor dan masuknya PMA yang didukung kemudahan investasi sesuai UU Cipta Kerja (Grafik 24). Secara keseluruhan, setelah terjadi penundaan

Grafik 23. Nilai Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: BPS, *Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 25. Nilai PDB Indonesia



Sumber: BPS, *Proyeksi Bank Indonesia

Tabel 2. PDB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen	2019*	2020**				2020	2021***		
		I	II	III	IV		I	II	III
PDB	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07	-0,71	7,07	3,51
Konsumsi Swasta	5,04	2,83	-5,52	-4,05	-3,61	-2,63	-2,21	5,96	1,03
Konsumsi Pemerintah	3,26	3,77	-6,90	9,76	1,76	1,94	2,58	8,03	0,66
Investasi	4,45	1,70	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95	-0,23	7,54	3,74
Inv. Bangunan	5,37	2,76	-5,26	-5,60	-6,63	-3,78	-0,74	4,36	3,36
Inv. Non-Bangunan	1,83	-1,46	-18,62	-8,99	-4,71	-8,38	1,39	18,58	4,89
Ekspor	-0,86	0,36	-12,02	-11,66	-7,21	-7,70	7,09	31,98	29,16
Impor	-7,39	-3,62	-18,29	-23,00	-13,52	-14,71	5,38	31,72	30,11

Sumber : BPS

Keterangan: *Angka sementara; ** Angka sangat sementara; *** Angka sangat sangat sementara

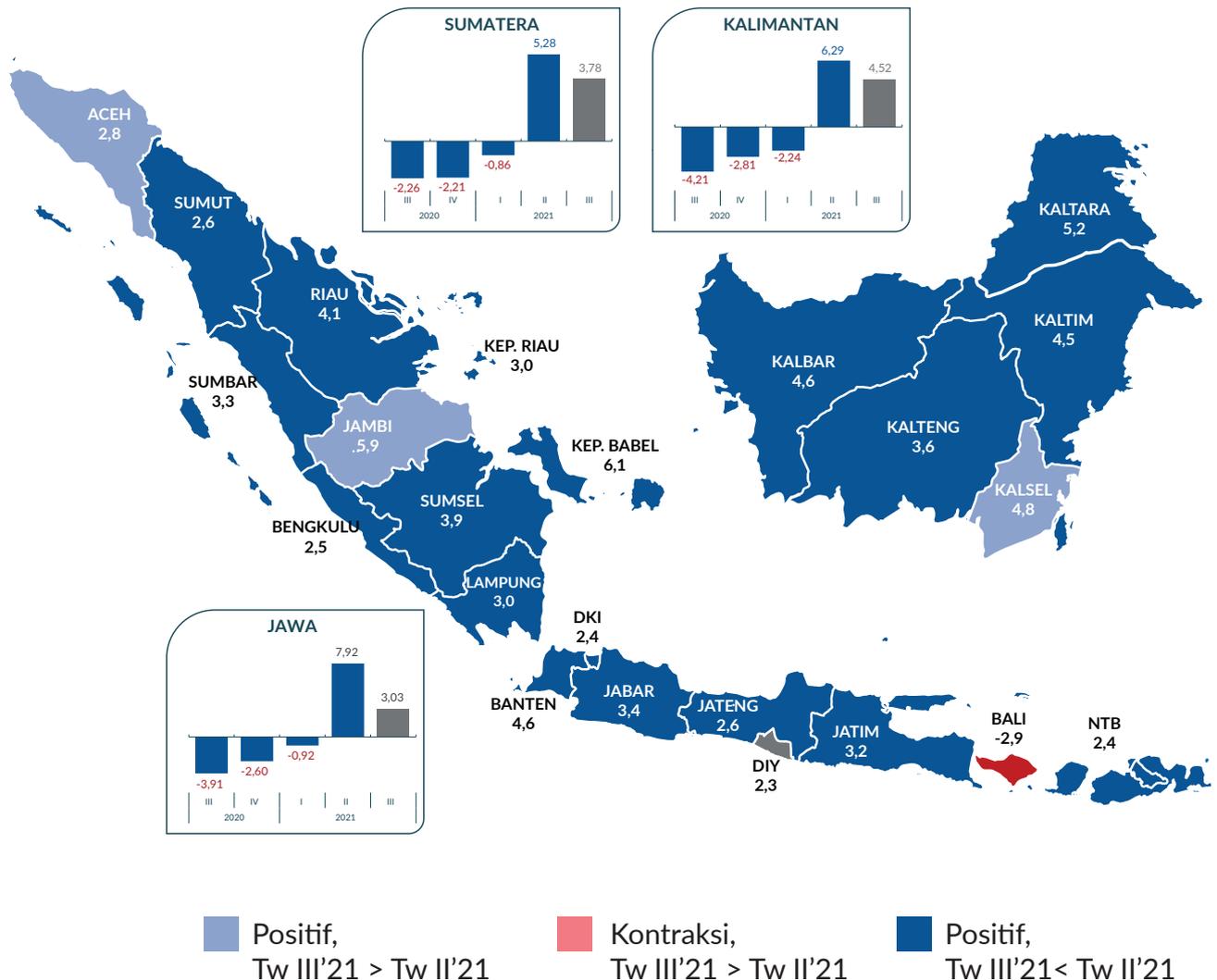
selama Juli-Agustus 2021, perekonomian Indonesia secara bertahap kembali ke level sebelum covid-19 (Grafik 25).

Pertumbuhan ekonomi nasional terus membaik sejak triwulan II 2021 dan akan meningkat tinggi pada tahun 2022. Pada triwulan III 2021, kinerja perekonomian tetap tumbuh positif, yaitu 3,51% dibandingkan kontraksi 3,49% pada triwulan yang sama tahun lalu (Tabel 2). Pertumbuhan ini lebih rendah dari 7,07% pada triwulan II 2021. Penyebaran varian delta Covid-19 dan PPKM ketat khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang harus ditempuh Pemerintah tidak dipungkiri berdampak pada ekonomi, terutama konsumsi swasta yang hanya tumbuh 1,03% pada triwulan III 2021. Demikian pula, pembatasan mobilitas juga berdampak pada kenaikan investasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 3,74% pada triwulan III 2021. Dukungan pertumbuhan dari kinerja ekspor yang tetap tinggi, yaitu 29,16% pada triwulan III 2021 sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat, tidak mampu mengompensasi penurunan pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja LU utama seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan tumbuh positif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan kembali semakin membaik pada triwulan IV 2021 dan seterusnya, didorong oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, kinerja ekspor yang tetap kuat, pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas, serta stimulus kebijakan yang terus berlanjut. Secara keseluruhan 2021 pertumbuhan ekonomi tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia yaitu 3,2-4,0%, dan pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7-5,5%.

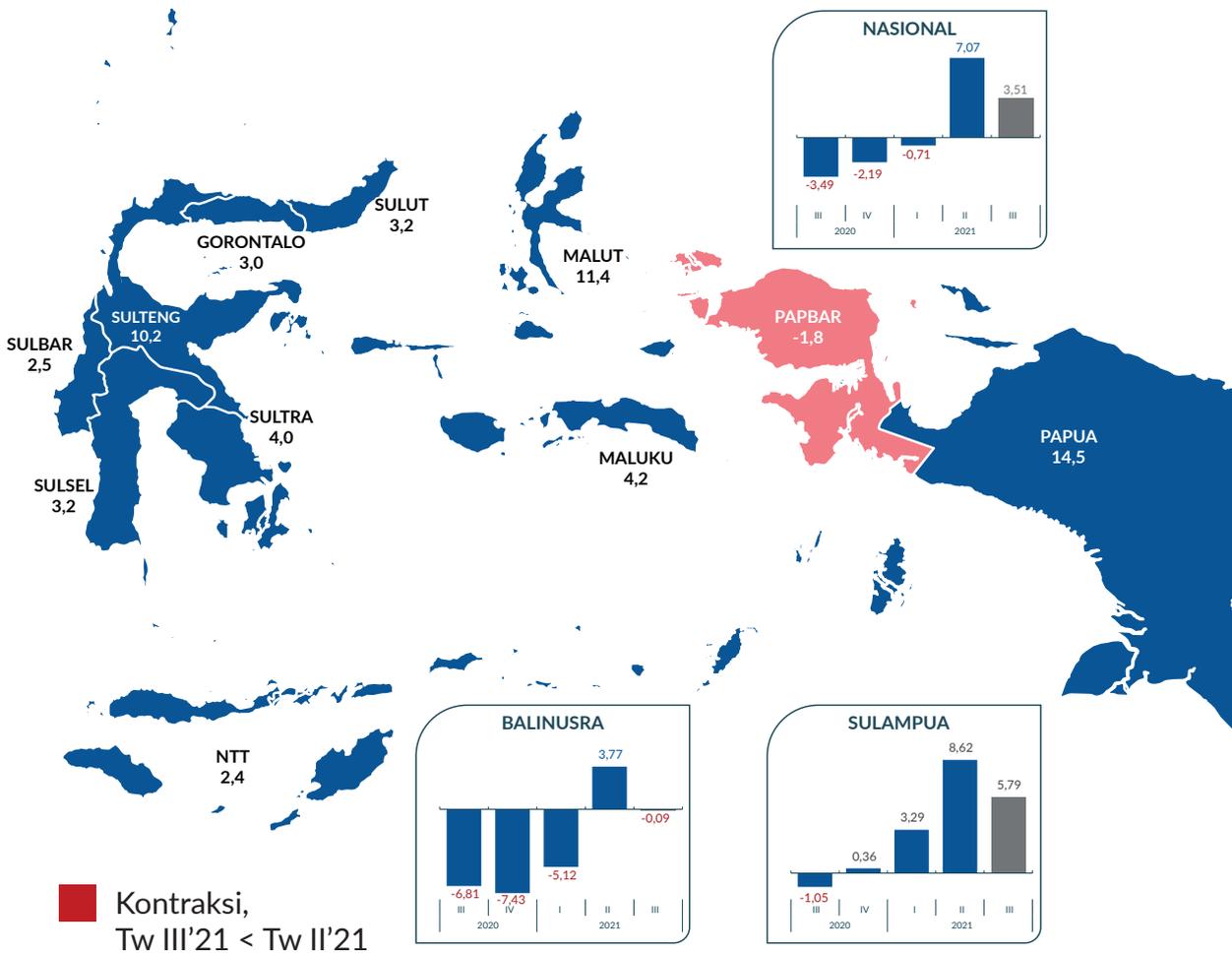
Secara spasial, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh pertumbuhan hampir seluruh wilayah. Perekonomian di hampir seluruh wilayah tetap tumbuh positif pada triwulan III 2021, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan dan Sumatera. Beberapa daerah, yakni Aceh, Jambi, dan Kalimantan Selatan, tumbuh meningkat dari triwulan sebelumnya, terutama ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan peningkatan kinerja LU Pertambangan, khususnya batu bara (Grafik 26). Pertumbuhan ekonomi Papua juga tercatat meningkat karena ditopang oleh berlanjutnya aktivitas investasi pembangunan

Grafik 26. Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan III 2021 (% , yoy)



tambang bawah tanah dan konstruksi akhir terkait lokasi PON XX. Dari sisi eksternal, perbaikan permintaan global dan kenaikan harga komoditas ekspor utama menopang perekonomian wilayah, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dari sisi LU, permintaan eksternal mendorong perbaikan kinerja LU utama daerah yang berorientasi ekspor. Sejalan dengan kinerja ekspor dan harga komoditas yang meningkat, kinerja LU Pertambangan tumbuh meningkat dan menopang perekonomian daerah yang merupakan basis produksi. Kinerja pertambangan batu bara di Sumatera dan Kalimantan masih solid didorong menguatnya permintaan

Tiongkok. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan yang berorientasi domestik melambat, terutama di Jawa, seiring pembatasan aktivitas produksi sektor esensial. Namun, permintaan eksternal yang masih cukup kuat menopang kinerja LU Industri Pengolahan, terutama pada industri *Crude Palm Oil* (CPO) di Sumatera dan industri logam dasar di Sulampua. Pembatasan mobilitas masyarakat turut menahan kinerja LU Perdagangan, terutama di Jawa dan Balinusra. Perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan berlanjut pada tahun 2021 dimana wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua akan tumbuh masing-



masing sebesar 3,1-3,9%; 2,7-3,5%; 2,8-3,6%; 0,2-1,0%, dan 5,8-6,6%.

Ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga didukung oleh perbaikan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Transaksi berjalan triwulan III 2021 mencatat surplus, ditopang oleh kinerja ekspor yang tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan global dan harga komoditas dunia (Tabel 3). Surplus transaksi modal dan finansial berlanjut didorong oleh aliran masuk modal asing baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio. Pada triwulan IV 2021, kinerja neraca

perdagangan tetap baik dengan surplus mencapai 5,7 miliar dolar AS pada Oktober 2021, tertinggi sepanjang sejarah pencatatan. Perkembangan ini didukung oleh kinerja ekspor komoditas utama, seperti batu bara, CPO, serta besi dan baja. Sementara itu, investasi portofolio pada triwulan IV 2021 (hingga 16 November 2021) mencatat *net inflows* sebesar 0,14 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2021 tercatat sebesar 145,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 8,5 bulan impor atau 8,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional

Tabel 3. Neraca Pembayaran Indonesia

Komponen (miliar USD)	2019	2020*				2020	2021**		
		I	II	III*	IV*		I*	II*	III**
Transaksi Berjalan	-30,3	-3,5	-2,9	1,0	0,8	-4,5	-1,1	-2,0	4,5
A. Barang	3,5	4,5	4,0	9,8	10,0	28,2	7,6	8,3	15,0
- Ekspor, fob	168,5	41,7	34,6	40,8	46,2	163,4	49,4	54,3	61,7
- Impor, fob	-164,9	-37,2	-30,7	-31,0	-36,2	-135,1	-41,7	-46,0	-46,7
a. Non-migas	12,0	5,8	3,3	9,4	11,3	29,9	10,0	11,6	18,1
b. Migas	-10,3	-2,6	-0,8	-0,7	-1,2	-5,4	-2,3	-3,1	-2,9
B. Jasa - jasa	-7,6	-1,7	-2,1	-2,8	-3,1	-9,7	-3,4	-3,7	-3,6
C. Pendapatan Primer	-33,8	-7,9	-6,2	-7,4	-7,4	-28,9	-6,7	-8,1	-8,3
D. Pendapatan Sekunder	7,6	1,7	1,4	1,4	1,4	5,9	1,4	1,5	1,4
Transaksi Modal dan Finansial	36,6	-3,0	11,0	0,9	1,0	7,9	5,7	1,6	6,1
1. Investasi Langsung	20,5	4,3	4,5	1,0	4,3	14,1	4,4	5,3	3,3
2. Investasi Portofolio	22,0	-6,3	9,7	-2,0	2,0	3,4	4,9	4,0	1,1
3. Investasi Lainnya	-6,1	-0,6	-3,4	1,9	-7,4	-9,6	-3,7	-7,7	1,5
Neraca Keseluruhan	4,7	-8,5	9,2	2,1	-0,2	2,6	4,1	-0,4	10,7
Memorandum:									
- Cadangan Devisa	129,2	121,0	131,7	135,2	135,9	135,9	137,1	137,1	146,9
Dalam bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah	7,3	7,0	8,1	9,1	9,8	9,8	9,7	8,8	8,6
Transaksi Berjalan (% PDB)	-2,7	-1,3	-1,2	0,4	0,3	-0,4	-0,4	-0,7	1,5

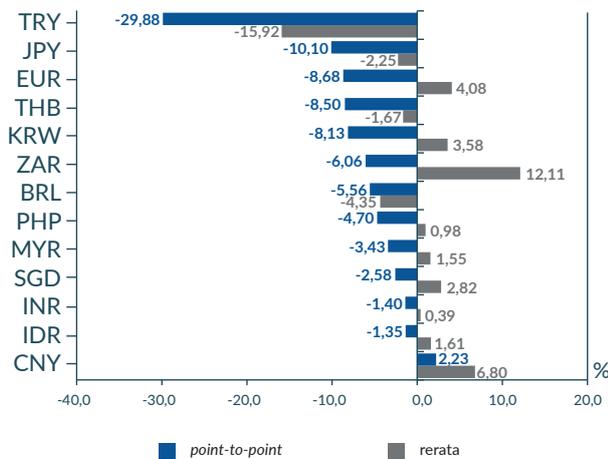
Keterangan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara
 Sumber: Bank Indonesia

sekitar 3 bulan impor. Ke depan, transaksi berjalan diperkirakan dalam kisaran surplus 0,3% sampai dengan defisit 0,5% dari PDB pada 2021, dan akan tetap rendah dalam kisaran defisit 1,1% sampai dengan 1,9% dari PDB pada 2022, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Nilai tukar Rupiah bergerak stabil dan berpotensi menguat, didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia khususnya kinerja ekspor dan eksternal, aliran masuk modal asing, dan langkah kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah pada 17 November 2021 melemah

0,53% secara *point to point* dan 0,56% secara rerata dibandingkan dengan level Oktober 2021. Pelemahan nilai tukar Rupiah disebabkan oleh aliran masuk modal asing yang terbatas di tengah persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik dan terjaganya pasokan valas domestik. Dengan perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 17 November 2021 mencatat depresiasi sebesar 1,35% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020, lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India, Malaysia, Filipina, dan Thailand (Grafik 27a). Stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh persepsi risiko

Grafik 27a. Nilai Tukar Rupiah vs Beberapa Negara

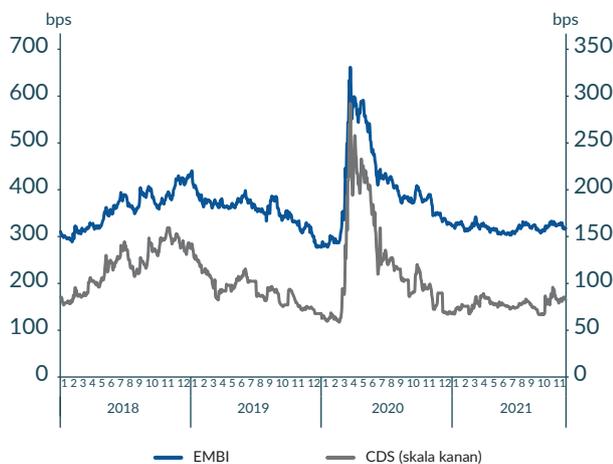


Data s.d. 17 November 2021
Sumber: Reuters dan Bloomberg

investor global atas investasi portofolio di Indonesia, seperti tercermin pada perkembangan *Credit Default Swap* (CDS), yang relatif stabil (Grafik 27b). Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

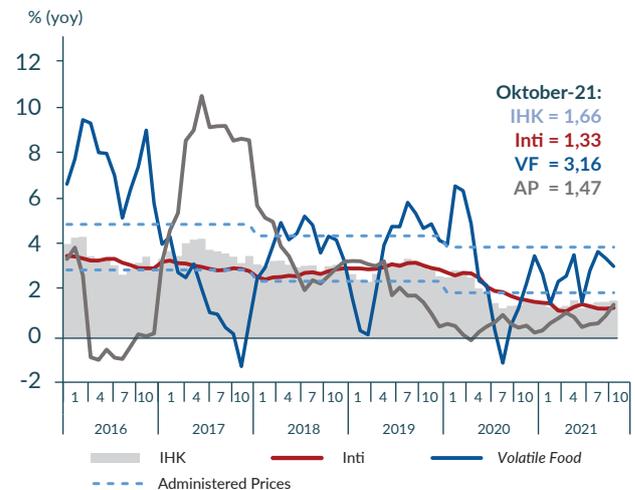
Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2021 tercatat inflasi 0,12% (mtm) sehingga inflasi IHK sampai Oktober 2021 mencapai 0,93% (ytd). Secara tahunan, inflasi IHK tercatat 1,66% (yoy),

Grafik 27b. Persepsi Risiko EMs dan CDS Indonesia



Data s.d. 16 November 2021
Sumber: Bloomberg

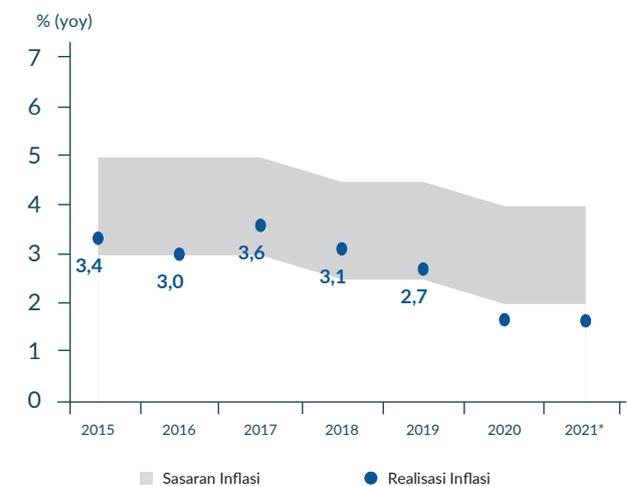
Grafik 28. Inflasi: Inti, Volatile Food, dan Administered Prices



Sumber: BPS

sedikit meningkat dari inflasi September 2021 sebesar 1,60% (yoy) (Grafik 28). Inflasi inti tetap rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, didukung oleh pasokan yang terkendali, nilai tukar yang stabil, dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Inflasi kelompok *volatile food* melambat didukung pasokan barang yang memadai. Inflasi kelompok *administered prices* sedikit meningkat sejalan masih berlanjutnya dampak kenaikan cukai tembakau. Dengan perkembangan tersebut, inflasi diperkirakan berada di bawah batas bawah kisaran sasarannya 3,0±1% pada 2021 dan terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada 2022 (Grafik 29). Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat

Grafik 29. Realisasi dan Sasaran Inflasi Nasional



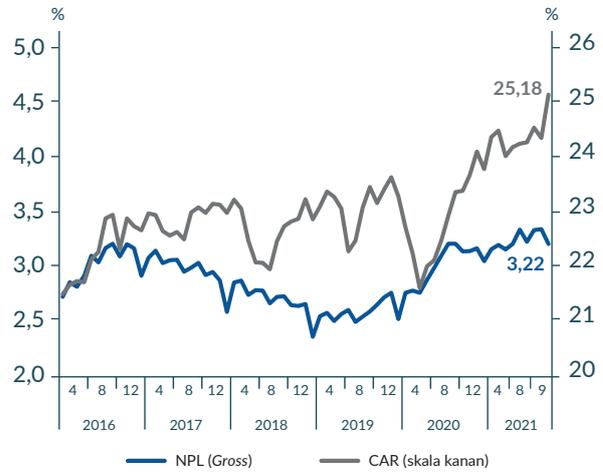
*Data s.d. Oktober 2021
Sumber: BPS

koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya

Kondisi likuiditas sangat longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah kembali menambah likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan sebesar Rp137,24 triliun hingga 16 November pada tahun 2021. Dengan perkembangan tersebut, sejak tahun 2020 kebijakan *quantitative easing* telah mencapai Rp863,8 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB, salah satu injeksi likuiditas yang terbesar di negara berkembang. Dengan ekspansi moneter tersebut, kondisi likuiditas perbankan pada Oktober 2021 sangat longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 34,05%. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat 9,44% (yoy). Likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 14,6% (yoy) dan 10,4% (yoy). Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh peningkatan ekspansi fiskal dan kredit perbankan.

Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang sangat longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB *overnight* dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 52 bps dan 151 bps sejak Oktober 2020 menjadi 2,80% dan 3,17% pada Oktober 2021. Di pasar kredit, penurunan SBDK perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan suku bunga kredit baru. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong perbaikan persepsi risiko perbankan, sehingga berdampak positif bagi penurunan suku bunga kredit baru. Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk melanjutkan penurunan suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kredit kepada dunia usaha.

Grafik 30. Permodalan dan NPL Perbankan



Sumber: OJK

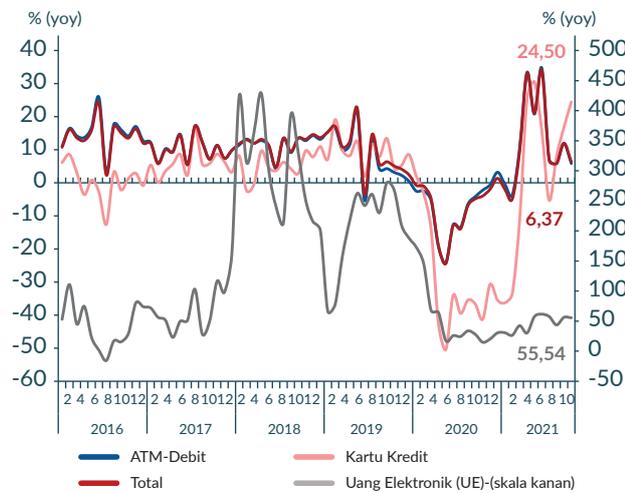
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan fungsi intermediasi perbankan mengalami perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) perbankan September 2021 tetap tinggi sebesar 25,18%, dan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga, yakni 3,22% (bruto) dan 1,04% (neto) (Grafik 30). Intermediasi perbankan melanjutkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,24% (yoy) pada Oktober 2021, yang didorong baik oleh permintaan dan penawaran (Grafik 31). Permintaan kredit membaik sejalan dengan meningkatnya aktivitas dunia usaha dan konsumsi sejalan dengan melonggarnya aktivitas

Grafik 31. Pertumbuhan Kredit dan DPK Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 32. Pertumbuhan ATM, KK, dan UE

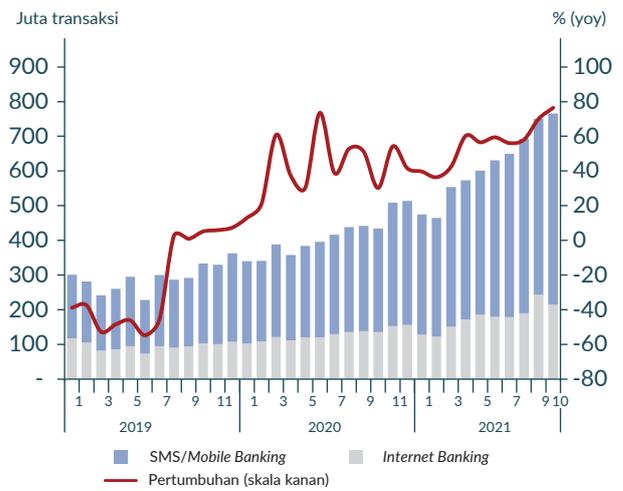


Sumber: Bank Indonesia

masyarakat. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit oleh perbankan melonggar seiring dengan menurunnya persepsi risiko. Seluruh kelompok penggunaan kredit telah tumbuh positif, terutama Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja. Di sektor konsumsi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terus mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,87% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM meningkat menjadi sebesar 3,04% (yoy). Hal ini menunjukkan berlanjutnya perbaikan di sektor riil dan dunia usaha, khususnya UMKM. Bank Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif serta sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lainnya di sektor keuangan untuk mendorong peningkatan kredit perbankan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit dan DPK pada 2021 diperkirakan masing-masing sekitar 4,0-6,0% dan 8,0-10,0%, serta meningkat menjadi sekitar 6,0-8,0% dan 7,0-9,0% pada 2022.

Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Berbagai program digitalisasi sistem pembayaran, seperti perluasan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dan reformasi regulasi, serta rencana implementasi Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST), terus diakselerasi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh pesat seiring meningkatnya akseptasi

Grafik 33. Pertumbuhan Digital Banking



Sumber: Bank Indonesia

dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking*. Pada Oktober 2021, nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 55,54% (yoy) mencapai Rp29,23 triliun dan nilai transaksi *digital banking* meningkat 63,31% (yoy) menjadi Rp3.910,25 triliun (Grafik 32 dan 33). Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit tercatat Rp664,26 triliun, tumbuh 6,37% (yoy). Hal ini diperkuat dengan perluasan ekosistem QRIS yang telah melampaui target tahun 2021 dan mencapai lebih dari 12 juta *merchant* di pertengahan November 2021. Pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga, asosiasi/ organisasi dan industri, serta seluruh elemen masyarakat. Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Oktober 2021 meningkat 5,9% (yoy) mencapai Rp854,3 triliun. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang di seluruh wilayah Indonesia, serta melakukan digitalisasi pengelolaan uang Rupiah dan edukasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah.

Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 dengan stabilitas yang tetap terjaga. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai sekitar 4,7-5,5%, meningkat lebih tinggi dari

perkiraan pertumbuhan sekitar 3,2-4,0% pada tahun 2021. Dengan asumsi tidak terjadi penyebaran gelombang ketiga pandemi Covid-19, tercapainya imunitas massal, dan berangsurnya pulihnya mobilitas masyarakat, konsumsi swasta diperkirakan akan kembali pulih dan mencapai pertumbuhan sekitar 5% pada semester II 2022. Kinerja ekspor juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari tahun 2021 karena faktor perhitungan statistik. Kenaikan permintaan domestik, kinerja ekspor, kenaikan PMA dari implementasi UU Cipta Kerja, serta kembali dilanjutkannya proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang tertunda akan mendorong kenaikan pertumbuhan investasi yang tinggi. Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi akan didukung sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Sementara itu, inflasi diperkirakan masih dapat terkendali dalam kisaran sasaran yaitu $3\pm 1\%$ dengan kapasitas produksi nasional yang masih memadai dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat hingga akhir 2022, meskipun dampak kenaikan harga energi global perlu tetap perlu diwaspadai. Stabilitas eksternal juga diperkirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang berada pada kisaran 1,1-1,9% dari PDB, dengan surplus neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan lebih besar terutama dari arus modal asing khususnya dalam bentuk PMA sejalan dengan implementasi UU Cipta Kerja. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang lebih baik tersebut akan menjadi faktor positif untuk stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah kemungkinan kenaikan ketidakpastian pasar keuangan global karena normalisasi kebijakan moneter dari the Fed dan sejumlah negara maju lainnya. Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan dan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tetap mendukung upaya bersama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut.

Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga dengan pertumbuhan kredit yang meningkat pada 2022.

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) perbankan tetap tinggi dan rasio kredit bermasalah (*NPL*) tetap terjaga, termasuk dengan tetap berlakunya pengaturan restrukturisasi kredit dari OJK. Intermediasi perbankan akan semakin membaik, dengan pertumbuhan kredit dan DPK diperkirakan mencapai 6,0-8,0% dan 7,0-9,0% pada 2022 dibandingkan dengan kisaran 4,0-6,0% dan 8,0-10,0% pada tahun 2021 sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Permintaan kredit diperkirakan akan semakin membaik, dengan peningkatan pertumbuhan konsumsi, investasi, maupun ekspor, sejalan dengan berangsur pulihnya aktivitas ekonomi dari pandemi Covid-19. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didukung oleh tetap longgarnya likuiditas dan menurunnya persepsi risiko, di samping kebijakan makroprudensial yang akan tetap akomodatif. Sangat tingginya rasio AL/DPK tidak akan berpengaruh pada kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit maupun pembelian SBN yang diterbitkan Pemerintah, meskipun kemungkinan Bank Indonesia akan mengurangi secara bertahap likuiditas (*tapering*) sebagai bagian dari normalisasi stimulus moneter.

Ekonomi keuangan digital nasional akan terus meningkat pesat pada tahun 2022 didukung oleh akselerasi digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Transaksi *e-commerce* pada 2022 diproyeksikan akan terus meningkat didukung perluasan ekosistem *e-commerce*, terus berlanjutnya pergeseran preferensi perilaku masyarakat untuk berbelanja *online*, maupun berbagai inovasi dan promosi oleh para perusahaan dan program-program Pemerintah dan Bank Indonesia. Kenaikan pesat transaksi UE diperkirakan juga terus berlanjut didorong oleh perluasan penggunaan UE pada *e-commerce* dan pada berbagai platform *online* lainnya. Namun, pertumbuhan relatif melambat seiring dengan kemudahan dan efisiensi metode pembayaran digital lainnya, serta mulai terbatasnya promo kepada konsumen. Demikian pula, transaksi *digital banking* pada 2022 diproyeksikan akan terus menguat didukung oleh kenyamanan konsumen bertransaksi secara digital dan berbagai inovasi digital oleh perbankan. Berbagai inisiatif Bank

Indonesia untuk digitalisasi sistem pembayaran akan terus diakselerasi untuk menciptakan transaksi sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal untuk semakin mendorong peningkatan ekonomi-keuangan digital nasional.

Berdasarkan pengalaman pada tahun 2021, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia. *Pertama*, sinergi untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor prioritas perlu terus diperkuat untuk semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut perlu diarahkan kepada sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor ekspor maupun untuk memenuhi kenaikan permintaan domestik termasuk UMKM. Sinergi juga perlu diperluas untuk sektor yang mengalami dampak luka memar pada dunia usaha akibat pandemi Covid-19 dan mempunyai risiko stabilitas sistem keuangan relatif tinggi, khususnya sektor pariwisata. *Kedua*, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah bank sentral lain, sinergi untuk penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional perlu diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas di satu sisi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan untuk mempercepat reformasi struktural di sektor riil, khususnya kelanjutan proyek-proyek infrastruktur dan implementasi UU Cipta Kerja, keberlanjutan stimulus fiskal dan pendanaan APBN dari Bank Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional, serta sinergi KSSK untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha. *Ketiga*, inovasi perlu diperkuat, baik dalam sinergi kebijakan ekonomi nasional dimaksud, maupun dalam akselerasi digitalisasi dan inklusi ekonomi dan keuangan nasional melalui digitalisasi sistem pembayaran serta program-program pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Lebih dari itu, inovasi kebijakan dan program juga diperlukan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan hijau, baik untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional maupun untuk menyikapi semakin tingginya tuntutan dari negara-negara maju.

Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2021: Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Menjaga Stabilitas

Sinergi kebijakan nasional yang semakin erat dalam mengatasi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 terus diperkuat pada tahun 2021 untuk tetap menjaga stabilitas dan terus mendorong perbaikan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, sebagaimana telah kami sampaikan pada PTBI tahun 2020, terdapat satu kondisi prasyarat (*necessary condition*), yaitu vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19, serta 5 (lima) kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan (*sufficient conditions*), yaitu: (i) pembukaan sektor produktif dan aman, (ii) percepatan realisasi stimulus fiskal, (iii) peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM. Pelaksanaan vaksinasi sebagai *necessary condition* terus dilakukan pada 2021 dengan akselerasi vaksinasi seiring dengan pasokan dan distribusi vaksin global yang semakin baik khususnya sejak merebaknya varian delta Covid-19. Pembukaan sektor produktif dan aman terus diupayakan di tengah upaya keras mengatasi pandemi Covid-19, terutama sektor properti dan otomotif, disertai dengan koordinasi erat KSSK untuk mendorong pembiayaan ke dunia usaha. Sementara itu, sinergi **digitalisasi sistem pembayaran dengan Gernas BBI dan BWI antara Bank Indonesia, Pemerintah, industri perbankan, perusahaan jasa pembayaran, fintech, dan e-commerce sangat erat untuk akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.**

Kuatnya sinergi kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah, KSSK, dan Bank Indonesia dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Pada tahun 2021, Pemerintah melanjutkan stimulus fiskal yang cukup besar untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 baik terhadap kesehatan maupun perekonomian. Defisit fiskal pada 2021 diperkirakan mencapai Rp961,49

triliun atau 5,82% PDB. Termasuk di dalamnya, anggaran penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp744,77 triliun antara lain untuk anggaran kesehatan sebesar Rp214,96 triliun dan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp186,64 triliun. Untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan kepada dunia usaha, koordinasi erat KSSK ditempuh untuk perbaikan sektor properti dan otomotif melalui insentif fiskal oleh Pemerintah dan pelonggaran kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia. Sementara itu, OJK terus memberikan relaksasi bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit dengan penundaan angsuran pokok dan bunga sehingga tidak berdampak pada kenaikan kredit bermasalah dan penurunan permodalan dengan memperpanjang POJK NO. 48 Tahun 2021 hingga berlaku sampai Maret 2023. Demikian pula, LPS memastikan terjaminnya simpanan masyarakat pada perbankan sehingga mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat bunga penjaminan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Koordinasi fiskal dan moneter semakin diperkuat, tidak saja dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, tetapi juga melalui partisipasi Bank Indonesia dalam pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana sebagai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020. Pada tahun 2020, Bank Indonesia telah mendukung pembiayaan APBN sebesar Rp473,2 triliun, terdiri dari pembelian SBN melalui mekanisme lelang di pasar perdana (Keputusan Bersama, KB I) sebesar Rp75,86 triliun dan pembelian SBN secara langsung sebagai mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) APBN (Keputusan Bersama, KB II) sebesar Rp397,56 triliun. Sepanjang tahun 2021 ini Bank Indonesia kembali mendukung pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana berdasarkan KB I sebesar Rp143,32 triliun, yang terdiri dari Rp67,87 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme *Greenshoe Option* (GSO). Lebih dari itu, dalam mengatasi meningkatnya kebutuhan APBN untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan akibat

merebak dengan cepatnya varian delta pandemi Covid-19, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan pembelian SBN secara langsung dari Pemerintah sesuai Keputusan Bersama III (KB III). Yaitu, jumlahnya sebesar Rp215 triliun untuk APBN tahun 2021 dan sebesar Rp224 triliun untuk APBN tahun 2022, dengan suku bunga rendah sebesar Bank Indonesia *Reverse Repo Rate* tenor 3 bulan. Selain suku bunga rendah, Bank Indonesia juga mengembalikan sebagian penerimaan kupon yang diterima dari pembelian SBN tersebut, yaitu dari SBN senilai Rp58 triliun untuk APBN 2021 dan Rp40 triliun untuk APBN 2022, sehingga tidak ada beban bunga dalam APBN bagi Pemerintah. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pendanaan APBN baik dalam pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi Covid-19 maupun dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, tentunya implementasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK. Pokok-pokok bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia meliputi:

- i. **Di bidang moneter, kebijakan suku bunga rendah, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan injeksi likuiditas (*quantitative easing*) terus dilakukan.** Kebijakan suku bunga rendah tetap dipertahankan sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan BI7DRR sebanyak 6 (enam) kali sejak 2020 menjadi 3,50%, terendah sepanjang sejarah. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan melalui *triple intervention*, di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih ada. Demikian juga, injeksi likuiditas (*quantitative easing*) dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan perbankan dalam meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia

usaha. Sejak tahun 2020 sampai dengan 16 November 2021, kebijakan *quantitative easing* telah mencapai Rp863,8 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB, melalui injeksi likuiditas ke perbankan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, yang nanti akan kami jelaskan secara lebih detail.

- ii. **Pelonggaran kebijakan makroprudensial terus dilanjutkan untuk mendorong peningkatan pembiayaan perbankan bagi dunia usaha,** yang disinergikan dengan kebijakan KSSK. Antara lain dengan melonggarkan ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Rasio LTV/FTV Kredit Properti, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah), mendorong penurunan Suku Bunga Dasar Kredit perbankan, dan kebijakan makroprudensial akomodatif yang lain. Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan kebijakan Rasio Kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
- iii. **Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi keuangan digital nasional** terus dilakukan termasuk melalui perluasan akseptasi QRIS 12 juta *merchant* pada akhir 2021, termasuk *cross-border* QRIS, implementasi Standar Nasional *Open API* (SNAP), melanjutkan elektronifikasi bantuan sosial, moda transportasi, dan operasi keuangan pemerintah. Percepatan berbagai agenda dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 juga dilakukan, antara lain dengan pengembangan BI-FAST yang bersifat *real time* dan 24/7, interlink *digital banking* dan *fintech*, dan reformasi regulasi sistem pembayaran.
- iv. Selain tiga kebijakan utama di atas, Bank Indonesia juga mengarahkan seluruh 4 (empat) kebijakan pendukung untuk pemulihan ekonomi nasional. Sinergi erat dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya ditingkatkan untuk **mengembangkan UMKM serta Ekonomi dan Keuangan Syariah** sebagai sumber baru

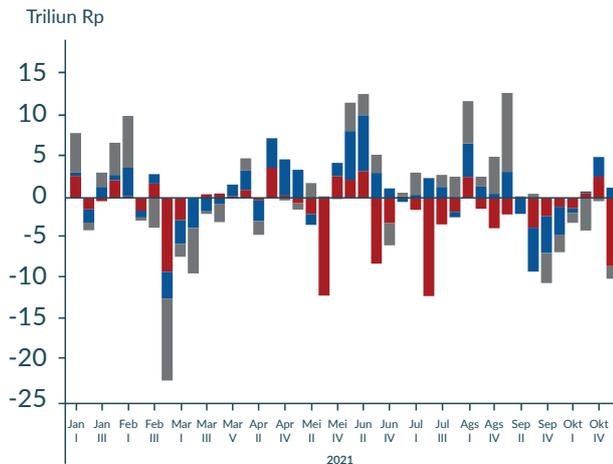
pertumbuhan ekonomi Indonesia. **Pendalaman pasar keuangan** juga dipercepat, khususnya pasar uang Rupiah dan valas, untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur. **Kebijakan internasional** diarahkan tidak saja untuk memperkuat diplomasi kebijakan Bank Indonesia, tetapi juga mendukung Pemerintah dalam fasilitasi dan promosi perdagangan dan investasi di berbagai negara.

- v. Disamping itu, **guna mendukung kebijakan Pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19**, Bank Indonesia juga melakukan **penyesuaian kegiatan operasional dan layanan publik** seperti layanan kas, sistem pembayaran, transaksi operasi moneter, dan layanan kebanksentralan kepada Pemerintah. Bank Indonesia juga **menaikkan sementara batas maksimal nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM yang menggunakan teknologi *chip*** sampai dengan 30 September 2021.

Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah menguat signifikan sehingga kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui *triple intervention*, baik di pasar spot, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder didukung juga dengan komunikasi intensif kepada para investor dan pelaku pasar domestik dan luar negeri. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, Rupiah menguat yang pada 15 April 2021 mencapai Rp14.610 terus menunjukkan trend penguatan menjadi Rp14.243 pada 17 November 2021. Keyakinan dan persepsi investor yang terjaga mendorong masuknya aliran portofolio asing ke Indonesia. Sejak April 2021 hingga Oktober 2021, aliran masuk modal asing ke pasar SBN tercatat sebesar Rp6,7 triliun Rupiah (Grafik 34). Cadangan devisa juga meningkat mencapai 145,5 miliar dolar

Grafik 34. Aliran Investasi Asing ke SBN



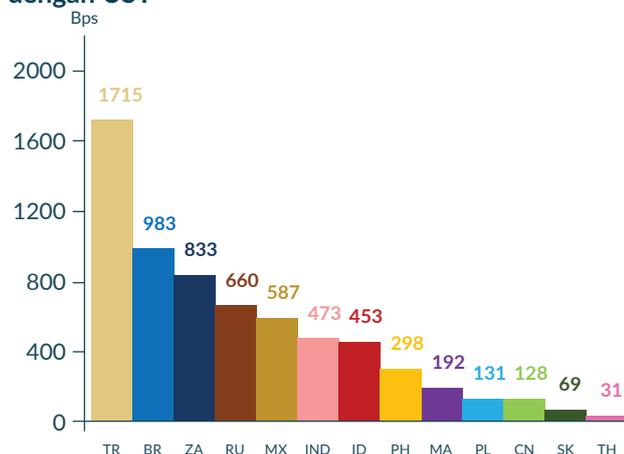
Sumber: Bank Indonesia

AS pada Oktober 2021, lebih tinggi dibandingkan posisi pada akhir tahun 2020 sebesar 135,9 miliar dolar AS. Ke depan, nilai tukar Rupiah akan relatif stabil didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang rendah, imbal hasil aset keuangan domestik yang terjaga, dan premi risiko yang stabil (Grafik 35).

Stimulus Kebijakan Moneter

Suku bunga kebijakan moneter rendah dan pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia mendorong terus turunnya penurunan suku bunga perbankan dan

Grafik 35. Yield Spread Surat Utang Pemerintah dengan UST

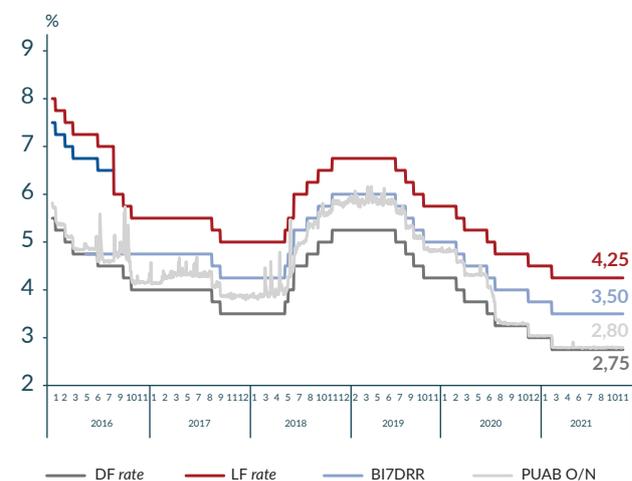


Sumber: Bloomberg, diolah

terjaganya stabilitas pasar keuangan. Seperti yang kami kemukakan di atas, sejak tahun 2020 Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan moneter sebanyak 6 (enam) kali sehingga suku bunga BI7DRR menjadi 3,50%. Penurunan suku bunga BI7DRR dan pelonggaran likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia diikuti oleh penurunan tingkat bunga di berbagai pasar. Di pasar uang dan pasar dana, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, suku bunga PUAB *overnight* dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 52 bps dan 151 bps sejak Oktober 2020 menjadi 2,80% dan 3,17% pada Oktober 2021 (Grafik 36). Demikian pula imbal hasil SBN tenor 10 tahun juga turun sebesar 228 bps dari tertinggi 8,31% pada akhir Maret 2020 menjadi 6,02% pada 17 November 2021. Di pasar kredit, penurunan SBDK perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan suku bunga kredit baru (Grafik 37).

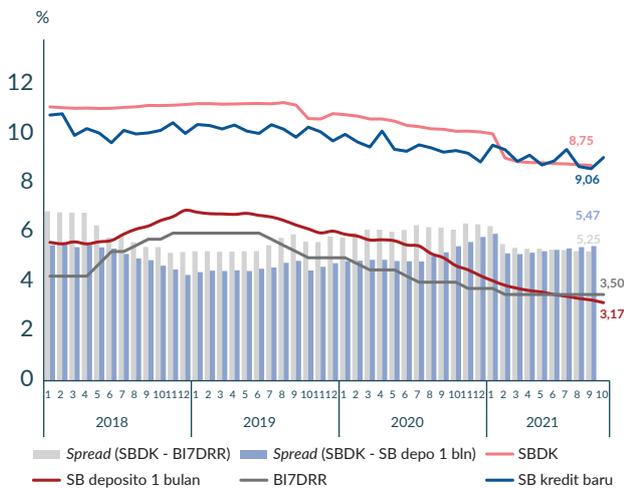
Bank Indonesia juga terus melanjutkan stimulus moneter dalam bentuk kebijakan *Quantitative Easing (QE)* ke perbankan dalam jumlah yang besar guna mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hingga 16 November 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan sebesar Rp137,2 triliun. Dengan perkembangan tersebut, sejak tahun 2020 kebijakan *quantitative easing* telah mencapai Rp863,8 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB,

Grafik 36. Suku Bunga PUAB O/N



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 37. Transmisi SBDK



Sumber: OJK, Bank Indonesia, diolah

salah satu injeksi likuiditas yang terbesar di negara berkembang. Meskipun sangat besarnya likuiditas perbankan tersebut belum mampu sepenuhnya mendorong penyaluran kredit perbankan karena masih lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha, sangat longgarnya likuiditas berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selain injeksi likuiditas kepada perbankan, seperti dikemukakan di atas Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp143,32 triliun yang terdiri dari Rp67,87 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme *Greenshoe Option* (GSO). Pembelian SBN untuk pendanaan APBN ini juga menambah likuiditas di dalam perekonomian sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah.

Pelonggaran Kebijakan Makroprudensial

Stance kebijakan makroprudensial tetap akomodatif dan tersinergi dengan kebijakan KSSK untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai penguatan pelonggaran kebijakan makroprudensial telah kami tempuh. *Pertama*, pelonggaran LTV untuk

kredit properti dan uang muka KKB menjadi 0% berlaku efektif 1 Maret 2021. Kebijakan ini kami tempuh dengan bersinergi dengan Pemerintah dan OJK yang telah menerbitkan paket kebijakan untuk mendorong kinerja sektor properti dan otomotif – sebagai sektor yang memiliki keterkaitan yang cukup tinggi (*backward* dan *forward linkage*) terhadap sektor ekonomi yang lain. *Kedua*, publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit perbankan sejak Februari 2021 untuk memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. *Ketiga*, reaktivasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) secara bertahap dengan menaikkan batas bawah RIM menjadi 75% pada Mei 2021, 80% pada September 2021, dan 84% pada Januari 2022. Penguatan juga dilakukan dengan memasukkan wesel ekspor milik bank ke dalam perhitungan RIM. Berbagai kebijakan tersebut kami sinergikan dengan upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan melalui besaran *Countercyclical Buffer* (CCyB) yang tetap 0% dan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% yang seluruhnya dapat direpokan kepada Bank Indonesia.

Kami juga telah menyempurnakan kebijakan Rasio Kredit UMKM menjadi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Penyempurnaan kebijakan untuk mendorong inklusivitas tersebut kami tempuh dengan memperluas target pembiayaan tidak hanya bagi UMKM namun juga bagi korporasi UMKM dan PBR (Perorangan Berpenghasilan Rendah). Selain itu, kami juga memberikan keleluasaan, agar perbankan dapat berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM dan PBR sesuai dengan keahlian dan model bisnisnya melalui perluasan opsi-opsi mekanisme pembiayaan UMKM dan PBR. Dalam hal ini, perbankan dapat berkontribusi dalam melakukan pembiayaan inklusif secara lebih optimal melalui 3 (tiga) skema modalitas, yaitu (1) pembiayaan inklusif secara langsung dan rantai pasok, (2) pembiayaan melalui Lembaga Keuangan dan Badan Layanan, termasuk BPR/ BPRS, *Fintech*, PNM, dan SMF, dan (3) pembiayaan melalui pembelian surat berharga yang terkait

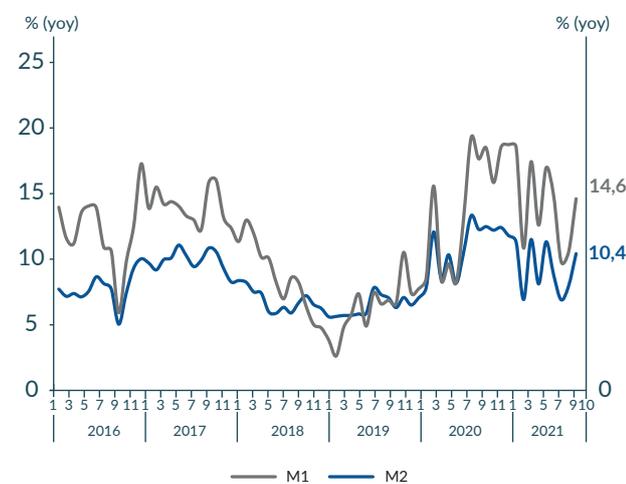
dengan pembiayaan inklusif, seperti SBN Inklusif, MTN Inklusif, dan EBA Inklusif. Ke depan, perluasan skema pembiayaan inklusif secara tidak langsung ini diharapkan dapat memunculkan inovasi di perbankan serta pendalaman pasar keuangan. Implementasi RPIM akan dilakukan secara bertahap, sehingga target porsi UMKM dan inklusi lainnya pada kredit perbankan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat tercapai pada akhir bulan Juni 2024.

Suku bunga kebijakan yang dipertahankan rendah serta pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia mampu mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Kondisi likuiditas perbankan pada Oktober 2021 sangat longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 34,05%. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat 9,44% (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat. Intermediasi perbankan mulai mencatatkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,24% (yoy) pada Oktober 2021. Perbaikan kinerja kredit ini didukung oleh permintaan kredit yang meningkat, terutama dari dunia usaha dan konsumsi sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan melonggarnya penawaran kredit perbankan seiring dengan menurunnya standar penyaluran kredit

akibat menurunnya persepsi risiko dan longgarnya likuiditas serta menurunnya suku bunga kredit baru. Dari sisi besaran moneter, likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 14,6% (yoy) dan 10,4% (yoy) (Grafik 38). Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh kredit perbankan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.

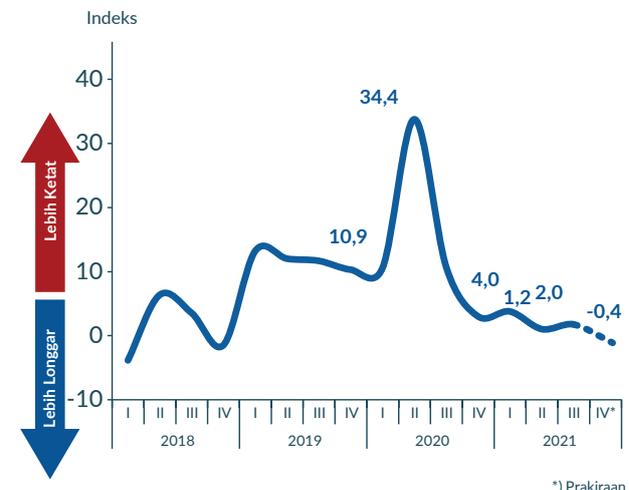
Mulai pulihnya intermediasi perbankan didorong oleh perbaikan baik sisi permintaan maupun sisi penawaran kredit. Permintaan kredit membaik, terutama dari dunia usaha dan konsumsi sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit oleh perbankan melonggar seiring dengan menurunnya persepsi risiko, di samping sangat longgarnya likuiditas dan penurunan suku bunga kredit baru (Grafik 39). Seluruh kelompok penggunaan kredit telah tumbuh positif, terutama Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja. Kenaikan kredit yang lebih tinggi tercatat pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu sebesar 8,87% pada Oktober 2021 sejalan dengan kebijakan terpadu KSSK untuk mendorong sektor properti. Demikian pula, pertumbuhan kredit UMKM meningkat menjadi sebesar 3,04% (yoy), menunjukkan perbaikan lebih lanjut dunia

Grafik 38. Uang Beredar



Sumber: Bank Indonesia

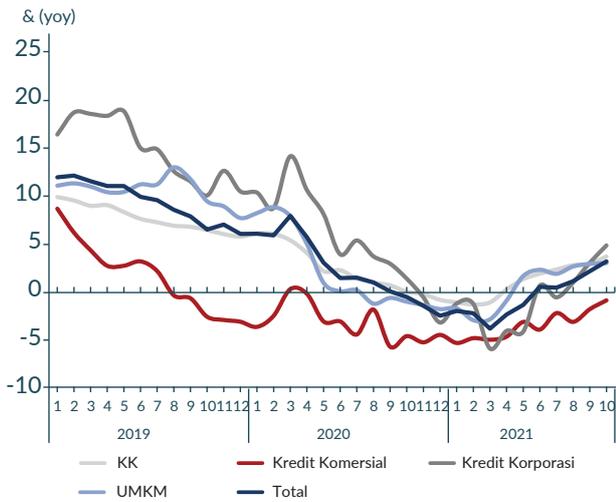
Grafik 39. Indeks Lending Standard



*) Prakiraan

Sumber: Survey Perbankan Bank Indonesia Tw III 2021

Grafik 40. Pertumbuhan Kredit per Segmen



Sumber: Bank Indonesia

usaha pada sektor UMKM (Grafik 40). Ke depan, sejalan dengan semakin pulihnya ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, percepatan realisasi APBN dan APBD oleh Pemerintah, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar termasuk likuiditas perbankan yang lebih dari cukup oleh Bank Indonesia, serta kemajuan restrukturisasi

kredit oleh perbankan, Bank Indonesia memperkirakan penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan dari pasar modal akan berangsur meningkat ke depan.

Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus ditempuh Bank Indonesia guna mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Sebagai implementasi BSPI 2025, pada tahun 2021 digitalisasi sistem pembayaran kami tekankan pada 3 (tiga) prioritas dan capaian penting, yaitu reformasi regulasi (*regulatory reform*), infrastruktur sistem pembayaran ritel, dan standarisasi sistem pembayaran (Gambar 1). Pada aspek *regulatory reform*, transformasi kebijakan ditempuh untuk konsolidasi industri sistem pembayaran nasional disertai dengan kemudahan dan penyederhanaan prosedur perizinan. Untuk itu, kami memperkuat PBI Sistem Pembayaran (SP), yang telah terbit pada akhir tahun 2020, dengan penerbitan PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) pada 1 Juli 2021. Kedua PBI tersebut ditujukan

Gambar 1. Perkembangan BSPI 2025

QUICK WINS BSPI 2025 DI TAHUN 2021
 PADA TAHUN 2021, TERDAPAT SETIDAKNYA 3 (TIGA) MILESTONÉ PENTING BSPI 2025, YAITU REFORMASI REGULASI, INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN (SP) RITEL, DAN STANDARDISASI SP (SNAP DAN QRIS)

1. REFORMASI REGULASI

BSPI 2025: INISIATIF WG 5

REGULATORY REFORM

Upaya Mencari Titik Keseimbangan Antara Optimalisasi Inovasi dengan Memelihara Stabilitas dan Kepentingan Nasional

Integrasi Pengaturan, Perizinan, Pengawasan, dan Pelaporan

Reformasi pengaturan SP antara lain melalui restrukturisasi kerangka pengaturan dan penyusunan PBI SP

TELAH TERBIT PBI NO. 22/23/PBI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN TANGGAL 20 DESEMBER 2020

TELAH TERBIT PBI NO. 23/6/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA PEMBAYARAN DAN PBI NO. 23/7/PBI/2021 TENTANG PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PEMBAYARAN TANGGAL 1 JULI 2021

TELAH TERBIT PBI NO. 23/6/2021 TENTANG STANDAR NASIONAL SP TANGGAL 12 AGUSTUS 2021

2. INFRASTRUKTUR SP RITEL

BI-FAST

Infrastruktur SP yang memfasilitasi pembayaran ritel dari berbagai instrumen secara 24/7

3 TAHAPAN

2021 KREDIT TRANSFER (Fase 1 Tahap 1)

2023 DEBIT BULK, RFP (Fase 1 Tahap 2)

>2023 PERLUASAN (Fase 2)

3. STANDARDISASI SP

SNAP terstandar, terintegrasi

QRIS

TELAH TERBIT PADG NO. 23/15/PADG/2021 TENTANG STANDAR NASIONAL OPEN API PEMBAYARAN TANGGAL 20 AGUSTUS 2021

MENDORONG INTERKONEKSI, INTEROPERABILITAS, DAN KOMPATIBILITAS

MENDORONG INTERLINK BANK DAN FINTECH

MENDORONG LEVEL PLAYING OF FIELD, TERMASUK MENCEGAH SHADOW BANKING

FITUR QRIS : MPM, CPM, TTM, TTS, CROSSBORDER (ANTARNEGARA)

Sumber: Bank Indonesia

untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia secara *end-to-end* serta mendorong praktik bisnis yang sehat melalui kolaborasi dengan industri untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif. Penyederhanaan perizinan ditempuh dengan menerapkan kaidah pengaturan prinsip (*principle based*) dengan pemberian izin atas kelompok jenis layanan pembayaran daripada pengaturan sebelumnya dengan persyaratan yang kaku (*rule based*) untuk setiap jenis layanan. Penyederhanaan pemrosesan izin ini diterapkan baik terhadap PJP, penetapan PIP serta dalam pemrosesan pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama berbasis risiko.

Bank Indonesia juga terus mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, terinteroperabilitas, dan terinterkoneksi untuk mendukung ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional. Dalam hal ini, Bank Indonesia memodernisasi infrastruktur pembayaran ritel yang *serta merta (real time)* dan beroperasi tanpa henti (24/7) dengan segera meluncurkan BI-FAST pada Desember 2021. BI-FAST dibangun untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara *end-to-end*, bersifat *national driven* sebagai wujud implementasi BSPI 2025, dan mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal (CEMUMUAH). Pada tahap awal, layanan BI-FAST difokuskan untuk layanan transfer kredit individual. Berbagai kebijakan penyelenggaraan telah ditetapkan guna persiapan implementasi BI-FAST seperti kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan infrastruktur secara independen maupun bersama/*sharing*, penetapan batas maksimal transaksi sebesar Rp250 juta per transaksi serta skema harga BI-FAST sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi kepada nasabah dengan biaya Bank Indonesia ke peserta sebesar Rp19 per transaksi. Calon peserta BI-FAST telah ditetapkan sebanyak 22 peserta *batch 1* pada Desember 2021 dan 22 peserta *batch 2* pada Januari 2022. Implementasi BI-FAST juga selaras

dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik di sektor moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, dalam modernisasi infrastruktur pembayaran nasional sesuai standar internasional *Core Principles of Payments and Financial Market Infrastructure* dan sekaligus untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang *integrated*, *interoperable*, dan *interconnected* (3i).

Selain BI-FAST, Bank Indonesia juga mengimplementasikan Standar Nasional Open API (SNAP) untuk mendukung percepatan pembentukan ekosistem EKD yang terstandarisasi. SNAP merupakan standar nasional atas protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antar aplikasi secara terbuka dalam pemrosesan transaksi pembayaran yang disusun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Penetapan SNAP ini ditujukan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman, dan andal. SNAP yang telah diluncurkan pada 17 Agustus 2021 akan diadopsi secara bertahap mulai Juni 2022 untuk penyelenggara jasa pembayaran *first mover* dan Desember 2022 untuk PJP lainnya. Bank Indonesia optimis bahwa implementasi SNAP akan mendorong interkoneksi, interoperabilitas, dan komabilitas penyelenggara Open API pembayaran sehingga memperkuat *interlink* antara PJP bank dengan non bank. Selain itu, SNAP juga membentuk *level of playing field* yang sama antar pelaku industri pembayaran sehingga mengurangi fragmentasi dan mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

Digitalisasi sistem pembayaran juga didukung dengan perluasan penggunaan QRIS sebagai standar nasional QR Pembayaran dalam pembayaran berbagai transaksi ekonomi-keuangan digital. Perluasan QRIS ditempuh dengan kampanye secara masif untuk mencapai target penggunaan QRIS sebanyak 12 juta *merchant* tersambung dalam

ekosistem EKD nasional pada tahun 2021. Sejumlah kemudahan dan insentif juga kami tempuh, termasuk memperpanjang *merchant discount rate* (MDR) QRIS 0% bagi usaha mikro hingga 31 Desember 2021 maupun menaikkan limit transaksi QRIS dari Rp2 juta per transaksi menjadi Rp5 juta per transaksi untuk memperluas transaksi QRIS di segmen menengah sejak 1 Mei 2021. Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah juga terus diperkuat melalui penggunaan QRIS dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Berwisata di Indonesia (BWI). Perluasan QRIS oleh pemerintah daerah juga diperluas sebagai bagian dari implementasi Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Alhamdulillah, berbagai kebijakan dan koordinasi tersebut membuahkan hasil yang positif. Sampai dengan 1 November 2021 telah tercapai target 12 juta *merchant* (Tabel 4) tersambung dengan QRIS melebihi target 12 juta pada akhir 2021. QRIS yang beroperasi di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota, digunakan oleh 88% usaha mikro dan kecil, serta diselenggarakan oleh 68 penyelenggara jasa pembayaran baik bank maupun lembaga selain bank. Lebih dari itu, penggunaan QRIS juga semakin meningkat baik dari sisi volume maupun nominalnya yang menunjukkan semakin diterimanya QRIS oleh masyarakat (Grafik 41).

Tabel 4. *Merchant* Terdaftar QRIS

Kriteria <i>Merchant</i>	22/03/2020	05/11/2021	Pertumbuhan (%)
Usaha Besar	129.834	449.311	246%
Usaha Menengah	265.077	928.005	250%
Usaha Kecil	304.420	3.203.652	952%
Usaha Mikro	2.378.026	7.532.134	217%
Donasi/Sosial	3.996	124.484	3015%
TOTAL	3.081.353	12.237.586	297%

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia juga terus memperluas program elektronifikasi pembayaran untuk penyaluran bansos, moda transportasi, dan transaksi keuangan Pemerintah Daerah guna mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk menyalurkan bansos yang lebih cepat, tepat sasaran, dan bertata kelola baik melalui program elektronifikasi bansos. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi bansos 4.0 melalui penguatan model bisnis, regulasi, dan metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan termasuk peningkatan kualitas data. Sementara pada elektronifikasi transportasi, Bank Indonesia mendorong integrasi sistem dan data pembayaran di sektor transportasi. Bank Indonesia memberikan dukungan penyusunan model bisnis aspek pembayaran untuk moda transportasi terintegrasi serta *multi lane free flow* jalan tol yang akan mulai beroperasi bertahap tahun 2022. Lebih lanjut, untuk memperkuat elektronifikasi transaksi pemda, Bank Indonesia pada tahun 2021 memperkuat sinergi program strategis satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Hingga 14 Oktober 2021, pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sudah mencapai 482 atau 88% dari total Pemda di Indonesia dengan komposisi 33 pemerintah provinsi, 360 pemerintah kabupaten, dan 89 pemerintah kota.

Grafik 41. Perkembangan QRIS

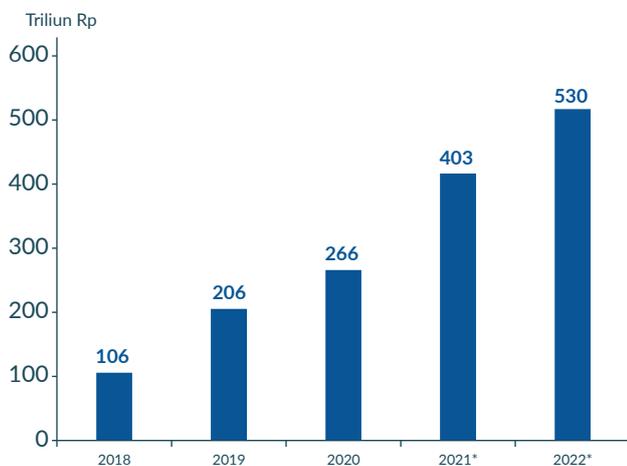


Sumber: Bank Indonesia

Sinergi antarotoritas dan *stakeholder* terkait juga terus dilakukan antara lain dengan menyukseskan penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 yang menjadi wadah sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Berbagai program digitalisasi sistem pembayaran di atas mampu mendorong akselerasi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional saat ini dan kedepannya. Transaksi *e-commerce* yang pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh 51,6% akan terus meningkat pada 2022 hingga mencapai Rp530 triliun, atau tumbuh 31,4% (Grafik 42). Sejalan dengan perkembangan tersebut, transaksi pembayaran *digital banking* pada 2021 diproyeksikan naik 46,1% (yoy) dan berlanjut naik 21,8% hingga mencapai Rp48,6 ribu triliun pada 2022 (Grafik 43). Sementara, penggunaan UE pada 2021 juga diperkirakan naik 41,2% (yoy) dan akan kembali tumbuh tinggi 16,3% (yoy) hingga mencapai Rp337 triliun pada 2022 (Grafik 44). Semakin pesatnya perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital ini sejalan dengan terus meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, meluasnya ekosistem *e-commerce*, semakin berkembangnya

Grafik 42. Perkembangan E-Commerce



Sumber: Sumber: Bank Indonesia; *Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 43. Perkembangan Digital Banking



Sumber: Sumber: Bank Indonesia; *Proyeksi Bank Indonesia

layanan pembayaran digital, membaiknya kondisi ekonomi domestik, dan akselerasi berbagai program digitalisasi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025.

Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia juga melanjutkan transformasi pengelolaan uang Rupiah melalui sentralisasi, otomasi, dan efisiensi pencetakan dan pagedaran uang ke seluruh wilayah NKRI. Transformasi diarahkan untuk menyediakan uang layak edar, denominasi sesuai, *just in time* melalui *central bank driven*, menyelaraskan arah kebijakan non-tunai, serta memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional berdasarkan

Grafik 44. Perkembangan Uang Elektronik



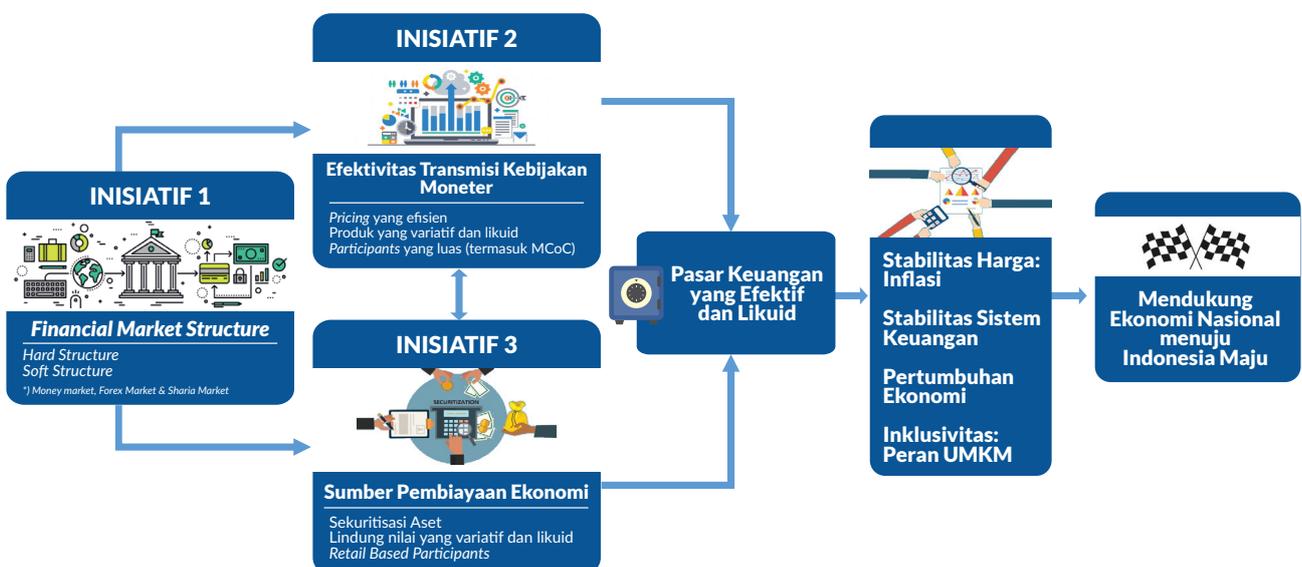
Sumber: Sumber: Bank Indonesia; *Proyeksi Bank Indonesia

Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah (BPPUR) 2025. Transformasi diimplementasikan berdasarkan 3 (tiga) *key milestones* yakni sentralisasi distribusi, digitalisasi, dan efisiensi yang didukung oleh penguatan sistem informasi, ketentuan, organisasi, serta sumber daya manusia di bidang pengelolaan uang Rupiah. Sentralisasi distribusi ditempuh melalui penyalarsan jalur dan *layer* distribusi, penguatan *command center*, sentralisasi pengelolaan persediaan kas, serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan moda transportasi berbasis 4.0. Sementara, digitalisasi pengelolaan uang Rupiah dilakukan secara *end to end* mulai dari tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Dalam konteks upaya peningkatan efisiensi, Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan pengelolaan uang Rupiah termasuk efisiensi manajemen persediaan uang Rupiah, distribusi, dan layanan kas, pemenuhan kebutuhan kas berbasis spasial, serta penguatan kualitas bahan uang dan unsur pengamanan. Berbagai transformasi pengelolaan uang Rupiah berdasarkan 3 (tiga) *key milestones* tersebut merupakan wujud komitmen kuat Bank Indonesia untuk menjaga integritas dan kredibilitas Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus sebagai pemersatu dan kebanggaan bagi NKRI dan bangsa Indonesia.

Akselerasi Pendalaman Pasar Uang

Bank Indonesia mengakselerasi pendalaman pasar uang untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan mendukung pemulihan ekonomi. Berbagai program dilakukan sebagai implementasi *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 dengan 3 (tiga) inisiatif utama, yaitu: (i) mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, (ii) memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan (iii) mengembangkan instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan ekonomi dan penguatan manajemen risiko (Skema 2). Dalam upaya memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia pada 2021 fokus pada percepatan pengembangan transaksi repo dan DNDF antar pelaku pasar. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan penguatan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) sebagai acuan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Penguatan yang dilakukan baik pada periode pemantauan transaksi maupun waktu penerbitan JISDOR ini ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas pasar valas dan mendukung stabilitas nilai tukar. Pengembangan instrumen DNDF juga dilanjutkan melalui upaya peningkatan suplai di pasar untuk menyeimbangkan sisi suplai dan permintaan di pasar DNDF, termasuk dengan memperbolehkan peserta DNDF untuk *me-roll over* DNDF yang

Skema 2. Keterkaitan Antar Inisiatif BPPU 2025



akan jatuh tempo. Selain itu, skema *Local Currency Settlement* (LCS) juga terus diperkuat dan diperluas untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu. Penguatan kerangka LCS telah dilakukan pada skema LCS Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Jepang, sementara perluasan negara mitra LCS ditempuh dengan implementasi LCS Indonesia-Tiongkok pada September 2021. Pengembangan JISDOR, DNDF, dan LCS ini juga sekaligus sebagai bagian kontribusi Bank Indonesia dalam upaya memperkaya instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan ekonomi dan penguatan manajemen risiko. Selain itu, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan OJK melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) terus mengembangkan instrumen keuangan untuk pembiayaan ekonomi, termasuk di antaranya instrumen Surat Berharga Komersial (SBK) dan perluasan transaksi repo antar bank dengan SBN sebagai transaksi yang mendasari (*underlying transactions*), serta kampanye untuk mobilisasi investor ritel SBN.

Dalam rangka mendorong digitalisasi dan infrastruktur pasar uang, Bank Indonesia telah menyusun kerangka pengaturan melalui penerbitan **PBI Pasar Uang beserta implementasinya bersama industri**. Salah satunya adalah pendirian *Electronic Trading Platform* (ETP) *Multi-matching* dengan transaksi pasar uang dan pasar valas dilakukan secara bersama dengan standarisasi instrumen dan penentuan harga secara lebih terbuka di antara para pelaku pasar, beralih dari transaksi yang selama ini dilakukan secara bilateral (*over the counter*, OTC). Implementasi ETP *Multi-matching* ini akan mendorong pembentukan harga yang efisien dan transparan serta penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Pada tahap awal, ETP *Multi-matching* diimplementasikan pada transaksi valuta asing khususnya spot, yang kemudian akan dikembangkan lebih lanjut agar mencakup jenis transaksi yang lain, termasuk repo, swap, dan DNDF. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya dan industri juga tengah mempercepat pendirian *central counterparty* (CCP)

Skema 3. Pengembangan CCP-SB NT Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

guna meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat transparansi, dan mengurangi risiko transaksi *repo* dengan SBN sebagai *underlying transactions* (Skema 3). Berbeda dengan transaksi *repo* SBN yang selama ini dilakukan secara bilateral melalui OTC, transaksi *repo* melalui CCP dilakukan secara bersama melalui ETP *Multimatching* dengan standarisasi produk, kontrak transaksi, transaksi harga, serta mekanisme penyelesaian transaksi secara neto (*closed-out netting*) atas dasar SBN yang diserahkan sebagai *underlying transaction* dari peserta pasar kepada lembaga CCP yang akan dibentuk. Karenanya, CCP-SBN NT akan meningkatkan volume dan likuiditas transaksi *repo* SBN antarbank, memperkuat transparansi pembentukan suku bunga di pasar, dan menghilangkan risiko antarpihak (*counterparty risk*) yang timbul dalam transaksi *repo* secara bilateral melalui OTC. Diharapkan pendirian CCP-SBN NT ini akan menurunkan perbedaan imbal SBN (yaitu sekitar 5,2% untuk tenor 5 tahun) dengan suku bunga di pasar uang (yaitu sekitar 3,7% untuk tenor 12 bulan) yang saat ini sangat besar, dan karenanya akan mendukung upaya Pemerintah untuk mengurangi beban bunga utang pemerintah. Upaya penguatan infrastruktur pasar tersebut di samping akan dapat mempercepat pendalaman pasar uang Indonesia, juga konsisten dengan agenda G20 OTC *Derivative Market Reform*. Untuk itu, modernisasi infrastruktur pasar uang Indonesia memerlukan dukungan dari seluruh *stakeholders* Bank Indonesia, termasuk pelaku pasar, Pemerintah, OJK, dan DPR-RI.

Pemberdayaan Ekonomi-Kuangan Syariah dan UMKM

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, bagian dari reformasi struktural menuju Indonesia Maju.

Penguatan dan perluasan ekosistem mata rantai nilai halal (*halal value chain*), terus dilakukan melalui 3 (tiga) pilar pengembangannya. Strategi penguatan dilakukan di masing-masing pilar tersebut baik dalam aspek penguatan kelembagaan, perluasan implementasi,

serta penguatan infrastruktur pendukung termasuk digitalisasi. Pada pilar *pertama* pemberdayaan ekonomi syariah, penguatan ekosistem *halal value chain* pada aspek kelembagaan dilakukan dengan akselerasi penguatan korporatisasi pelaku usaha syariah berbasis pesantren. Hal ini diimplementasikan melalui pembentukan Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) di berbagai wilayah provinsi. Sementara penguatan secara sektoral dilakukan melalui dukungan akselerasi *Halal Assurance System* untuk sektor makanan halal bersama BPJPH, serta K/L dan *stakeholder* lainnya, termasuk dalam mendukung implementasi Kawasan Industri Halal (KIH). Dukungan peningkatan kinerja sektoral ekonomi syariah juga dilakukan melalui penguatan rantai pasok nilai halal di sektor pertanian, serta pelaksanaan *business matching*, *business intermediary*, dan *on-boarding e-commerce* domestik dan global. Begitu juga penguatan sektor fesyen muslim yang dilakukan melalui penguatan kapasitas pelaku usaha syariah siap ekspor dan perluasan akses pasar.

Pada pilar *kedua* keuangan syariah, penguatan operasi moneter dan pendalaman pasar uang syariah untuk mendukung pembiayaan terus ditempuh.

Hal ini dilakukan antara lain dengan perluasan implementasi Sukuk BI (SukBI). Di samping itu persiapan pelaksanaan RPIM pada perbankan syariah melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk *underlying project* SukBI Inklusif dalam rangka mendorong pembiayaan syariah bagi UMKM, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, terus dilakukan. Upaya optimalisasi keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan juga terus didorong melalui penguatan wakaf produktif bersama K/L terkait. Selanjutnya sebagaimana amanah UU No. 2 Tahun 2020, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pemulihan ekonomi, dilakukan penyempurnaan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) bagi perbankan syariah.

Pada pilar *ketiga* edukasi dan sosialisasi, kontribusi penyelenggaraan FESyar dan ISEF tahun 2021 terhadap ekonomi dan keuangan syariah nasional semakin nyata. Rangkaian kegiatan *Road to ISEF*,

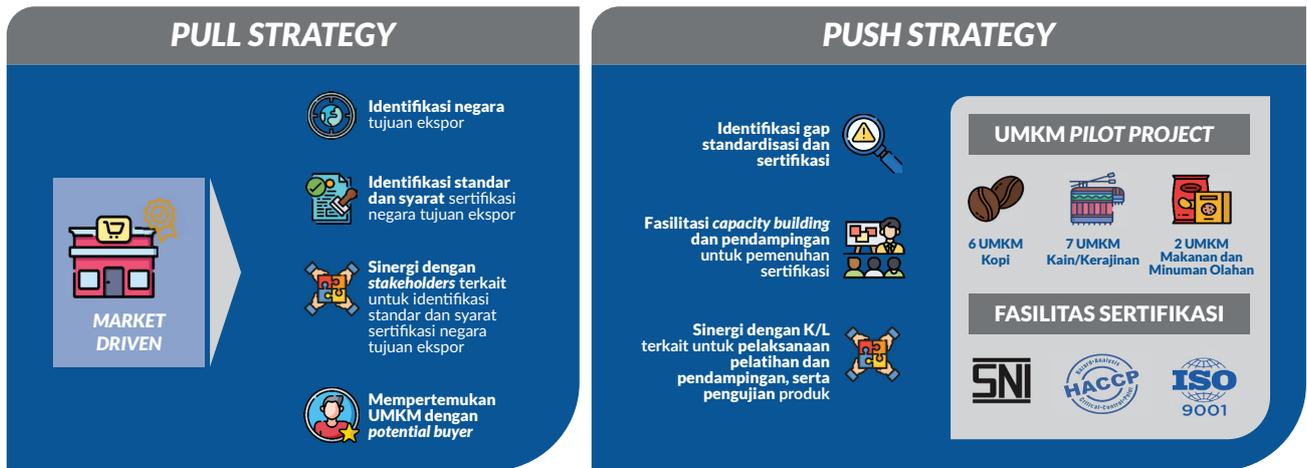
termasuk 3 (tiga) kali penyelenggaraan FESyar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kawasan Timur Indonesia, mencakup berbagai kegiatan, dari webinar hingga *business matching* dan *business deals*. Perluasan pasar, di domestik hingga menembus pasar global, termasuk *onboarding* ke platform *e-commerce* global. Dari keuangan syariah, kolaborasi “Bulan Pembiayaan Syariah” digelar bersama OJK dan berbagai *stakeholder* terkait lainnya termasuk dari wakaf produktif. Rangkaian kegiatan FESyar virtual dengan ISEF yang kali ini diselenggarakan secara *hybrid*, diikuti oleh lebih dari 290 ribu peserta dan 970 peserta ekshibi (Skema 4). Pada ISEF ke-8 tersebut, kegiatan untuk akselerasi ekonomi syariah difokuskan pada sektor makanan halal dan fesyen muslim. Termasuk penyelenggaraan “*Global Halal Dialogue*”, serta “*Indonesia Sustainable Modest Fashion Show*” oleh 420 desainer seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan FESyar dan ISEF menghasilkan total transaksi senilai Rp25,8 triliun dan pengumpulan ZISWAF sebesar Rp669 miliar. Keseluruhan pencapaian ini jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang semakin membanggakan adalah bertambah banyaknya lembaga, asosiasi, dan berbagai pihak, nasional maupun internasional, yang bergabung dan berjamaah di dalam ISEF untuk akselerasi ekonomi dan keuangan syariah mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia terus memperkuat program pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM digital dan ekspor. Bank Indonesia konsisten melaksanakan program pengembangan UMKM melalui 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif (Skema 5). Penguatan korporatisasi dilakukan melalui pembentukan kelompok yang didasari modal sosial yang kuat serta penguatan kelembagaan formal dan modern. UMKM didorong untuk berkolaborasi antarUMKM maupun dengan usaha besar dan lembaga keuangan untuk meningkatkan skala ekonominya. Peningkatan kapasitas difokuskan untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan digitalisasi proses bisnis sehingga mendorong perbaikan daya saing UMKM. Program digitalisasi UMKM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas akses pemasaran UMKM baik nasional maupun global, mempermudah akses pembiayaan UMKM, dan mempermudah transaksi UMKM sebagai *entry point* ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui perluasan adopsi QRIS. Pada aspek pembiayaan, perluasan akses terus didorong untuk kemudahan ekspansi usaha dengan pembiayaan UMKM yang lebih sehat. Bank Indonesia juga terus mendorong UMKM ekspor

Skema 4. Fesyar dan ISEF 2021: Indonesia Pusat Ekonomi Keuangan Syariah Dunia



Skema 5. Strategi Pengembangan UMKM Ekspor



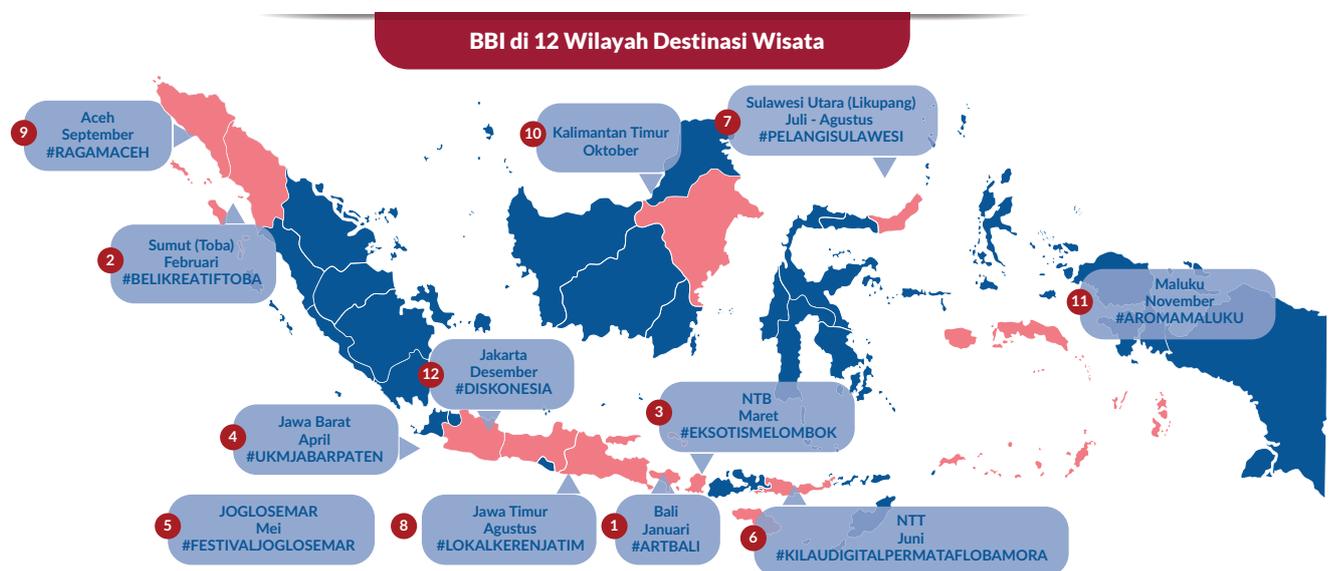
dengan menerapkan 2 (dua) strategi, yaitu *pull strategy* (*market driven*) untuk mengidentifikasi standar dan persyaratan sesuai negara tujuan ekspor dan *push strategy* melalui fasilitasi pemenuhan sertifikasi yang dibutuhkan UMKM.

Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, asosiasi, dan komunitas untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sinergi dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas UMKM, *onboarding* UMKM, *business matching*, fasilitasi akses pembiayaan, pameran, dan promosi perdagangan internasional. Bank Indonesia juga konsisten mendukung Gerakan Nasional Bangga

Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BWI) dengan melibatkan seluruh kantor Bank Indonesia dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi, antara lain melalui program belanja produk-produk UMKM, perluasan penggunaan QRIS UMKM dan penyelenggaraan berbagai event strategis Bank Indonesia (Gambar 2). Sejalan dengan peran strategis Bank Indonesia dalam tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bank Indonesia akan terus memperkuat peran aktif dalam mendukung kesuksesan Gernas BBI dan BWI.

Dengan dukungan sinergi yang erat, rangkaian kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) tahun 2021 yang diselenggarakan Bank Indonesia menjadi momentum

Gambar 2. Persebaran Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia



kebangkitan UMKM di era pandemi Covid-19. KKI 2021 mengangkat tema “Sinergi, Globalisasi, dan Digitalisasi UMKM dan Sektor Pariwisata”. Seri 1 KKI pada bulan Maret 2021 diselenggarakan dengan peran Bank Indonesia sebagai *movement manager* Gernas BBI 2021 dengan tagar #EksotismeLombok, bersinergi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Puncak KKI 2021 diselenggarakan tanggal 23-26 September dengan tagar #RagamAceh dan dibuka oleh Ibu Negara, sukses menjadi momentum kebangkitan UMKM di era pandemi untuk mendorong UMKM digital dan UMKM ekspor. Capaian KKI 2021 yang meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dari sisi omzet (94%), jumlah pengunjung (130%), serta komitmen yang tercipta dari *business matching* ekspor (17%) dan pembiayaan (548%), mencerminkan membaiknya kinerja UMKM dan optimisme untuk bangkit setelah melewati badai pandemi (Gambar 3). Koordinasi dengan K/L yang semakin erat dan intensif, memberikan nilai tambah dalam peningkatan kapasitas, akses pemasaran, serta akses pembiayaan UMKM, serta meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam membeli produk-produk UMKM.

Penguatan Kebijakan Internasional

Kebijakan Internasional Bank Indonesia dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah, yang ditujukan untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan ekonomi Indonesia. Kerja sama internasional dan regional Asia terus diperkuat untuk meningkatkan resiliensi perekonomian dan mendukung pertumbuhan. Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan kerja sama internasional termasuk dalam rangka Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI). Saat ini Bank Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Singapura, serta perjanjian repo dengan the Fed New York dan BIS. Upaya untuk meningkatkan persepsi positif investor global dan lembaga rating terhadap perekonomian Indonesia terus dilanjutkan. Bank Indonesia juga mendorong percepatan implementasi penggunaan LCS dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra, dengan memperkuat sinergi bersama

Gambar 3. Pencapaian KKI 2021



Pemerintah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha. Selain itu, penguatan kerangka LCS telah dilakukan pada skema LCS Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Jepang, sementara perluasan negara mitra LCS ditempuh dengan implementasi LCS Indonesia-Tiongkok pada September 2021. Bank Indonesia juga meningkatkan kerja sama dalam rangka pengembangan sistem keuangan dan/atau sistem pembayaran untuk mendorong transaksi yang efisien, aman dan mendorong inovasi keuangan digital serta memperkuat kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui kesepakatan dengan bank sentral Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Bank Indonesia berperan aktif dalam memperkuat persepsi positif internasional, khususnya lembaga rating dan investor asing, terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dilakukan melalui komunikasi dan *engagement* yang intensif dengan lembaga pemeringkat dan investor asing secara reguler, khususnya *Investor Conference Call* setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, maupun setiap terdapat kebijakan strategis yang perlu dikomunikasikan. Promosi investasi dan perdagangan juga dilakukan melalui *Investor Relation Unit* (IRU) baik nasional, daerah, dan global, melalui kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), serta Kedutaan Besar RI di luar negeri. Selama tahun 2021, misalnya, Bank Indonesia bekerja sama dan berpartisipasi aktif memfasilitasi kegiatan promosi investasi pada *Indonesia Business and Investment Forum* di Shanghai, *Indonesia Investment Forum* di London, *New York Now*, serta *London Coffee Festival*.

Bank Indonesia juga terus meningkatkan pengakuan internasional sebagai bank sentral terbaik di antara negara *emerging markets*. Hal ini dilakukan melalui peningkatan representasi Bank Indonesia, baik melalui *membership* maupun *chairmanship*, di berbagai forum kerja sama internasional. Selain itu, peningkatan reputasi Bank Indonesia dengan perolehan *international awards* dari lembaga internasional dengan reputasi tinggi, penerapan

sejumlah standar internasional, publikasi riset dan jurnal yang bertaraf internasional, maupun menjadi referensi dan narasumber dalam berbagai *international event* yang strategis. Pada tahun 2021, Bank Indonesia memperoleh penghargaan internasional sebagai *Reserve Manager of the Year* dari *Central Banking Awards*, medali emas pada ajang *15th Annual Next Generation Contact Center & Customer Engagement Conference*, *Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific* dari *The Asian Banker Regulation and Supervision Awards 2021*, medali emas pada *Annual Report Competition*, dan medali emas pada *International Business Awards (IBA) Stevie Winner*.

Sinergi kebijakan yang ditempuh masih dihadapkan tantangan dalam penanganan Covid-19 di tengah merebaknya varian baru, yang berdampak pada belum kuatnya permintaan domestik. Beberapa faktor menjadi tantangan dalam upaya mendorong akselerasi permintaan domestik dan pemulihan ekonomi. *Pertama*, pasokan dan distribusi vaksin global yang relatif terbatas sehingga menghambat upaya mendorong akselerasi vaksinasi yang merupakan prasyarat pemulihan ekonomi. *Kedua*, penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat, terutama munculnya varian baru termasuk varian delta yang lebih cepat dan lebih ganas, berdampak pada penerapan kembali pembatasan mobilitas yang disertai dengan tertahannya mobilitas dan aktivitas ekonomi. *Ketiga*, disiplin dalam penerapan protokol Covid-19 yang perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memitigasi risiko lebih lanjut penyebaran Covid-19. Penyebaran varian delta Covid-19 yang diluar prakiraan ditengah masih berlangsungnya upaya penguatan akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 berdampak pada pelaku ekonomi, baik rumah tangga, korporasi, maupun perbankan, untuk berhati-hati dan menunda keputusan ekonomi, baik konsumsi, produksi, dan investasi. Hal ini berdampak pada belum kuatnya permintaan domestik, yang pada gilirannya berdampak pada penyaluran kredit perbankan yang meningkat terbatas, di tengah kapasitas perbankan dalam penyaluran yang sangat memadai sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter Bank

Indonesia dalam bentuk penurunan suku bunga dan injeksi likuiditas yang besar, serta relaksasi kebijakan makroprudensial. Langkah-langkah lanjutan dalam akselerasi vaksin dan penanganan Covid-19 yang disertai pembukaan sektor prioritas, diharapkan akan berdampak positif pada terkendalinya penyebaran Covid-19, sehingga pembukaan sektor prioritas yang lebih luas dapat dilakukan untuk mendorong lebih jauh aktivitas ekonomi.

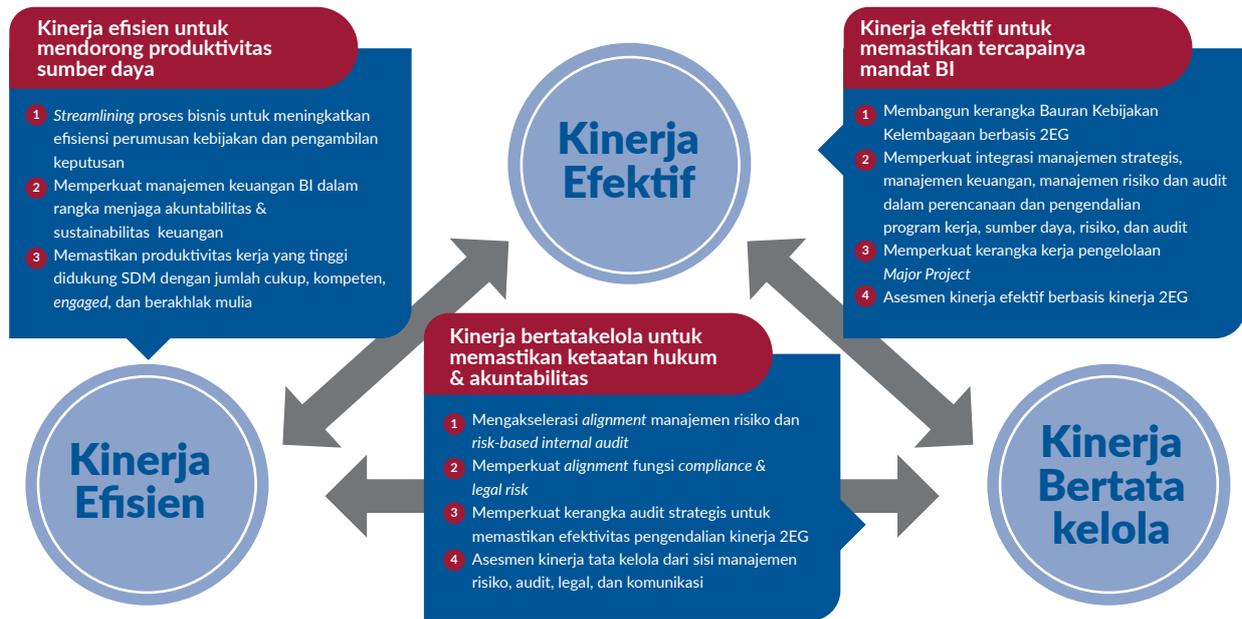
Transformasi Bank Indonesia

Transformasi menyeluruh yang ditempuh Bank Indonesia sejak tahun 2018 terus diperluas dan diperkuat, baik transformasi kebijakan maupun transformasi kelembagaan, termasuk dalam menyikapi cepatnya digitalisasi. Hal ini sejalan dengan visi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral digital terdepan dalam berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyusun *Strategic Business Plan* (SBP) hingga 2025 baik untuk Bank Indonesia secara keseluruhan maupun untuk masing-masing 12 program strategis. Transformasi kebijakan Bank Indonesia dilakukan melalui penguatan bauran kebijakan dalam rangka menjalankan mandat Undang-Undang untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah (inflasi dan nilai tukar), turut menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Independensi Bank Indonesia diletakkan sebagai bagian dalam sinergi dan koordinasi dalam memperkuat kebijakan ekonomi nasional. Dalam implementasinya, Bank Indonesia telah memelopori penerapan bauran kebijakan bank sentral (*central bank policy mix*) antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial sehingga dapat lebih optimal dalam mencapai stabilitas moneter, sistem keuangan dan makroekonomi serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di bidang sistem pembayaran, transformasi kebijakan dilakukan melalui implementasi BSPI 2025 untuk mendorong akselerasi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi

nasional. Percepatan pendalaman pasar uang sesuai BPPU 2025 dilakukan melalui pengembangan instrumen pasar uang dan infrastruktur pasar keuangan guna menciptakan pasar uang modern dan maju. Sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah terus diperkuat baik antara kebijakan moneter dan fiskal maupun dalam akselerasi reformasi sektor riil. Selain itu, sinergi dan koordinasi Bank Indonesia dalam KSSK juga semakin erat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi dunia usaha. Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK serta industri perbankan dan sistem pembayaran juga terus diperluas untuk pendalaman pasar keuangan dan mempercepat integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional.

Transformasi kelembagaan juga terus diperkuat sebagai langkah nyata untuk membangun Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral dengan kinerja yang unggul. Hal ini untuk mendukung pencapaian dan memastikan terlaksananya mandat Bank Indonesia secara kredibel. Transformasi kelembagaan melalui bauran kebijakan kelembagaan ditujukan untuk mewujudkan kinerja unggul yang berbasis kinerja efektif, kinerja efisien, dan kinerja bertata kelola (2EG) (Skema 6). Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam menciptakan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik. Transformasi kelembagaan mencakup area dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta transformasi digital. Transformasi organisasi dijalankan melalui: (i) perumusan bauran kebijakan kelembagaan yang dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan *governed* / bertata kelola, (ii) integrasi fungsi strategis kelembagaan yakni *Strategic Management*, *Strategic Finance*, *Strategic Risk Management*, *Strategic Risk Based Internal Audit*, serta fungsi pengelolaan sumber daya nonkeuangan, (iii) penyempurnaan *framework* audit untuk pengendalian internal, (iv) penguatan pengelolaan risiko, serta (v) penguatan fungsi pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan aset.

Skema 6. Transformasi Kelembagaan



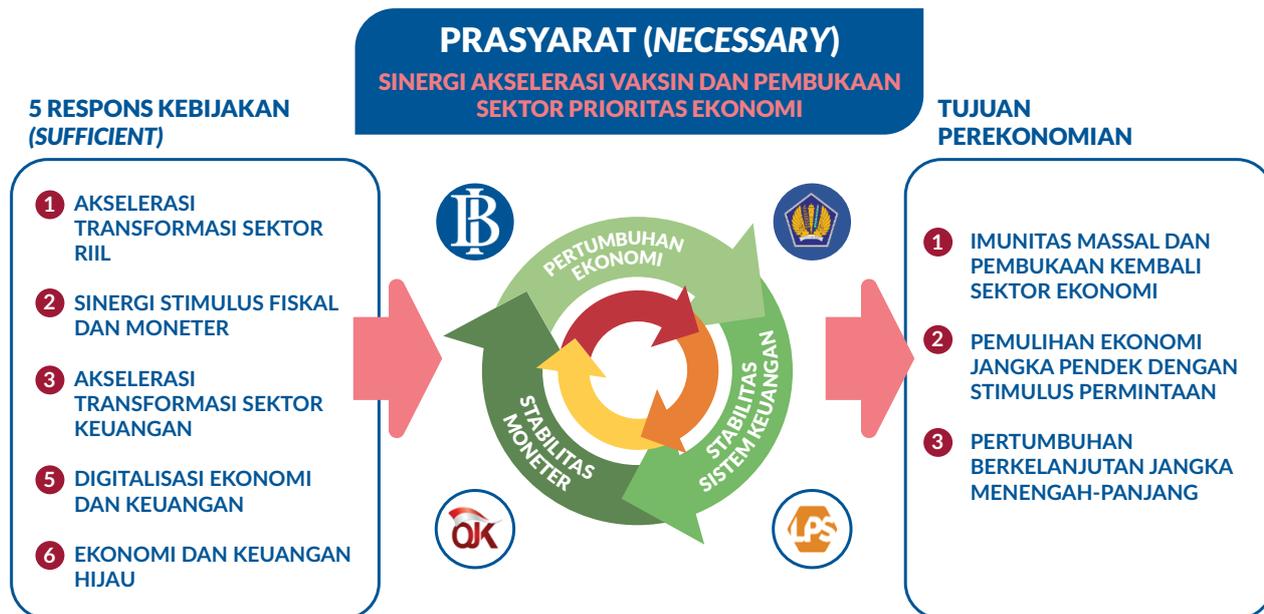
Bank Indonesia melanjutkan transformasi SDM untuk mencapai SDM berkinerja unggul di era digital, disertai dengan transformasi digital baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Transformasi SDM dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SDM. Transformasi pada area perencanaan terefleksi dari perencanaan SDM yang tidak lagi hanya fokus pada aspek kuantitas (jumlah) namun aspek kualitas. Transformasi pada area pemenuhan dilakukan melalui pemenuhan sesuai kebutuhan organisasi yang dilakukan secara Transparan, Terprogram, dan Terjadwal. Transformasi pada area pengembangan dilakukan melalui penerapan konsep Program Tugas Belajar baru (*new PTB*) dengan prinsip *institutional driven*, dikelola secara *end-to-end*, dan selaras dengan manajemen karir pegawai. Transformasi pada area pemeliharaan dilakukan untuk menjaga dan memelihara motivasi kerja dan *engagement* pegawai. Sementara itu, transformasi digital diterapkan secara menyeluruh baik di area kelembagaan maupun kebijakan. Transformasi tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem (*toolset*), peningkatan SDM (*mindset* dan *skill set*), serta menjaga kualitas dan keandalan layanan sistem informasi (SI). Kesemuanya ini ditempuh untuk mewujudkan visi Bank Indonesia

untuk menjadi bank sentral digital terdepan dalam berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi dasar untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Karenanya, akselerasi pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong melalui penguatan sinergi dan inovasi yang dilandasi oleh kuatnya semangat untuk bangkit dan optimis yang lebih tinggi. Sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas massal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural (Gambar 4). Dalam kaitan ini, kami berpandangan bahwa kerangka berpikir yang kami sampaikan pada PTBI 2020 masih relevan, yaitu

Gambar 4. Sinergi Kebijakan Nasional



Sumber: Bank Indonesia

perluanya memperkuat 1 (satu) kebijakan prasyarat (*necessary*) serta mempercepat implementasi 5 (lima) respons kebijakan yang diperlukan (*sufficient*) bagi pemulihan ekonomi nasional kembali ke lintasan jangka panjangnya. Dalam hal ini, sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas, sebagai kebijakan prasyarat untuk mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional, sangat diperlukan. Selanjutnya, 5 (lima) respons kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau. Penguatan sinergi dan inovasi tersebut akan membangun optimisme akselerasi pemulihan ekonomi nasional 2022 dan tahun-tahun berikutnya, serta peningkatan laju pertumbuhan pada jangka menengah-panjang menuju Indonesia Maju 2045.

Sinergi akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor prioritas menjadi prasyarat bagi keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Pelajaran

berharga tahun 2021 adalah bahwa respons kebijakan yang cepat dan terukur melalui sinergi akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor prioritas menjadi penentu bagi pemulihan ekonomi. Hendaknya perlu diingat bahwa episentrum permasalahan ekonomi saat ini berasal dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Hasilnya telah kita rasakan bersama, dengan akselerasi vaksinasi yang ditempuh Pemerintah kita dapat kembali mampu bertahan dari serangan varian delta Covid-19. Setelah mengalami lonjakan signifikan pada Juni-Juli 2021, penurunan kasus baru harian Covid-19 terus menunjukkan penurunan sejak Agustus 2021. Sejalan dengan itu, Pemerintah merencanakan untuk secara bertahap akan mulai membuka sektor-sektor dan/atau wilayah-wilayah dengan kasus berat rendah, angka pemanfaatan rumah sakit yang juga rendah, dan tingkat kematian yang rendah. Tahapan pembukaan sektor-sektor ekonomi dilakukan secara bertahap, dari persiapan, Transisi I dan II untuk kemudahan hidup bersama Covid-19, dengan memperhatikan pula strategi pemenuhan penanganan pandemi yaitu percepatan vaksinasi, peningkatan 3T (*testing, tracing, treatment*), serta penerapan protokol kesehatan dan peduli

Gambar 5. Rancangan Persiapan ke Kenormalan Baru, Hidup Bersama Endemi



Sumber : Paparan Evaluasi PPKM, Kemenkomarves, Studi Australia dan Singapura

lingkungan (Gambar 5). Tentunya program vaksinasi tersebut perlu terus dipercepat untuk mencapai tingkat imunitas massal sehingga memperkuat ketahanan terhadap kemungkinan penyebaran varian baru Covid-19 dan untuk memastikan keberlanjutan proses perbaikan ekonomi nasional lebih lanjut. Hal ini kembali menegaskan pentingnya sinergi akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor prioritas menjadi prasyarat bagi pemulihan ekonomi serta dampak rambatannya pada sektor keuangan dan moneter. Kami meyakini, pemenuhan prasyarat tersebut akan terus menebar semangat bersama optimisme pemulihan ekonomi ke depan.

Bank Indonesia mendukung penuh upaya Pemerintah dan berpartisipasi dalam pendanaan APBN untuk akselerasi vaksinasi maupun penanganan kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi Covid-19. Seperti dikemukakan di atas, vaksinasi dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai prasyarat untuk pemulihan ekonomi, dan karenanya perlu disinergikan dengan pembukaan sektor-sektor prioritas. Merebak dengan cepatnya varian delta virus Covid-19 pada Juni-Agustus 2021 telah menimbulkan kasus positif dan bahkan kematian. Pada saat yang sama, ketersediaan pasokan,

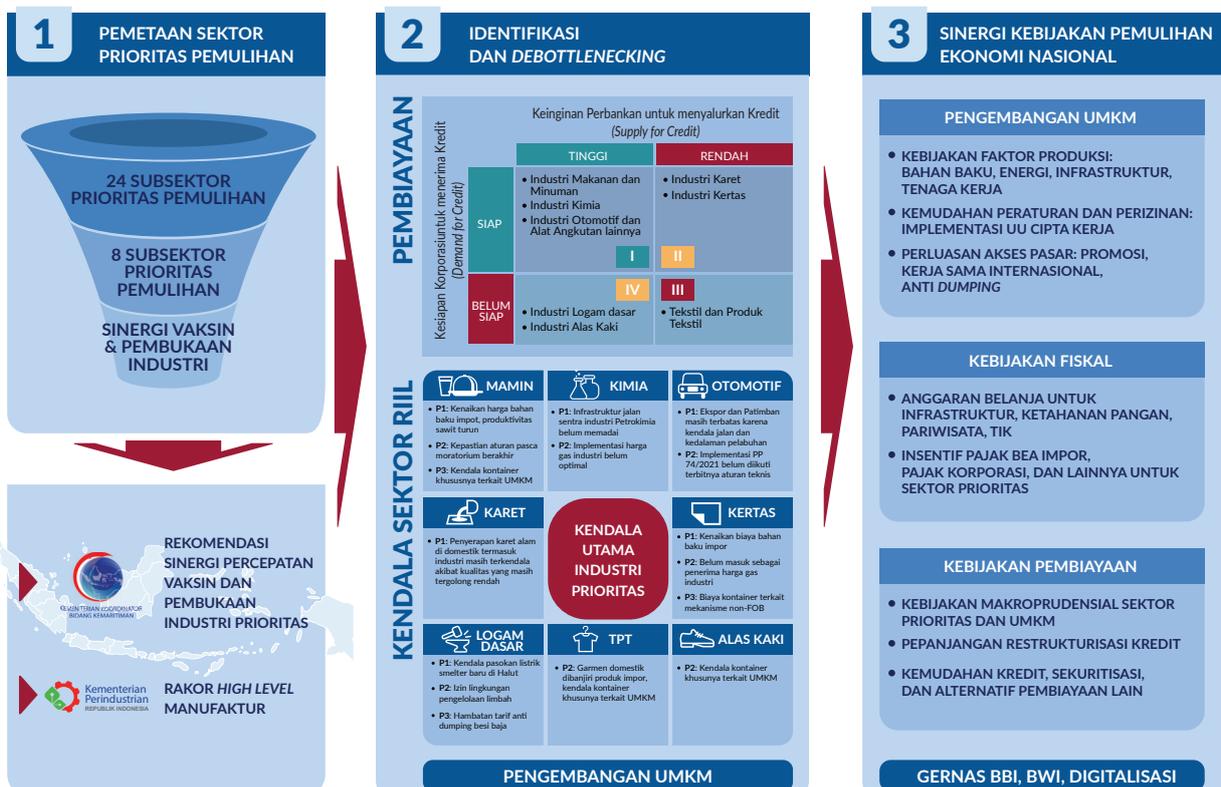
kapasitas, dan distribusi vaksin maupun kemampuan rumah sakit, tenaga medis, maupun kebutuhan perawatan sangat terbatas dan memerlukan biaya yang sangat besar. Bank Indonesia terpanggil untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah bersama untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan akibat virus varian delta Covid-19 tersebut, sebagai tugas negara, kemanusiaan, kesehatan, dan keamanan rakyat. Panggilan tugas negara untuk kesehatan dan kemanusiaan inilah yang mendorong Bank Indonesia berinisiatif untuk pendanaan APBN 2021 dan 2022 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara langsung (*private placement*) sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021. Besarnya SBN yang dibeli langsung Bank Indonesia untuk biaya kesehatan dalam APBN pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun, dengan biaya suku bunga yang sangat rendah yaitu sebesar biaya operasi moneter (Bank Indonesia *Reverse Repo Rate* tenor 3 bulan). Partisipasi Bank Indonesia juga berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022), sesuai kemampuan

keuangan Bank Indonesia. Dengan tambahan pendanaan biaya kesehatan oleh Bank Indonesia pada APBN 2021 dan 2022 tersebut, Pemerintah dapat menangani varian delta Covid-19 dengan sangat cepat dan untuk mempercepat vaksinasi untuk mencapai imunitas massal sehingga lebih tahan atas kemungkinan penyebaran virus baru. Hal ini penting agar langkah-langkah pembukaan sektor-sektor dan berbagai aktivitas ekonomi dapat terus dilakukan dengan mitigasi risiko pandemi Covid-19 yang memadai.

Dengan akselerasi vaksinasi untuk mencapai imunitas massal, respons kebijakan ekonomi nasional perlu difokuskan pada pemulihan secepatnya sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Sinergi dan inovasi kebijakan sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, baik pemecahan berbagai kendala (*debottlenecking*) dari sisi sektor riil, pemberian insentif kebijakan fiskal, maupun dukungan kebijakan makroprudensial dan sektor keuangan yang diperlukan. Pendekatan ini sesungguhnya telah dimulai oleh

KSSK melalui sinergi kebijakan untuk pemulihan sektor properti dan otomotif sebelum merebaknya varian delta Covid-19. Proses ini dilakukan melalui 3 tahapan. *Pertama*, pemetaan sektor-sektor prioritas yang mampu berdaya tahan, pendorong pertumbuhan, serta penopang pemulihan ekonomi. Dalam kaitan ini, terdapat 8 (delapan) subsektor prioritas utama yang dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan ekspor yaitu: (1) Industri Makanan dan Minuman; (2) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; (3) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (4) Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; (5) Industri Kertas dan Barang dari Kertas; (6) Industri Logam Dasar; (7) Industri Alat Angkutan; serta (8) Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik (Gambar 6). Di samping sektor industri tersebut, pengembangan UMKM perlu terus menjadi prioritas karena kontribusinya yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maupun untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Pembukaan sektor-sektor prioritas pemulihan tersebut perlu disinergikan dengan langkah-langkah terpadu dalam akselerasi vaksinasi dan penguatan penanganan Covid-19.

Gambar 6. Sinergi Kebijakan Ekonomi Nasional untuk Akselerasi Pemulihan Sektor Prioritas



Sumber: Bank Indonesia

Kedua, identifikasi kendala yang dihadapi dalam pemulihan sektor-sektor prioritas tersebut baik kendala di sektor riil maupun dari sisi pembiayaan. Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan bersama melalui forum koordinasi, yakni antara Pemerintah Pusat (K/L terkait), KSSK, pelaku industri, perbankan, serta Pemerintah Daerah terkait. Berbagai permasalahan di sektor riil baik berkaitan aspek perbaikan faktor produksi seperti bahan baku, energi dan tenaga kerja, aspek pengaturan dan kelembagaan khususnya kejelasan kebijakan dan kemudian perizinan, maupun aspek promosi dan akses pasar di dalam negeri dan luar negeri. Pada aspek pembiayaan, permasalahan dapat berasal dari perusahaan atau perbankan. Sejumlah sektor khususnya yang berorientasi ekspor telah tumbuh dan karenanya penyaluran kredit telah meningkat, sementara sektor-sektor lain perlu respons kebijakan baik dari sisi permintaan kredit dari sektor riil maupun untuk mengatasi persepsi risiko kredit dari perbankan.

Ketiga, sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi nasional perlu dirumuskan dan diimplementasikan sesuai kondisi di masing-masing sektor produktif dimaksud. Secara keseluruhan, kebijakan yang diperlukan menyangkut baik di sektor riil, kebijakan fiskal, maupun kebijakan pembiayaan. Dari sisi sektor riil, kebijakan menyangkut faktor produksi seperti bahan baku, energi, infrastruktur, dan tenaga kerja; kebijakan kemudahan peraturan dan perizinan, termasuk implementasi UU Cipta Kerja; serta kebijakan

perluasan akses pasar seperti promosi dan kerja sama internasional. Di bidang fiskal, kebijakan menyangkut alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, TIK, maupun insentif pajak bea impor, pajak korporasi, dan lainnya untuk sektor prioritas. Dari sisi pembiayaan, kebijakan menyangkut kebijakan makprudensial sektor prioritas dan UMKM dari Bank Indonesia, kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit dari OJK, serta kemudahan kredit perbankan, sekuritisasi, dan alternatif pembiayaan lain.

Respons kebijakan kedua untuk pemulihan ekonomi nasional berkaitan dengan sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dengan stimulus moneter dan makprudensial dari Bank Indonesia untuk mendorong permintaan khususnya dalam jangka pendek. Stimulus fiskal dalam jumlah yang relatif besar akan mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam menstimulasi perekonomian dan target pembangunan, postur APBN 2022 meliputi pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714,2 triliun, sehingga defisit Rp868 triliun atau 4,85% PDB. Sebagian besar anggaran, yaitu sebesar Rp1.711,5 triliun (63%) dialokasikan untuk program strategis APBN 2022 dalam mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju (Gambar 7). Sementara, Bank Indonesia memperkuat perannya dalam pendanaan APBN 2021 dan 2022 disertai partisipasi berupa kontribusi atas seluruh biaya

Gambar 7. Stimulus Fiskal



Sumber: Kementerian Keuangan

bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan limit yang diperhitungkan sesuai kemampuan keuangan Bank Indonesia. Dengan sinergi tersebut, Pemerintah dapat lebih fokus pada upaya akselerasi realisasi APBN tahun 2021 dan 2022 untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial akomodatif juga dilanjutkan untuk tetap mendorong fungsi intermediasi antara lain melalui rasio CCyB, RIM, LTV/Uang Muka yang kondusif bagi intermediasi, termasuk mendorong sektor prioritas, ekspor, dan inklusi.

Respons kebijakan ketiga untuk akselerasi menyangkut peningkatan dan kemudahan pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha. Dalam jangka pendek, kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan diperlukan dengan mengatasi permasalahan baik dari sisi penawaran kredit oleh perbankan maupun sisi permintaan kredit dari dunia usaha. Pemetaan sektor-sektor prioritas di atas sangat penting untuk memahami faktor mana yang lebih dominan dan respons kebijakan yang diperlukan. Sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan dapat berasal dari permintaan kredit perusahaan atau penawaran kredit perbankan. Untuk industri makanan minuman, kimia, otomotif, dan alat angkut lainnya penyaluran kredit telah meningkat karena permintaan dari korporasi dan perbankan juga siap membiayainya. Sementara sektor-sektor lainnya, perlu insentif untuk mendorong kredit baik insentif di sektor riil agar prospek bisnis lebih baik maupun insentif ke perbankan dalam bentuk jaminan kredit atau insentif suku bunga. Selain kredit perbankan, pembiayaan dari pasar modal juga semakin diperlukan, baik melalui penerbitan saham maupun obligasi korporasi. Penerbitan sekuritas berbasis aset (*asset back securities*) maupun berbasis penerimaan (*earning backed securities*) juga perlu semakin dikembangkan. Dalam kaitan ini, peran Indonesia Investment Authorities (INA) sangat diperlukan sebagai pionir dalam sekuritisasi aset maupun pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur yang telah beroperasi secara baik dengan kondisi keuangan perusahaan yang

menjanjikan. Selain itu, pengembangan pasar uang dan pasar valas oleh Bank Indonesia sesuai BPPU 2025 juga berperan penting baik dalam penerbitan sekuritas jangka pendek seperti Surat Berharga Komersial (SBK), perluasan transaksi repo, maupun penyediaan instrumen lindung nilai - baik nilai tukar Rupiah seperti DNDF maupun lindung nilai suku bunga seperti Interest Rate Swap (IRS). Transformasi pasar keuangan sangat diperlukan untuk semakin memperluas alternatif pembiayaan kepada dunia usaha dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Respons kebijakan keempat untuk akselerasi digitalisasi serta inklusi ekonomi dan keuangan nasional. Berbagai sinergi kebijakan yang telah berhasil pada tahun 2020 dan 2021 perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan nasional, Gernas BBI dan BWI telah terbukti meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian, antara lain melalui program belanja produk-produk UMKM, dan perluasan penggunaan QRIS UMKM. Bank Indonesia secara konsisten mendukung Gernas BBI dan BWI tersebut baik dalam sinergi yang erat dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun dengan dunia usaha, baik penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama setiap bulan di berbagai daerah maupun *event* strategis yang diinisiasi Bank Indonesia seperti pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) setiap tahunnya. Peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung pelaksanaan Gernas BBI dan BWI dikukuhkan melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Keputusan tersebut menetapkan Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bukti dan apresiasi Pemerintah terhadap peran aktif Bank Indonesia dalam mendukung kesuksesan Gernas BBI dan BWI. Komitmen kuat dari Bank Indonesia untuk inklusi ekonomi dan keuangan juga dilakukan melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 untuk integrasi dan penguatan EKD nasional

yang efisien dan inklusif. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung program Pemerintah melalui elektronifikasi penyaluran program perlindungan sosial, berbagai moda transportasi maupun elektronifikasi keuangan Pemerintah Daerah.

Respons kebijakan kelima terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan hijau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi yang berimplikasi pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Transisi menuju ekonomi hijau, yakni ekonomi rendah karbon, perlu dilakukan secara gradual dan moderat, untuk optimalisasi respons kebijakan akibat perubahan iklim. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan keuangan hijau guna mendorong terciptanya sistem keuangan yang berkelanjutan, melalui koordinasi erat dengan otoritas terkait serta keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional yang berfokus dalam keuangan hijau. Bank Indonesia telah menempuh beragam langkah inisiatif, baik dalam bentuk kebijakan hingga penerapan prinsip investasi berkelanjutan dalam alokasi portofolio cadangan devisa, sejalan dengan semakin menguatnya kebijakan keuangan global yang mengarah kepada prinsip berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia mendukung transformasi menuju sistem keuangan hijau, sehingga dapat mendorong kontribusi sektor keuangan domestik dalam penurunan emisi karbon. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendukung tercapainya target penurunan emisi karbon Indonesia sebagaimana semangat dari *Paris Agreement* yang ditandatangani oleh Pemerintah berbagai negara untuk membatasi kenaikan suhu global bumi.

Kelima respons kebijakan dalam sinergi dan inovasi kebijakan untuk pemulihan ekonomi tersebut selaras Presidensi G20 Indonesia pada 2022, dengan tema yakni “Recover Together, Recover Stronger”. Presidensi G20 Indonesia fokus pada

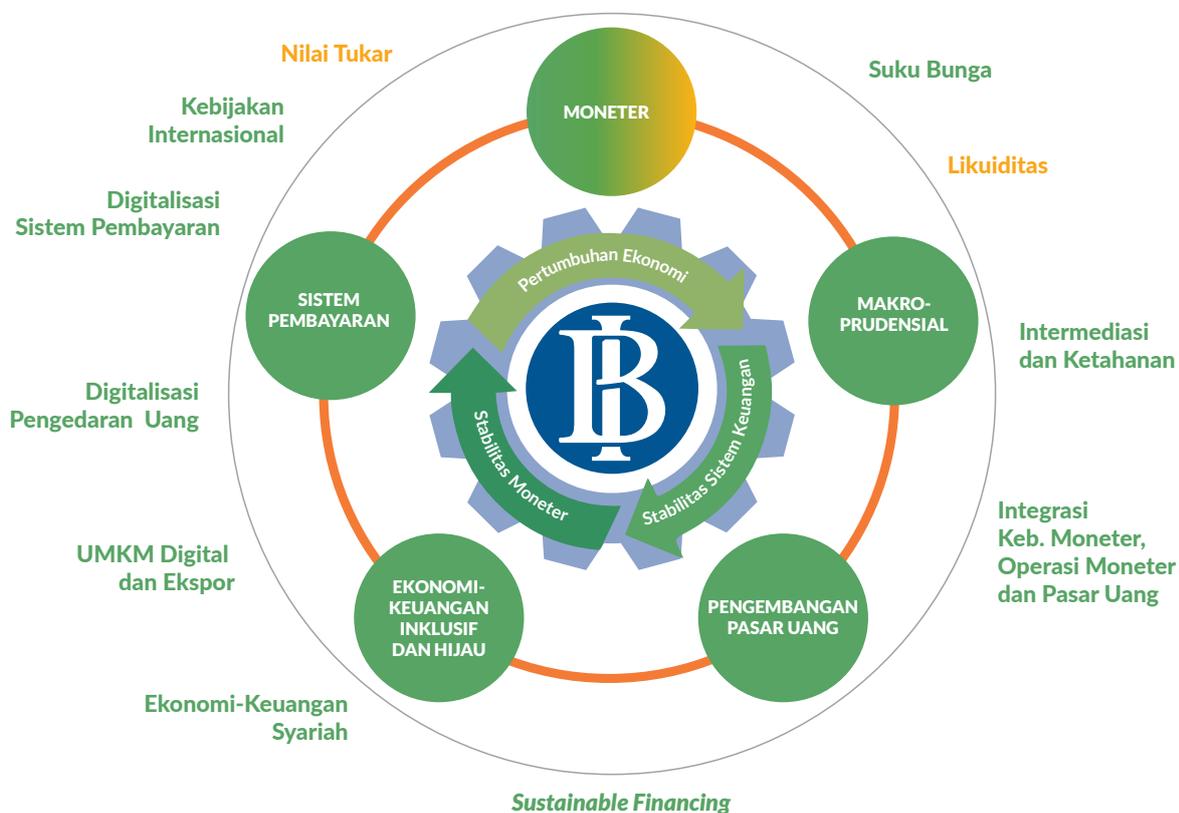
upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam mencapainya, Presidensi G20 Indonesia memiliki 6 (enam) agenda prioritas di jalur keuangan (*finance track*). *Pertama*, perumusan normalisasi kebijakan (*exit strategy*) khususnya oleh AS dan sejumlah negara AEs lain agar tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi dunia secara bersama dan lebih seimbang (“*recover together*”) dan memitigasi risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang mungkin terjadi dengan perhitungan matang (*well calibrated*), rencana seksama (*well planned*) dan komunikasi jelas (*well communicated*). *Kedua*, perumusan respons kebijakan reformasi struktural di sektor riil untuk mengatasi luka memar dari pandemi Covid-19 dengan meningkatkan produktivitas serta mengatasi sejumlah permasalahan ketenagakerjaan, rumah tangga, korporasi, dan sektor keuangan untuk dapat kembali ke lintasan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. *Ketiga*, mendorong kerja sama antar negara dalam sistem pembayaran digital melalui implementasi keseluruhan *G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments (CBP)* dan pengembangan prinsip-prinsip pengembangan CBDC (*General Principles for Developing CBDC*). *Keempat*, perumusan langkah-langkah menuju ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dengan mengatasi risiko perubahan iklim dan transisi ke ekonomi rendah karbon khususnya dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. *Kelima*, mendorong produktivitas dan perluasan ekonomi dan keuangan inklusif melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pemanfaatan *open banking*, khususnya bagi UMKM, wanita, dan pemuda, termasuk aspek lintas batas. *Keenam*, koordinasi internasional dalam agenda perpajakan untuk mencapai sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern, termasuk melanjutkan implementasi dari kesepakatan global terkait perpajakan digital dan pajak karbon yang telah dicapai pada 2021.

Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2022: Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Menjaga Stabilitas

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Arah bauran kebijakan Bank Indonesia dimaksud juga akan terus mencermati prospek ekonomi global beserta enam permasalahan yang menjadi agenda koordinasi kebijakan internasional dalam Keketuaan Indonesia di G20 pada 2022 seperti dijelaskan di atas. Kami melakukan perhitungan matang, perencanaan seksama, dan komunikasi yang jelas atas bauran dari 5 (lima) instrumen kebijakan, yaitu: kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau (Gambar 8). Dalam kaitan ini, sejalan dengan risiko meningkatnya

tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara AEs, arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (*“pro-stability”*), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*“pro-growth”*). Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem

Gambar 8. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2022



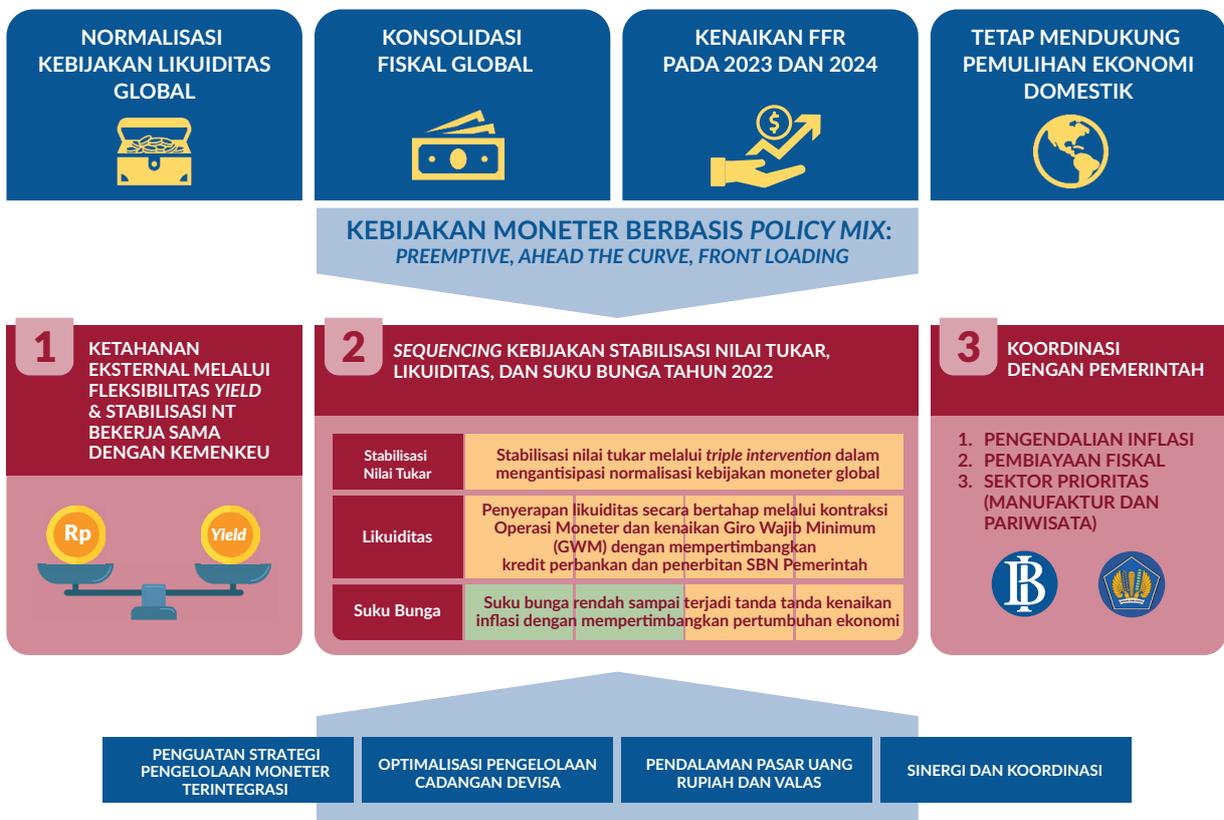
Sumber: Bank Indonesia

pembayaran berdasarkan BSPI 2025 terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, secara *end to end*, sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi. Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai BPPU 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Sinergi dan koordinasi yang erat berbagai arah bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut dengan kebijakan Pemerintah, KSSK, industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi terus diperkuat agar perekonomian nasional dapat segera bangkit dan pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19, kembali ke lintasan jangka menengah-panjang menuju Indonesia maju.

Arah Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional. Arah dan penahapan kebijakan moneter akan dilakukan secara *pre-emptive*, *ahead the curve*, dan *front-loading* untuk tetap menjaga stabilitas dalam mengantisipasi normalisasi kebijakan moneter dan konsolidasi kebijakan fiskal global dan kenaikan Fed Funds Rate (FFR), dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional (Gambar 9). Kebijakan suku bunga rendah akan tetap dipertahankan sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi. Sebagaimana telah disampaikan, suku bunga kebijakan Bank Indonesia saat ini sebesar 3,50% terendah dalam sejarah. Fokus kebijakan suku bunga lebih diarahkan pada penguatan efektivitas transmisinya pada penurunan suku bunga kredit perbankan melalui kebijakan transparansi suku

Gambar 9. Arah Kebijakan Moneter Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia

bunga serta pendalaman pasar uang untuk menurunkan masih tingginya perbedaan imbal hasil SBN jangka menengah-panjang dengan suku bunga PUAB. Normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia akan dilakukan dengan penurunan secara bertahap kelebihan likuiditas yang sangat besar di perbankan. Penyesuaian likuiditas dimaksud akan dilakukan secara terukur dan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit dan melakukan pembelian SBN, sehingga akan tetap mendukung terjaganya stabilitas moneter dan sistem keuangan serta berlangsungnya proses pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, respons kebijakan terhadap dampak normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara AEs lainnya ditekankan pada kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas eksternal dan tidak mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan serta proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, ruang bagi penyesuaian nilai tukar Rupiah dan imbal hasil SBN sejalan dengan perubahan nilai tukar global dan imbal hasil *US Treasury* akan tetap dimungkinkan secara terukur dan dalam batas-batas yang normal untuk menjaga tetap menariknya imbal hasil aset SBN yang memadai dengan *interest rate differential* yang kompetitif. Bank Indonesia akan terus memonitor dan berada di pasar, dan selalu siap menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang diperlukan, melalui *triple intervention*, di pasar *spot*, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder, untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Koordinasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan yang selama ini erat akan terus diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan stabilitas pasar SBN dalam mengelola penyesuaian sesuai perkembangan global di atas. Strategi operasi moneter juga akan diperkuat untuk mendukung efektivitas *stance* kebijakan moneter tersebut.

Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah agar dapat terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam hal ini, koordinasi dilakukan

dalam beberapa tingkatan. Pertama, koordinasi kebijakan moneter-fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat baik dalam pembahasan asumsi makro dalam penyusunan APBN maupun pertemuan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam asesmen perkembangan ekonomi terkini, dengan mempertimbangkan realisasi belanja APBN dan pengelolaan moneter yang dilakukan. Pembahasan perkembangan makroekonomi, moneter, dan stabilitas sistem keuangan secara triwulanan juga dilakukan melalui KSSK. Kedua, koordinasi kebijakan moneter-fiskal dalam rencana penerbitan SBN baik domestik maupun global dalam pemenuhan pembiayaan APBN dengan mempertimbangkan perkembangan pasar keuangan global maupun pengaruhnya terhadap stabilitas moneter dan pasar keuangan domestik. Ketiga, koordinasi dalam pembelian SBN di pasar perdana oleh Bank Indonesia dalam pemenuhan pendanaan APBN sebagai pelaksanaan UU No. 2020 hingga akhir tahun 2022. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada tahun 2022 Bank Indonesia akan melanjutkan pembelian SBN di lelang pasar perdana untuk pembiayaan APBN sebagai pembeli siaga sebagaimana telah disepakati dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020. Di samping itu, Bank Indonesia juga akan melanjutkan pembelian SBN secara langsung sebesar Rp224 triliun pada 2022 untuk pembiayaan anggaran kesehatan dan sebagian anggaran kemanusiaan dalam APBN Tahun 2022 akibat Covid-19, yang telah dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021. Koordinasi fiskal-moneter yang erat ini semakin penting pada tahun 2022 sebagai langkah bersama dalam mengelola perekonomian nasional di tengah risiko tingginya ketidakpastian global karena normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di AS dan sejumlah negara AEs lainnya.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah juga terus diperkuat dalam pengendalian inflasi dan mendorong sektor-sektor prioritas untuk pemulihan ekonomi nasional. Seperti dikemukakan sebelumnya, secara keseluruhan inflasi

pada tahun 2022 diperkirakan akan tetap terkendali pada sasaran yang ditetapkan yaitu $3 \pm 1\%$ sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalnya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI Pusat dan Daerah) diarahkan untuk pengendalian inflasi khususnya dari kemungkinan kenaikan harga komoditas energi global dan juga tekanan harga bahan-bahan pokok. Sementara itu, koordinasi untuk mendorong sektor-sektor prioritas diperkuat dengan dukungan Bank Indonesia baik dalam asesmen perkembangan dan permasalahan yang terjadi di pusat maupun daerah, maupun rekomendasi kebijakan ekonomi nasional yang perlu ditempuh, termasuk dari hasil Kajian Ekonomi Keuangan Daerah (KEKDA) yang dilakukan oleh kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah. Koordinasi dan dukungan penuh dari Bank Indonesia

juga terus diperkuat dalam pengembangan dan peningkatan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah baik secara nasional maupun di berbagai daerah.

Arah Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2022 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, kebijakan makroprudensial longgar melalui penetapan kembali Rasio CCyB sebesar 0%, fleksibilitas pemenuhan rasio PLM sebesar 6% dengan SBN yang dimiliki untuk direpokan kepada Bank Indonesia, serta rasio FLTV/LTV KPR/ KPA sebesar 100% dan uang muka KKB sebesar 0% bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF rendah akan tetap berlaku sampai dengan akhir Desember tahun 2022 (Gambar 10). Kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan pembiayaan

Gambar 10. Arah Kebijakan Makroprudensial Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia

perbankan seperti RIM dan transparansi suku bunga juga akan dilanjutkan dan bahkan akan diperkuat efektifitasnya dengan pengawasan makroprudensial kepada perbankan. Lebih dari itu, kebijakan makroprudensial longgar juga akan diperluas untuk mendorong kredit/pembiayaan pada sektor-sektor prioritas sebagai bagian koordinasi kebijakan KSSK dalam pemulihan ekonomi nasional. Rumusan dan implementasi kebijakan makroprudensial ini akan disesuaikan dengan kondisi sektor prioritas dimaksud dan kendala yang dihadapi perbankan dalam penyalurannya, antara lain dalam bentuk insentif/disinsentif GWM maupun bentuk lainnya. Sementara itu, untuk mendukung ekonomi-keuangan inklusif khususnya UMKM, Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) akan terus ditingkatkan efektifitas implementasinya baik dalam bentuk upaya klusterisasi dan korporatisasi UMKM bersinergi dengan Pemerintah, mendorong kerja sama bank dengan lembaga mitra penyalur UMKM, maupun dengan pengembangan sekuritas pembiayaan UMKM yang dapat memenuhi persyaratan. Bank Indonesia juga bersinergi dengan Pemerintah dalam perluasan akses pembiayaan serta pengembangan UMKM, termasuk kelompok berpenghasilan rendah, dan subsisten. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga bersinergi dengan KSSK dan K/L terkait untuk terus mengembangkan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) dalam mendukung transformasi sistem keuangan hijau, termasuk kebijakan makroprudensial yang mendukung keuangan hijau dimaksud.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan KSSK untuk terus mendorong kredit/pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lain bagi dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Seperti telah dijelaskan diatas, proses pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung pula pada ketersediaan pembiayaan bagi dunia usaha. Lebih dari itu, pembiayaan perbankan juga sangat diperlukan untuk mengatasi luka memar dari pandemi Covid-19, yang juga akan berpengaruh dari keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Karenanya, sinergi dan koordinasi kebijakan

diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan sektor riil, khususnya pada sektor-sektor prioritas pendorong pemulihan ekonomi, maupun dalam KSSK untuk mengatasi permasalahan permintaan dari dunia usaha dan penawaran kredit perbankan. Efektivitas kebijakan makroprudensial longgar Bank Indonesia sangat dipengaruhi sinergi dan koordinasi kebijakan ini. Dari sisi Pemerintah, bentuk dukungan kebijakan antara lain adalah menggunakan instrumen APBN dalam mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial dan pemberian insentif fiskal, serta berbagai kemudahan usaha lainnya. OJK melalui berbagai instrumen mikroprudensial seperti kebijakan stimulus bagi institusi keuangan serta penyesuaian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan Uang Muka Perusahaan Pembiayaan. LPS melalui kebijakan penguatan program penjaminan simpanan dalam bentuk tingkat bunga penjaminan yang rendah dan insentif relaksasi denda keterlambatan premi penjaminan. Selain fokus pada pemulihan ekonomi, Bank Indonesia bersama KSSK juga memperkuat koordinasi dalam rangka mengantisipasi potensi risiko adanya lonjakan kembali kasus varian baru Covid-19.

Koordinasi pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dengan pengawasan mikroprudensial OJK dan penjaminan simpanan oleh LPS terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi dalam kerangka Forum Pengawasan Perbankan Terpadu antara Bank Indonesia dengan OJK dan LPS secara rutin terus dilakukan baik pada tingkat Deputi maupun Kepala Departemen. Beberapa hal yang menjadi poin pembahasan dalam forum dimaksud antara lain mengenai kondisi individual perbankan terkini, asesmen kondisi likuiditas, kualitas kredit, permodalan, maupun aspek lain seperti perkembangan kondisi moneter, pasar keuangan, korporasi maupun ekonomi makro. Selain sinergi kebijakan makroprudensial-mikroprudensial, Bank Indonesia dan OJK terus memperkuat landasan kerja sama dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP dan PLJPS) oleh Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia dan LPS secara intensif dan berkelanjutan melaksanakan koordinasi untuk memperkuat kesiapan penanganan bank bermasalah atau resolusi bank oleh LPS jika diperlukan.

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia akan terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran pada tahun 2022 untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk untuk mendorong ekonomi-keuangan inklusif. Berbagai program yang telah dicanangkan di dalam BSPI 2025 akan ditempuh, di samping implementasi dari program-program digitalisasi sistem pembayaran sesuai jadwal dan target yang ditentukan. Kebijakan sistem pembayaran pada tahun 2022 tetap diarahkan pada lima fokus strategi pokok (Gambar 11). *Pertama*, percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran agar sehat, kompetitif, dan inovatif melalui reformasi regulasi sesuai kebijakan dan pengaturan yang lebih ramah industri dalam PBI Sistem Pembayaran, kemudahan perizinan dan persetujuan dengan *service level agreement* (SLA) antara Bank Indonesia dengan industri sistem pembayaran, serta penguatan pengawasan sistem pembayaran khususnya dalam kepatuhan permodalan, manajemen risiko, dan keamanan siber. Strategi ini diarahkan untuk pembentukan ekosistem industri secara *end-to-end* dari perbankan digital, *fintech*, dan *e-commerce* baik melalui kerja sama bisnis, kepemilikan, maupun bentuk lainnya.

Kedua, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang *3I* (*interoperable, interconnected, dan integrated*), aman, dan andal terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan inklusi ekonomi

dan keuangan, termasuk UMKM dan transaksi ritel. Perluasan penggunaan QRIS terus ditingkatkan sebagai alat pembayaran nirsentuh dengan yang memenuhi protokol kesehatan melalui program SIAP QRIS di Pasar/Pusat Belanja, termasuk dengan peningkatan fitur-fitur layanan untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat. Perluasan penggunaan QRIS dilakukan untuk meningkatkan jumlah transaksi sehingga dapat disusun profil kredit *merchant* UMKM guna mendukung peningkatan kredit perbankan ke UMKM, mengurangi ruang bagi aktivitas pinjaman ilegal *online*, serta untuk mencapai target 15 juta pengguna QRIS pada tahun 2022. Implementasi SNAP untuk koneksi layanan transaksi pembayaran oleh perbankan dengan *fintech* terus dipercepat sehingga memperluas integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional. Demikian pula, operasionalisasi dan perluasan kepesertaan dalam BI-FAST terus ditingkatkan dan diharapkan seluruh bank telah tersambung sebagai peserta dan mampu memberikan layanan pembayaran ritel secara serta merata (*real time*) dan tanpa henti (24/7). Kami mengharapkan seluruh bank telah tersambung dengan dan memanfaatkan BI-FAST untuk memberikan layanan terbaik sistem pembayaran kepada masyarakat. Selain ketiga program unggulan tersebut, yaitu QRIS, SNAP, dan BI-FAST, Bank Indonesia juga akan memperkuat reformasi sistem pembayaran digital dengan program pengembangan untuk optimalisasi data serta menjaga ketersediaan dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Gambar 11. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia

Ketiga, pengembangan praktik pasar yang aman, efisien dan wajar untuk semakin mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Untuk itu, kebijakan skema harga (*pricing policy*) akan ditempuh guna menyederhanakan, harmonisasi, dan sekaligus menurunkan biaya transaksi dalam sistem pembayaran digital. Skema harga layanan sistem pembayaran yang saat ini terlalu bervariasi, baik jenis layanan, dari satu perusahaan jasa pembayaran ke yang lain, maupun kecepatan *merchant* penjual untuk menerima pembayaran dari pembeli akan disederhanakan. Tentunya skema harga tersebut perlu tetap memberikan insentif bagi industri untuk berinvestasi dan berinovasi yang menarik, tanpa harus membebani masyarakat sebagai konsumen. Penguatan manajemen risiko dan pengawasan sistem pembayaran juga akan terus ditempuh, khususnya dalam implementasi keamanan dan ketahanan siber, serta penguatan *compliance* terhadap prinsip APU PPT.

Bank Indonesia juga akan mempercepat persiapan penerbitan Digital Rupiah dan juga implementasi digitalisasi pengelolaan uang Rupiah. Bank Indonesia terus mengembangkan Digital Rupiah sebagai alat pembayaran sah, mendukung mandat dan pelaksanaan tugas kebanksentralan oleh Bank Indonesia di era digital, serta mendukung akselerasi dan integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional. Rencana penerbitan Digital Rupiah didasarkan setidaknya pada 3 (tiga) pertimbangan, yaitu: (i) Digital Rupiah sebagai alat pembayaran sah NKRI yang diterbitkan dan diedarkan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral yang diamanatkan dalam UUD dan UU, (ii) Kesiapan infrastruktur sistem pembayaran dan pasar keuangan yang terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas yang pada waktunya akan menjadi pengedar Digital Rupiah nilai besar (*wholesaler*), dan (iii) pilihan platform teknologi yang mendukung penerbitan dan pengedaran Digital

Rupiah seperti apakah *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau *Centralized Ledger*. Pada tahun 2022 Bank Indonesia akan menerbitkan rancang bangun (*conceptual design*) Digital Rupiah. Sementara itu, di sisi sistem pembayaran tunai, arah kebijakan Bank Indonesia akan difokuskan untuk menyediakan uang Rupiah yang berkualitas dan kecukupan kas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI sesuai BPPUR 2025. Arah kebijakan ini ditempuh untuk mencapai 3 (tiga) sasaran (*key milestones*) sekaligus, yaitu (i) efisiensi dalam pencetakan dan pengedaran uang kertas dan logam, (ii) sentralisasi distribusi pengedaran uang dari pusat hingga ke berbagai pelosok daerah, termasuk dari 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil), serta (iii) digitalisasi dengan memperhatikan keselarasannya terhadap program digitalisasi ekonomi dan keuangan.

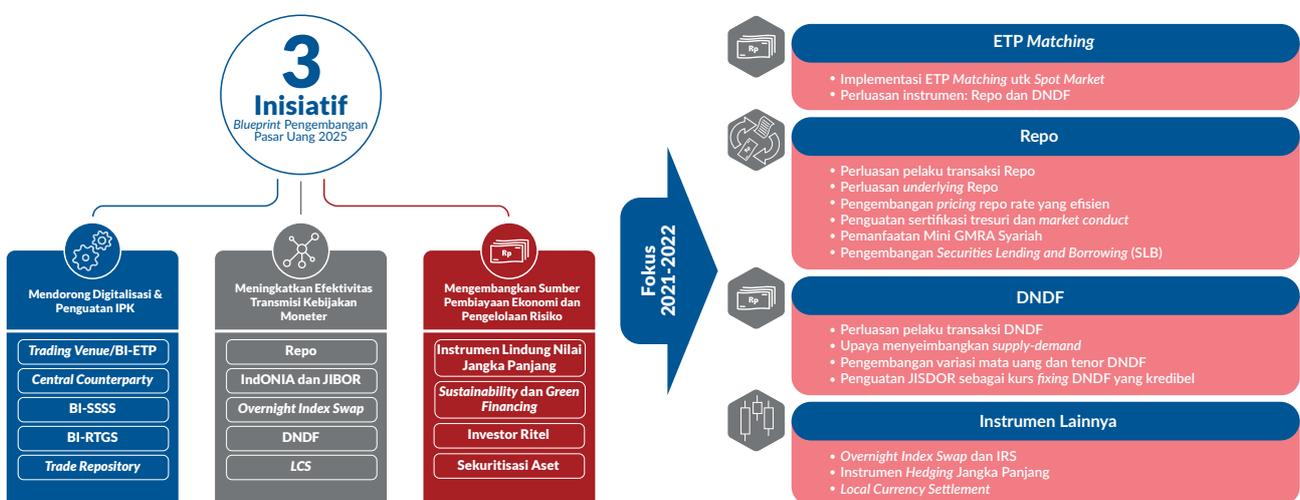
Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), perbankan, dan asosiasi baik sistem pembayaran, fintech dan e-commerce. Koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) terutama diarahkan untuk perluasan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah dengan memperkuat TP2DD, mendorong penyaluran bansos *Government to Private* (G2P) 4.0, memperluas elektronifikasi dan integrasi antar moda transportasi dan implementasi *Multi Lane Free Flow* (MLFF), maupun dalam memperluas digitalisasi UMKM dan pariwisata melalui Gernas BBI dan BWI di berbagai daerah dan destinasi pariwisata utama yang telah ditetapkan. Sinergi dan koordinasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dengan digitalisasi lembaga keuangan oleh OJK, khususnya terkait dengan pengembangan *fintech* melalui *sandbox* dan juga bank digital. Sinergi dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran, asosiasi *fintech* dan asosiasi lainnya terus diperkuat baik dalam memperluas berbagai program digitalisasi sistem pembayaran yang sudah berjalan, seperti QRIS, SNAP, dan BI-FAST, maupun dalam memperluas layanan kepada masyarakat luas.

Akselerasi Pendalaman Pasar Uang

Akselerasi pendalaman pasar keuangan untuk penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta pembiayaan infrastruktur dan dunia usaha guna mendukung pemulihan perekonomian nasional. Akselerasi pendalaman pasar uang pada tahun 2022 terus diarahkan untuk membangun pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta menopang transformasi pengelolaan moneter yang lebih mendukung pengembangan pasar, baik dalam instrumen (*product*), pelaku (*participant*), mekanisme penentuan harga (*pricing*), serta infrastruktur yang terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas antara pasar uang dan sistem pembayaran. Pengembangan inisiatif utama BPPU 2021 dilanjutkan berdasarkan 3 (tiga) pilar kebijakan (Gambar 12). Pada pilar *pertama*, pengembangan infrastruktur pasar uang akan difokuskan pada implementasi *central counterparty* (CCP) yang diharapkan siap beroperasi pada 2022, di samping perluasan transaksi pasar uang melalui ETP *multi-matching* baik untuk pasar uang Rupiah dan valas. Disamping itu, Bank Indonesia juga akan melakukan finalisasi *Conceptual Design* (CD) pengembangan infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, termasuk BI-APS, BI-SSSS, BI-RTGS Gen 3, dan *Trade Repository*.

Pada pilar *kedua*, penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter akan difokuskan pada implementasi instrumen pasar uang yang ditransaksikan via ETP *multi-matching*, serta pengembangan transaksi Repo, DNDF, dan LCS. Dalam kaitan ini, berbagai program terus ditingkatkan untuk mengakselerasi peningkatan penggunaan kerangka *Local Currency Settlement* (LCS) dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra, dengan memperkuat sinergi dan koordinasi dengan otoritas terkait lainnya. Kampanye LCS secara luas terus diperluas untuk penggunaan LCS berbasis *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) kepada perbankan, korporasi, dan pihak pengguna potensial lainnya, bekerja sama dengan instansi terkait di domestik dan negara mitra. Termasuk dalam program ini adalah implementasi kurs acuan Non-USD/IDR untuk pengembangan instrumen derivatif dalam kerangka LCS. Selain itu, Bank Indonesia juga akan memperkuat pengaturan transaksi di pasar valuta asing melalui penyederhanaan dan integrasi ketentuan untuk mendorong pendalaman pasar dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Reformasi regulasi pasar uang ini akan menyederhanakan ketentuan dengan mendasarkan pada pendekatan *principle-based* untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektifitas implementasi bagi pelaku pasar.

Gambar 12. Akselerasi Pendalaman Pasar Uang Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia

Sementara pada pilar *ketiga*, pembiayaan ekonomi juga akan terus diperkuat melalui 3 (tiga) strategi kebijakan yaitu (i) mendorong pengembangan sekuritisasi aset melalui program KIK-EBA dan EBA-SP, (ii) mendorong pengembangan investor ritel dan literasi keuangan secara rutin, dan (iii) memperkuat koordinasi dan komunikasi terkait program *Sustainable Green Finance* (SGF). Berbagai kebijakan pendalaman pasar keuangan tersebut tentunya akan didukung oleh sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS dalam koordinasi FK-PPPK. Pengembangan berbagai produk derivatif di pasar uang dan valas oleh Bank Indonesia seperti dikemukakan di atas, khususnya terkait instrumen lindung nilai tukar (seperti DNDF), lindung nilai suku bunga (*interest rate swap*), repo maupun LCS, akan pula mendorong pembiayaan jangka menengah panjang.

Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau

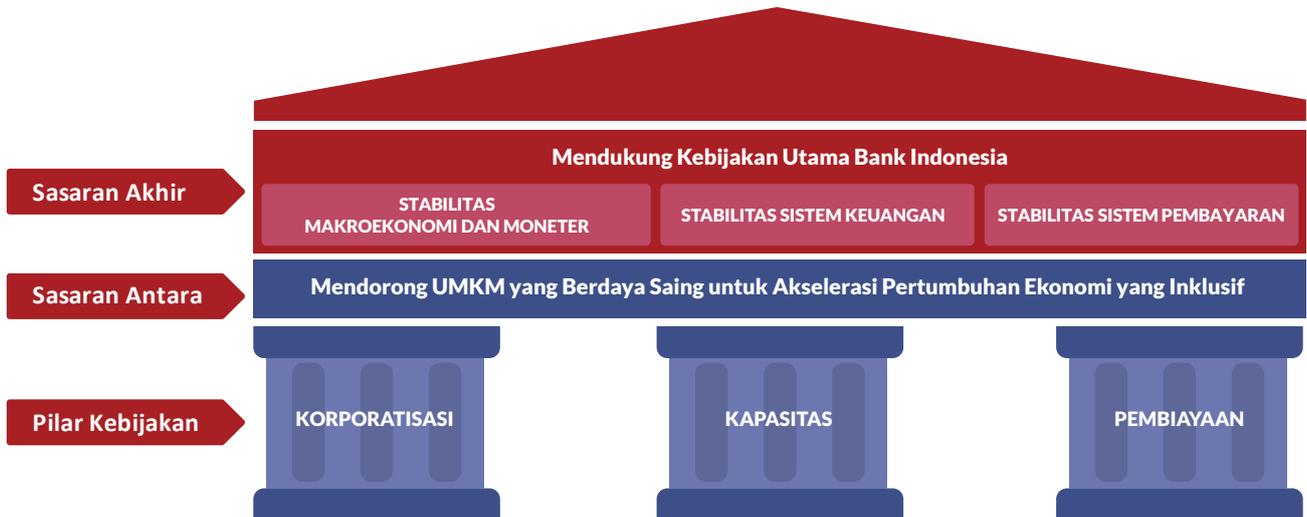
Bank Indonesia akan terus memperluas dan memperkuat program pengembangan UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi akses pembiayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Korporatisasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan, perluasan kemitraan, serta pengembangan model bisnis pengembangan kelompok *subsistence* sebagai upaya penciptaan wirausaha baru. Peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara *end to end* dan akan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar (Gambar 13). Peningkatan akses pasar dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi dan kurasi produk, promosi perdagangan internasional, serta mendorong interkoneksi dengan *local value chain* (LVC) maupun *global value chain* (GVC). Bank Indonesia juga akan mendukung gerakan kampanye UMKM Hijau, yang diawali kajian dan *pilot project* untuk mempertajam praktik yang telah berlangsung selama ini. Fasilitasi akses pembiayaan UMKM akan

dilakukan untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif, antara lain melalui pemetaan pola pembiayaan UMKM melalui *multiple channel e-commerce* dan kemitraan, serta fasilitasi temu bisnis (*business matching*). Penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) untuk mendorong UMKM *Go Export* dan *Go Digital* akan terus ditingkatkan pada tahun 2022, sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja (BWI) dengan melibatkan seluruh kantor Bank Indonesia.

Peran ekonomi dan keuangan syariah akan terus didorong sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi.

Akselerasi implementasi ekosistem *halal value chain*, baik lokal maupun global, semakin diperluas baik dari aspek pelaku, kelembagaan, maupun infrastruktur pendukung. Fokus pengembangan ekosistem *halal value chain* ini akan tetap diutamakan sektor unggulan makanan halal (*halal food*) dan fesyen muslim (*modest fashion*). Dari sisi keuangan syariah, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan syariah ditempuh antara lain melalui pengembangan instrumen transaksi valas dan Sukuk BI Inklusif. Dukungan peningkatan optimalisasi keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan sektor unggulan ekonomi syariah tersebut, terus didorong, terutama melalui wakaf produktif. Di samping itu, peningkatan *business linkage* dalam rangkaian kegiatan Fesyar di tiga wilayah (Jawa, Sumatera, dan Wilayah Indonesia Timur) dan ISEF bertaraf internasional. Penguatan *center of excellence* ekonomi dan keuangan syariah yang juga terus ditingkatkan melalui pendidikan tinggi menjadi bagian penting dalam implementasi strategi pengembangan dan peningkatan literasi masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam wadah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) maupun dengan pondok pesantren, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), asosiasi pengusaha, perbankan, para ulama, akademisi, dan masyarakat luas.

Gambar 13. Penguatan Program Pengembangan UMKM



Bank Indonesia melanjutkan penguatan kebijakan keuangan hijau untuk mendukung pencapaian ekonomi berkelanjutan dengan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan hijau. Dalam rangka menjawab tantangan perubahan iklim ke depan yang dapat mengancam stabilitas perekonomian serta sebagai bentuk kontribusi aktif Bank Indonesia dalam pencapaian target Indonesia rendah karbon, Bank Indonesia akan melakukan transformasi yang bersifat menyeluruh melalui penguatan kebijakan keuangan hijau. Kajian mengenai kebijakan makroprudensial hijau untuk mendukung *sustainable finance* terus dilakukan. Bank Indonesia juga terus mendorong pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan instrumen pasar uang hijau. Pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif hijau terus dilakukan antara lain melalui pengembangan model bisnis ekonomi sirkular, *green farming*, dan laporan keuangan hijau bagi UMKM dan pelaku ekonomi syariah. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan transformasi kelembagaan Bank Indonesia, termasuk terkait tata kelola, manajemen risiko, strategi, serta *performance indicator* hijau. Dalam pengembangan dan implementasinya, Bank Indonesia akan terus bersinergi dan melakukan koordinasi yang erat dengan KSSK, Kementerian/Lembaga, dan *stakeholders* terkait.

Kebijakan Internasional

Di sisi kebijakan internasional, kami juga akan terus aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 akan dioptimalkan dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia maupun perekonomian global baik melalui formulasi substansi dan penyelenggaraan yang sebaik-baiknya. Tidak hanya berhenti pada Presidensi G20, formulasi substansi yang mendukung kepentingan Indonesia dan kawasan akan menjadi fokus dalam keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Penguatan kerja sama internasional juga terus dilakukan pada tataran multilateral, regional, dan bilateral terkait Jaring Pengaman Keuangan Internasional, LCS, Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan Digital, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, hingga *Structured Bilateral Cooperation* dengan bank sentral dan lembaga internasional lainnya. Bank Indonesia terus meningkatkan persepsi positif investor dan lembaga rating melalui kegiatan *engagement* yang lebih proaktif. Kami juga terus berperan penting dalam memfasilitasi promosi perdagangan dan investasi sektor-sektor prioritas melalui dukungan *Investor Relation Unit* (IRU) baik di tataran daerah,

nasional, dan internasional. Kami akan melakukan kampanye yang masif untuk mendorong dan memperluas penggunaan LCS diantaranya melalui kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha potensial bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Luar Negeri dan Dalam Negeri serta mitra strategis Bank Indonesia lainnya.

Respons kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya untuk kembali berada di lintasan jangka menengah menuju Indonesia maju. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Pemulihan ekonomi akan berlangsung, didukung pula oleh peningkatan mobilitas seiring dengan penyebaran Covid-19 yang lebih terkendali dan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor prioritas yang semakin luas disertai optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu KSSK, serta stimulus kebijakan fiskal Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dalam jangka menengah panjang, prospek ekonomi akan meningkat dan berada di lintasan menuju Indonesia Maju, didorong oleh prospek ekonomi global yang membaik serta kenaikan investasi dan produktivitas sejalan implementasi kebijakan reformasi struktural baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Peningkatan daya saing perekonomian serta kapasitas dan kapabilitas industri mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lebih berdaya tahan dengan struktur perekonomian yang makin baik. Selain itu, iklim bisnis dan investasi yang lebih baik, diantaranya melalui implementasi UU Cipta Kerja, akan mendorong penguatan

sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kami memprakirakan dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat hingga berada pada kisaran 5,0- 5,8% pada 2026. Inflasi diperkirakan tetap terjaga rendah pada kisaran 1,5-3,5%, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan diperkirakan juga tetap terkendali pada level yang sehat dalam kisaran 1,4-2,2% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.

Bangkit dan Optimis untuk Indonesia Maju

Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan semakin membaik, dan Bank Indonesia terus bersinergi menjaga momentum kebangkitan dan membangun optimisme pemulihan perekonomian nasional. Stabilitas perekonomian akan tetap terjaga, di tengah proses pemulihan perekonomian yang terus berlangsung. Mobilitas dan aktivitas perekonomian akan terus membaik seiring dengan terkendalinya penyebaran Covid-19 dan akselerasi vaksinasi. Sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), KSSK, perbankan, dan dunia usaha akan terus diperkuat untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional yang berkesinambungan. Bank Indonesia juga akan melanjutkan dan menjaga sinergi yang berjalan dengan baik dengan DPR khususnya Komisi XI, akademika, media, dan berbagai pihak lain. Inovasi bauran kebijakan yang mencakup moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran senantiasa diselaraskan dengan perkembangan kondisi global, domestik, serta kebijakan fiskal untuk mendukung berlanjutnya reformasi struktural perekonomian nasional.

Sebagai penutup, dengan sinergi dan inovasi, Indonesia telah mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19 dan sekarang bangkit dan optimis pemulihan ekonomi akan lebih tinggi pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Dengan sinergi dan inovasi itulah, prospek ekonomi Indonesia semakin membaik didukung oleh sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional, akselerasi transformasi di sektor riil dan keuangan, serta inovasi dan akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Untuk

semua itu, mari kita terus memperkuat sinergi dan inovasi untuk semakin bangkit melangkah ke depan. Mari kita terus bekerja dan berkarya, bersama membangun dan menebarkan harapan, keyakinan, dan optimisme akan pemulihan ekonomi nasional, menuju Indonesia Maju. Semoga Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan, kesempurnaan, dan keberkahan kepada bangsa dan negara Indonesia dan kepada kita semua.

Sekian, terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Jakarta, 24 November 2021

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

